

**ANALISIS WACANA *TAJUK RENCANA*
PADA SURAT KABAR HARIAN *KOMPAS* :
SUATU TINJAUAN STRUKTURAL DAN RAGAM BAHASANYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah



Oleh :

C. SRI ASTUTI

NIM : 951224012

NIRM : 950051120401120012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2001**

SKRIPSI

**ANALISIS WACANA *TAJUK RENCANA*
PADA SURAT KABAR HARIAN *KOMPAS* :
SUATU TINJAUAN STRUKTURAL DAN RAGAM BAHASANYA**

Oleh:

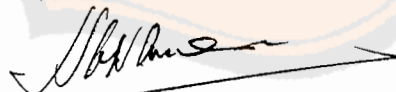
C. Sri Astuti

NIM: 951224012

NIRM: 950051120401120012

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

Tanggal 27 Februari 2001

SKRIPSI

**ANALISIS WACANA *TAJUK RENCANA*
PADA SURAT KABAR HARIAN *KOMPAS* :
SUATU TINJAUAN STRUKTURAL DAN RAGAM BAHASANYA**

Dipersiapkan dan ditulis oleh

C. Sri Astuti

NIM: 951224012

NIRM: 950051120401120012

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 23 Maret 2001
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua : Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

Sekretaris: Drs. P. Hariyanto

Anggota : Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

Anggota : Drs. B. Rahmanto, M.Hum.

Anggota : Dr. Pranowo, M.Pd.

Yogyakarta, 24 April 2001

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Dr. Paul Suparno, S.J., M.S/T.

MOTO

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

(Surat Paulus kepada Jemaat di Roma, 5: 1-5)

Skripsi ini saya persembahkan:

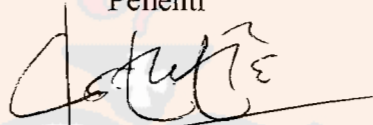
- 1. sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Tuhan, Allah yang Mahakasih, yang senantiasa menghidupiku dengan cinta sejati, kasih karunia sejati, dan pengharapan sejati;**
- 2. sebagai tanda bakti bagi Bapak dan Ibu: Johanes Damacinus Ngatidjo dan Maria Goretti Mudjiati, yang selalu melimpahiku dengan kasih, doa, nasihat, dan dukungan materi;**
- 3. sebagai tanda persaudaraan bagi Kakakku: Endar-Eddy, Ento, Utami-Koen, Ogik, dan Adikku: Maria dan Rosa, yang selalu mendukungku dengan kepedulian dan semangat;**
- 4. bagi keponakanku: Ria, Betha, dan Dinda, yang memberikan suasana berbeda bagiku; dan**
- 5. bagi “teman setiaku”, terima kasih karena aku boleh menerima apa yang telah dan selalu kau berikan padaku: doamu, cintamu, dan harapanmu.**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Analisis Wacana Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Kompas: Suatu Tinjauan Struktural dan Ragam Bahasanya* ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 23 Maret 2001

Peneliti



C. Sri Astuti

ABSTRAK

Astuti, C. Sri. 2001. *Analisis Wacana Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Kompas: Suatu Tinjauan Struktural dan Ragam Bahasanya*. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Universitas Sanata Dharma.

Penelitian ini mengkaji wacana *Tajuk Rencana* pada surat kabar harian *Kompas*, ditinjau dari segi struktural dan ragam bahasanya. Ada dua tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan struktur wacana *Tajuk Rencana* pada harian *Kompas*. Kedua, mendeskripsikan penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran penulisan (ejaan), tataran kosa kata dan morfologi, dan tataran sintaktis dalam wacana *Tajuk Rencana* pada harian *Kompas*.

Untuk mencapai dua tujuan tersebut, penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisis data. Penyediaan data dilaksanakan dengan menggunakan metode simak. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode padan ortografis dan metode agih. Metode padan ortografis digunakan untuk menganalisis struktur wacana. Metode agih digunakan untuk menganalisis struktur wacana dan penggunaan ragam bahasa jurnalistik. Penyajian hasil analisis data dilaksanakan dengan menggunakan metode informal dan metode formal.

Struktur wacana *Tajuk Rencana* terdiri atas empat bagian, yaitu judul, pembuka, isi, dan penutup. Bagian penutup mempunyai empat variasi, yaitu bagian penutup yang disusun dengan menggunakan (1) kalimat berita, (2) gabungan antara kalimat berita dan kalimat tanya, (3) gabungan antara kalimat berita dan kalimat suruh, dan (4) gabungan antara kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh.

Berdasarkan ciri-ciri linguistis ragam bahasa jurnalistik, ditemukan adanya penggunaan ragam bahasa jurnalistik yang terdapat pada wacana

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tajuk Rencana pada tataran penulisan (ejaan), tataran kosa kata dan morfologi, dan tataran sintaktis. Pada tataran penulisan (ejaan), ada penghematan atau keekonomisan penulisan; ada penyimpangan penulisan unsur-unsur kalimat yang inversif, yaitu menggunakan tanda koma pada dua judul wacana dari 26 judul wacana; dan ada pemilihan penulisan yang sesuai dengan ketentuan EYD.

Pada tataran kosa kata dan morfologi, ada campur kode yang berasal dari kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Inggris, kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Jawa, dan kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Belanda. Selain itu, ada penghilangan dan penghematan (keekonomisan) penggunaan kata, yang mencakup awalan, kata bantu kata kerja, kata bantu bilangan penunjuk satuan, preposisi penghubung kata kerja, dan konjungsi ketergantungan (konjungsi kalimat majemuk); ada penggunaan kata-kata penat; ada penggunaan kata-kata susastra (kata-kata yang bermakna konotasi); ada penggunaan padanan kata, atau penggantinya (kata ganti orang, atau tunjuk); dan ada pengungkapan konsep jamak yang menggunakan cara yang paling ekonomis. Pada tataran sintaktis, ada anak kalimat yang berdiri sendiri; dalam hal kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat, dari 26 judul wacana, semuanya menggunakan kalimat yang lengkap fungsi-fungsinya, sedangkan pada bagian-bagian wacana, ada kalimat yang tidak lengkap fungsi-fungsinya; dan ada penghematan penggunaan kata fungsi.

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran wacana dan pembelajaran ragam bahasa. Implikasi terhadap pembelajaran wacana, hasil penelitian ini bermanfaat untuk siswa agar dapat menemukan struktur wacana *Tajuk Rencana*. Implikasi terhadap pembelajaran ragam bahasa, hasil penelitian ini bermanfaat untuk siswa agar dapat menemukan ciri-ciri linguistik penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada wacana *Tajuk Rencana*, berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik.

ABSTRACT

Astuti, C. Sri. 2001. *Discourse Analysis Tajuk Rencana on Kompas Daily Newspaper: A Structural View and Its Language Varieties*. Thesis. Yogyakarta: Vernatular, and Indonesian Literature Language Education Study Program, Sanata Dharma University.

This research discusses *Tajuk Rencana* discourse on *Kompas* daily newspaper, viewed from the structural side and its language varieties. This research has two objectives. First, to describe the structure of *Tajuk Rencana* discourse on *Kompas* daily newspaper. Second, to describe the use of journalistic language varieties on the level of spelling, vocabulary and morphology, and syntax in *Tajuk Rencana* discourse of *Kompas* daily newspaper.

In order to achieve those two objectives, this research is done through three steps, they are the data providing, the data analysis, and the presentation of the results. The data providing is done through observation method. The data analysis is done through orthographic equality method and distributional method. Orthographic equality method is used to analyse the structure of discourse. Distributional method is used to analyse the structure of discourse and the use of journalistic language varieties. The presentation of the results is done through the informal method and the formal method.

The structure of *Tajuk Rencana* discourse is classified into four parts, they are title, introduction, body, and conclusion. The conclusion has four varieties, that are the conclusion, which is compiled by using (1) declarative sentences, (2) combination of declarative sentences and interrogative sentences, (3) combination of declarative sentences and imperative sentences, and (4) combination of declarative sentences, interrogative sentences, and imperative sentences.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Based on the linguistic characteristics of the journalistic language varieties, there is the use of journalistic language varieties in *Tajuk Rencana* discourse on the level of spelling, vocabulary and morphology, and syntax. On the level of spelling, there are spelling economy; there is a deviation in the writing of inversive sentences parts, that is using comma at two discourse title of the 26 discourse titles; and choice of spelling in accordance with EYD.

On the level of vocabulary and morphology, there are three code mixings, that comes from Indonesian and English words, Indonesian and Javanese words, and Indonesian and Dutch words. Besides that, there are ommision and economy of word use, consist of prefix, auxiliary verbs, attributive numerals, preposition to verbs, conjunction, complex sentence conjunction; the use of tired words; the use of literary words (connotated-meaning words); the use of equal words or the substitution (pronouns); and the use of plural concept in the most economic way. On the level of syntax, there are dependent clauses, which are independent; in the completeness of the word or phrase functions in the sentences, the 26 discourse titles use complete functions sentences, whereas at the discourse parts, there are sentences with incomplete functions; and there is an economy of function words use.

The result of the study has two implications on the Indonesia language learning, they are discourse learning and language varieties learning. The implication on the discourse learning is that the result of the study gives advantages for the students to find the structure of *Tajuk Rencana* discourse. The implication on the language varieties learning is that the result of the study gives advantages for the students to find the use of journalistic language varieties in *Tajuk Rencana* discourse, based on the linguistic characteristics of the journalistic language varieties.

KATA PENGANTAR

Peneliti mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, Allah yang Mahakasih atas karunia dan penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah (PBSID). Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam proses penyusunan skripsi;
2. Dr. Paul Suparno, S.J., M.S.T. selaku Dekan FKIP Universitas Sanata Dharma, Drs. J.B. Gunawan, M.A., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dan Dr. B. Widharyanto, M.Pd. selaku Ketua Program Studi PBSID, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Para dosen PBSID dan dosen Sastra Indonesia yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada peneliti sehingga dapat digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini;
4. Karyawan dan karyawan Sekretariat PBSID dan MKDU yang memperlancar urusan administrasi perkuliahan yang diperlukan oleh peneliti;

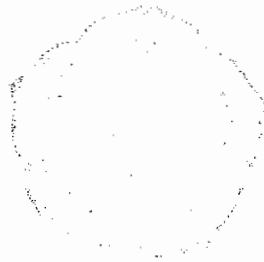
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Karyawan dan karyawan Perustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah membantu peneliti untuk mendapatkan kepustakaan yang dibutuhkan;
6. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi PBSID Angkatan 1995 yang telah bersama-sama untuk saling berdiskusi tentang berbagai kesulitan dan berbagi kegembiraan dengan peneliti, baik selama menjalani studi di Universitas Sanata Dharma maupun dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini;
7. Orang tua, kakak, adik, dan saudara yang selalu mendukung peneliti selama menjalani studi di Universitas Sanata Dharma dan dalam menyelesaikan skripsi ini; dan
8. Mas Deni yang telah menyediakan waktu untuk membantu peneliti dengan kesabaran dalam pengetikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih, peneliti menghargai dan menerima berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Peneliti

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Rumusan Variabel dan Batasan Istilah Penelitian.....	11
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Penyajian.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Tinjauan Pustaka.....	15

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.2 Landasan Teori.....	21
2.2.1 Pengertian Wacana, Paragraf, dan Kalimat.....	21
2.2.2 Jenis Wacana.....	25
2.2.3 Struktur Wacana.....	27
2.2.4 Pengertian dan Ciri-ciri Linguistis Ragam	
Bahasa Jurnalistik.....	28
2.2.4.1 Pada Tataran Penulisan (Ejaan).....	29
2.2.4.2 Pada Tataran Kosa Kata dan Morfologi.....	30
2.2.4.3 Pada Tataran Sintaktis.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	41
3.3 Prosedur Penelitian.....	42
3.3.1 Metode Penyediaan Data.....	43
3.3.2 Metode Analisis Data.....	43
3.3.3 Metode Penyajian Hasil Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Hasil Penelitian.....	48
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1 Struktur Wacana.....	51
4.2.1.1 Bagian Judul.....	51
4.2.1.2 Bagian Pembuka.....	53

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.2.1.3 Bagian Isi.....	53
4.2.1.4 Bagian Penutup	55
4.2.2 Penggunaan Ragam Bahasa Jurnalistik Berdasarkan Ciri-ciri Linguistik Ragam Bahasa Jurnalistik pada Tataran Penulisan (Ejaan), Tataran Kosa Kata dan Morfologi, dan Tataran Sintaktis dalam Wacana <i>Tajuk Rencana</i>	63
4.2.2.1 Pada Tataran Penulisan (Ejaan)	63
4.2.2.2 Pada Tataran Kosa Kata dan Morfologi	68
4.2.2.3 Pada Tataran Sintaktis	80
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Implikasi	87
5.3 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Rubrik opini mendapat tempat terhormat dalam pers Indonesia. Rubrik ini merupakan cerminan sikap surat kabar karena karakter pribadi, pemikiran, dan pengalaman pemimpin redaksi dan redaksi ikut menentukan jenis opini yang dikemukakan (Swantoro dan Sumartana dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 21). Pada beberapa surat kabar, rubrik opini ikut membentuk aliran utama (*mainstream*) pemikiran yang berkembang dalam dunia intelektual (Siregar dan Suarjana, 1995: 7). Misalnya, *Kompas* dan *Tempo* merupakan “prototipe produk” pers kalangan kelas menengah yang sudah mapan. Hal ini berarti bahwa *Kompas* sebagai surat kabar harian dan *Tempo* sebagai majalah berita mingguan sudah menemukan bentuknya yang baku sehingga dengan mudah dapat dikenali oleh pembacanya (Swantoro dan Sumartana dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 21-22).

Selain itu, rubrik opini juga dapat dipandang sebagai forum “seminar terbuka” yang menjadi tempat dalam pertukaran gagasan yang berasal dari masyarakat (Siregar dan Suarjana, 1995: 7). Halaman-halaman surat kabar, yang didominasi oleh hasil-hasil liputan wartawan untuk berita-berita faktual, hampir tidak memberi kesempatan bagi kalangan di luar surat kabar untuk berpendapat dengan sikap masing-

masing. Akan tetapi, belakangan ini, rubrik opini di berbagai halaman surat kabar menjadi tempat percaturan gagasan bagi kaum intelektual untuk meningkatkan kualitas wawasan. Rubrik opini juga menjadi semacam arena mengasah visi dan sebagai pendukung atau pengganti pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah. Hal ini berarti bahwa pembaca awam dapat memanfaatkannya sebagai tempat memperoleh pengetahuan dari para ilmuwan, pakar, atau pemerhati yang mengemukakan pendapatnya. (Rini, *dkk.* dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 110).

Artikel opini adalah tulisan dalam media cetak yang memasukkan pendapat penulis di dalamnya; artinya, artikel yang mengandung subjektivitas, bukan hanya fakta (Hutabarat dan Pudjomartono dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 30). Pada awalnya, artikel opini di surat kabar biasanya ditempatkan di halaman khusus yang disebut halaman opini (*editorial page*). Pada halaman tersebut dimuat tajuk rencana, surat pembaca, karikatur, dan ulasan yang hanya menyuarakan pendapat redaksi surat kabar. Selain halaman opini, juga terdapat halaman *opposite editorial* yang letaknya bersebelahan dengan halaman opini. Halaman *opposite editorial* berisi pendapat-pendapat yang bertentangan dengan pendapat redaksi surat kabar. Halaman tersebut diperlukan untuk menampung pendapat di luar redaksi surat kabar yang berbeda dengan pendapat redaksi surat kabar (Hutabarat dan Pudjomartono dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 30).

Dewasa ini, halaman khusus yang disebut halaman opini sering ditinggalkan oleh banyak surat kabar di Indonesia. Alasannya disebabkan oleh karena keterbatasan ruang surat kabar. Oleh karena itu, penempatan opini antara surat kabar yang satu berbeda dengan surat kabar yang lain. Misalnya, kita dapat menemukan tajuk rencana atau komentar di halaman depan. Ada juga surat kabar yang menempatkan tajuk rencana dalam satu halaman bersama-sama iklan. Padahal, menurut konsep “lama”, opini selain harus bebas dari berita, juga harus bebas dari foto dan iklan. Satu-satunya “ilustrasi” yang boleh ada hanyalah kartun atau karikatur, yang memang merupakan opini (Hutabarat dan Pudjomartono dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 30-31).

Contoh-contoh penempatan artikel opini, khususnya tajuk rencana yang berbeda-beda antara surat kabar yang satu dengan surat kabar yang lain dikemukakan berikut ini. *Bernas* menempatkan tajuk rencana dengan nama “Tajuk Rencana” pada kolom “Wacana” halaman 6. *Bisnis Indonesia* menempatkan tajuk rencana dengan nama “Bisnis Indonesia” pada halaman 2. *Jateng Pos* menempatkan tajuk rencana dengan nama “Tajuk” pada halaman 14. *Kedaulatan Rakyat* menempatkan tajuk rencana dengan nama “Tajuk Rencana” pada halaman 6. *Kompas* menempatkan tajuk rencana dengan nama “Tajuk Rencana” pada halaman 4. *Kontan* menempatkan tajuk rencana dengan nama “Tajuk” pada kolom “Fokus” halaman 2. *Republika* menempatkan tajuk rencana dengan nama “Tajuk” pada kolom “Opini” halaman 10. *Suara Merdeka* menempatkan

tajuk rencana dengan nama “Tajuk Rencana” pada kolom “Wacana” halaman VI. *Suara Pembaruan* menempatkan tajuk rencana dengan nama “Tajuk Rencana” pada kolom “Editorial dan Opini” halaman 8. *The Jakarta Post* menempatkan tajuk rencana dengan nama “The Jakarta Post” halaman 4.

Hutabarat dan Pudjomartono (dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 33-35) membedakan artikel opini berdasarkan unit analisis, bobot argumen, dan posisi penulis. Berdasarkan unit analisis, artikel opini dibedakan menjadi artikel opini mikroanalitis dan makroanalitis. Artikel opini mikroanalitis (*microanalytic approach*) adalah jenis artikel opini yang membahas permasalahan pada tingkat individual. Artikel ini difokuskan pada objek yang ditulis, misalnya resensi film atau resensi buku. Artikel opini makroanalitis (*macroanalytic approach*) yaitu jenis artikel opini yang membahas realitas pada tingkat sistem, misalnya sistem sosial. Artikel opini jenis ini misalnya tajuk rencana dan opini yang ditulis pakar.

Berdasarkan bobot argumen, artikel opini dibedakan menjadi empat jenis, yaitu artikel opini (1) berbobot impresi, (2) berbobot evaluasi, (3) berbobot interpretasi, dan (4) berbobot eksplanasi. Artikel opini berbobot impresi adalah artikel opini yang menggunakan alat analisis impresi penulis sehingga artikel opini jenis ini merupakan suara pribadi penulis yang mengandung subjektivitas. Kolom, misalnya, ditulis sebagai *personal view* yang kuat, berdasarkan keabsahan impresi dan gaya pribadi

penulis. Artikel opini berbobot evaluasi adalah artikel opini yang menggunakan alat analisis *judgements*, yaitu norma yang menegaskan atau menyangkal sesuatu dengan kecerdasan. *Judgements* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *technical judgements* dan *value judgements*. *Technical judgements* membahas nilai-nilai intrinsik, sedangkan *value judgements* membahas nilai-nilai ekstrinsik dari suatu hal. Resensi buku, misalnya, mengandung bobot *technical judgements*, sedangkan kritik mengandung *value judgements* (Hutabarat dan Pudjomartono dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 33).

Artikel opini berbobot interpretasi adalah artikel opini yang menggunakan alat analisis proposisi, yaitu pernyataan tentang sifat dari realitas yang dapat dibuktikan kebenarannya. Artikel opini jenis ini misalnya tajuk rencana. Artikel opini berbobot eksplanasi adalah artikel opini yang menggunakan alat analisis teori, yaitu pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih yang telah berkali-kali diuji kebenarannya. Opini yang ditulis pakar, misalnya, merupakan artikel opini yang mengandung bobot eksplanasi (Hutabarat dan Pudjomartono dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 34).

Berdasarkan posisi penulis, artikel opini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (1) opini pribadi (*personal voice*), (2) suara lembaga (*publisher/editor voice*), dan (3) suara autoritatif (*authoritative voice*). Opini pribadi adalah artikel opini yang ditulis dengan mencantumkan nama pribadi penulis tanpa mempermasalahkan posisi dan gelar keahlian

penulis. Artikel opini jenis ini misalnya surat pembaca. Suara lembaga adalah artikel opini yang biasanya ditulis tanpa nama penulis karena merupakan suara lembaga. Penulis pada umumnya berasal dari redaksi surat kabar, tetapi penulis juga dapat berasal dari orang di luar redaksi surat kabar. Artikel opini jenis ini misalnya tajuk rencana. Suara autoritatif adalah artikel opini yang ditulis oleh orang yang memiliki otoritas, misalnya pakar di suatu bidang. Artikel opini jenis ini ditulis dengan menyatakan nama penulis yang disertai dengan posisi dan gelar keahliannya karena opini yang ditulis mengandung keabsahan dari sumber yang berwenang di bidang tertentu. Artikel opini jenis ini, misalnya, opini yang ditulis pakar (Hutabarat dan Pudjomartono dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 34-35).

Jenis opini yang saat ini semakin banyak muncul di media massa Indonesia adalah *polling* pendapat umum. Pada awalnya, *polling* di negara-negara Barat dilaksanakan oleh lembaga khusus sehingga media massa mula-mula “memesan” *poll* pada mereka. Kemudian banyak media massa yang tidak percaya pada pelaksanaan *poll* karena mereka menganggap pelaksanaan *poll* sering dimanipulasi. Akibatnya, media massa kini melaksanakan sendiri *polling* ini. Pada dasarnya, tujuan *polling* adalah untuk memantau dan menjajaki sikap masyarakat tentang suatu masalah tertentu (Hutabarat dan Pudjomartono dalam Siregar dan Suarjana, 1995: 32).

Dalam penelitian ini dipilih artikel opini tajuk rencana. Berdasarkan uraian tentang jenis-jenis artikel opini, dapat disimpulkan tiga hal tentang pengertian tajuk rencana, yaitu (1) artikel opini makroanalitis yang membahas suatu peristiwa lepas maupun realitas sosial yang sudah menjadi sistem, yang terikat aktualitas, (2) artikel opini berbobot interpretasi yang menggunakan alat analisis proposisi yang menawarkan jalan keluar, jawaban, atau pemecahan suatu permasalahan, dan (3) artikel opini yang merupakan suara lembaga tanpa nama penulis. Naina (dalam Flournoy 1989: 128-129) memberikan pengertian tentang tajuk rencana yaitu bahan tajuk yang ditandatangani atau tidak, yang dimuat secara tetap di tempat yang sama dan biasanya di bagian tajuk rencana dari satu terbitan ke terbitan berikutnya.

Berdasarkan uraian tentang artikel opini, dapat diketahui bahwa tajuk rencana merupakan artikel opini. Selain itu, tajuk rencana juga dapat disebut sebagai wacana. Alasannya didasarkan pada pendapat Kridalaksana (1993: 231) tentang pengertian wacana berikut ini. Wacana (*discourse*) adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap.

Sesuai dengan pengertiannya, artikel opini adalah tulisan dalam media cetak. Tulisan tersebut berupa kata, kalimat, dan paragraf yang

membawa amanat yang lengkap yang membentuk karangan yang utuh. Karena membentuk karangan yang utuh, tulisan tersebut dapat disebut sebagai satuan bahasa terlengkap dan dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Dengan demikian, tulisan tersebut (artikel opini) juga merupakan wacana. Oleh karena itu, artikel opini tajuk rencana yang dipilih dalam penelitian ini juga dapat disebut sebagai wacana tajuk rencana.

Dalam penelitian ini dipilih wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*. Pemilihan wacana *Tajuk Rencana* sebagai objek penelitian ini didasarkan pada empat alasan. Pertama, belum ada peneliti yang membahasnya secara rinci, terutama dari segi struktural dan ragam bahasanya. Kedua, wacana *Tajuk Rencana* tidak sekadar mengemukakan fakta seperti pada umumnya berita-berita yang mendominasi halaman-halaman surat kabar, tetapi juga menganalisis fakta sehingga layak diketahui oleh pembaca. Ketiga, wacana *Tajuk Rencana* yang dipilih diterbitkan oleh harian *Kompas*; *Kompas* merupakan surat kabar harian tingkat nasional yang terbit di Jakarta tetapi dapat ditemukan dengan mudah di kota-kota besar maupun kecil di Indonesia. Keempat, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMU menurut Kurikulum 1994, terdapat pembelajaran tajuk rencana dan ragam bahasa. Pembelajaran tajuk rencana terdapat pada butir pembelajaran kelas II caturwulan ketiga Kurikulum 1994 sebagai berikut: “Membaca tajuk rencana surat kabar untuk mengetahui maksud, tujuan, atau pandangan redaksi dan

menanggapinya (GBPP, 1994: 12)”. Pembelajaran ragam bahasa terdapat pada butir pembelajaran kelas I caturwulan kedua Kurikulum 1994 sebagai berikut: “Menemukan dan membedakan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan serta ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi (GBPP, 1994: 8)”.

Wacana *Tajuk Rencana* yang dianalisis dalam penelitian ini adalah wacana yang terdapat pada harian *Kompas* yang diterbitkan setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional, yaitu edisi Desember 1999. Edisi tersebut dipilih karena alasan berikut ini. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2000 sehingga objek penelitian yang sudah tersedia dan mudah diperoleh adalah objek penelitian tahun sebelumnya, yaitu tahun 1999. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudaryanto (1988b: 19-20) bahwa sampel atau wacana yang representatif sebagai objek penelitian adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada, yaitu bentuk bahasa yang telah terbukti digunakan orang seperti tertulis di media massa. Selain itu, Desember merupakan bulan terakhir tahun 1999 yang mempunyai keberagaman isi wacana *Tajuk Rencana* karena pada bulan Desember 1999 terdapat fakta-fakta menarik, misalnya (1) hari ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka diperingati secara terbuka pada tanggal 4 Desember, (2) umat Islam memasuki bulan Ramadhan pada tanggal 9 Desember, (3) adanya tanggapan masyarakat dan redaksi surat kabar terhadap kemerdekaan pers, (4) umat Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, (5) adanya budaya “mudik” menjelang perayaan Natal, Tahun

Baru, dan Idul Fitri, dan (6) penilaian terhadap seratus hari pemerintahan Gus Dur-Megawati.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, dapat dirumuskan dua masalah penelitian sebagai berikut.

1.2.1 Bagaimanakah struktur wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*?

1.2.2 Berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik, bagaimanakah penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran penulisan (ejaan), tataran kosa kata dan morfologi, dan tataran sintaktis dalam wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, ada dua tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Kedua tujuan penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut.

1.3.1 Mendeskripsikan struktur wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*.

1.3.2 Mendeskripsikan penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran penulisan (ejaan), tataran kosa kata dan morfologi, dan tataran sintaktis dalam wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*, berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Kedua manfaat penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut.

1.4.1 Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan analisis wacana, khususnya analisis struktur wacana dan analisis ragam bahasa jurnalistik. Bagi analisis struktur wacana, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang struktur wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*. Bagi analisis ragam bahasa jurnalistik, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran penulisan (ejaan), tataran kosa kata dan morfologi, dan tataran sintaktis dalam wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*, berdasarkan ciri-ciri linguistis ragam bahasa jurnalistik.

1.4.2 Penelitian ini dapat membantu para guru dan mahasiswa PBSID sebagai calon guru dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam mengajarkan struktur wacana *Tajuk Rencana* dan penggunaan ragam bahasa jurnalistik dalam wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*.

1.5 Rumusan Variabel dan Batasan Istilah Penelitian

Variabel yang diteliti yaitu unsur verbal yang berupa satuan-satuan lingual yang terdapat pada wacana *Tajuk Rencana*. Unsur-unsur verbal yang diteliti meliputi kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana.

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut.

Analisis bahasa : istilah umum untuk pelbagai kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik bahasa dalam menggarap data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau dari pengumpulan teks (Kridalaksana, 1993: 10).

Edisi : keluaran (buku, surat kabar, majalah, kamus, dan sebagainya yang diterbitkan) dari macam yang sama dan dalam waktu yang sama pula (Moeliono, 1990: 218).

Kolom : bagian khusus dalam surat kabar atau majalah (Moeliono, 1990: 45).

Redaksi : badan (pada persuratkabaran dan sebagainya) yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar dan sebagainya (Moeliono, 1990: 734).

Satuan lingual (satuan gramatik) : satuan dalam unsur bahasa; yang utama ialah morfem, kata, frase, klausa, kalimat, kelompok kalimat, paragraf, dan wacana (Kridalaksana, 1993: 191).

Struktur : organisasi pelbagai unsur bahasa yang masing-masing merupakan pola bermakna (Kridalaksana, 1993: 203).

Tajuk rencana : karangan pokok dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya (Moeliono, 1990: 886).

Wacana (discourse): satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Kridalaksana, 1993: 231).

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dianalisis wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*. Wacana *Tajuk Rencana* yang dianalisis dalam penelitian ini adalah wacana yang diterbitkan oleh harian *Kompas* edisi Desember 1999. Wacana tersebut dapat ditemukan di halaman 4 dan khusus hari Minggu dan hari libur nasional wacana tersebut tidak diterbitkan.

Pembahasan wacana *Tajuk Rencana* dalam penelitian ini dibatasi dari segi struktural dan ragam bahasa. Pembahasan dari segi struktural meliputi struktur wacana. Pembahasan dari segi ragam bahasa meliputi penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran penulisan (ejaan), tataran kosa kata dan morfologi, dan tataran sintaktis dalam wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*, berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik. Pembahasan dari segi ragam bahasa jurnalistik pada tataran sintaktis dibatasi penggunaan ragam bahasa jurnalistik berdasarkan ciri kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat dan penggunaan kata fungsi. Alasan pembatasan penelitian

pada tataran tersebut akan dikemukakan pada Bab III Subbab Metode Analisis Data.

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dideskripsikan berikut ini. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan variabel dan batasan istilah penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penyajian. Bab II Landasan Teori berisi tinjauan pustaka, yaitu tinjauan terhadap topik sejenis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan landasan teori, yaitu teori yang digunakan sebagai landasan analisis yang terdiri atas pengertian wacana, paragraf, dan kalimat, jenis wacana, struktur wacana, serta pengertian dan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik. Bab III Metode Penelitian berisi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, serta prosedur penelitian yang terdiri atas metode penyediaan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan wacana *Tajuk Rencana* secara struktural dan ragam bahasa berisi hasil analisis struktur wacana dan penggunaan ragam bahasa jurnalistik dalam wacana *Tajuk Rencana*. Bab V Penutup berisi kesimpulan hasil penelitian, implikasi hasil penelitian bagi pembelajaran bahasa di SMU, dan saran. Bagian Daftar Pustaka berisi daftar buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian Lampiran berisi data-data tertulis penelitian ini, yaitu wacana *Tajuk Rencana*. Bagian terakhir adalah Daftar Riwayat Hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka berisi tinjauan terhadap topik-topik sejenis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Landasan teori berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini yang terdiri atas teori tentang wacana, paragraf, dan kalimat, jenis wacana, struktur wacana, serta pengertian dan ciri-ciri linguistis ragam bahasa jurnalistik. Berikut ini diuraikan tinjauan pustaka dan landasan teori tersebut.

2.1 Tinjauan Pustaka

Empat peneliti bahasa telah membahas masalah tajuk rencana dari berbagai segi. Para peneliti bahasa tersebut yaitu (1) Naina (dalam Flournoy, 1989: 120-150), (2) Razak (dalam Flournoy, 1989: 151-181), (3) Harjanti (skripsi, 1995), dan (4) Wahyudi (skripsi, 1997).

Naina mengambil sampel *Tajuk Rencana* Harian *Berita Yudha*, *Kompas*, *Merdeka*, *Sinar Harapan*, dan *Suara Karya* yang terbit tahun 1980. Naina, dalam studi kasusnya dari segi isi tajuk rencana, menguji tiga hipotesis, yaitu (1) soal-soal politik dan pemerintahan diberi tekanan lebih banyak daripada soal-soal perekonomian di dalam isi tajuk rencana pers Indonesia, (2) tajuk-tajuk rencana tersebut tidak mengkritik kebijaksanaan pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah, dan (3) karena ada dua kelompok surat kabar, yaitu kelompok non-pemerintah (diwakili

oleh *Kompas*, *Merdeka*, dan *Sinar Harapan*) dan kelompok pemerintah (diwakili oleh *Berita Yudha* dan *Suara Karya*), tiap-tiap surat kabar dalam tiap-tiap kelompok menyediakan ruang tajuknya untuk masalah-masalah yang berlainan.

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh Naina meliputi empat hal. Pertama, surat-surat kabar Indonesia di bagian tajuk rencananya cenderung untuk membahas topik-topik ekonomi secara lebih mendalam daripada topik-topik tentang politik dan pemerintahan. Ekonomi, politik, dan pemerintahan merupakan hal-hal yang paling digemari untuk komentar tajuk pada kelima surat kabar yang diteliti. Temuan ini menyangkal hipotesis pertama. Kedua, persuratkabaran Indonesia menggunakan lebih banyak tajuk rencana jenis informatif daripada jenis argumentatif. Akan tetapi, cara pendekatan jenis argumentatif lebih sering dipakai daripada pendekatan “Afghanistanisme” (pendekatan “Afghanistanisme” adalah cara yang digunakan oleh penulis tajuk rencana untuk menulis tajuk rencana tentang masalah-masalah luar negeri, dan penulis tajuk rencana cenderung untuk menghindari menulis tajuk rencana tentang masalah-masalah dalam negeri).

Ketiga, surat-surat kabar Indonesia kecuali *Merdeka*, tidak suka mengkritik perilaku dan prestasi kerja pemerintah secara langsung. Hasil studi kedua dan ketiga ini mendukung hipotesis kedua bahwa tajuk rencana Indonesia lebih bersifat informatif dalam hal isi dan cenderung untuk bersikap netral daripada memberikan komentar yang tidak

menyenangkan. Dalam pengulasan prestasi kerja pemerintah, *Merdeka* sangat sengit dan kadang-kadang keras. *Kompas* menggunakan bahasa yang lebih lunak dalam mengkritik dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah. *Sinar Harapan* lebih pandai dalam pemilihan bahasa untuk tajuk rencananya. *Berita Yudha* dan *Suara Karya* tidak banyak memberikan komentar yang tidak menyenangkan. *Berita Yudha* sangat sedikit memberikan kritik kepada pemerintah.

Keempat, ada dua kelompok di antara lima surat kabar Indonesia tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dua kelompok tersebut tidak seperti kelompok yang dihipotesiskan. *Berita Yudha*, *Merdeka*, dan *Sinar Harapan* menyediakan ruang tajuknya untuk masalah-masalah ekonomi, politik dan pemerintahan dan memberikan perhatian yang lebih sedikit pada masalah-masalah perang, pertahanan dan diplomasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pendidikan dan seni klasik. Kelompok lain, *Kompas* dan *Suara Karya* menempatkan masalah ekonomi pada urutan nomor satu dan menempatkan masalah politik dan pemerintahan pada urutan nomor dua, sedangkan kedua surat kabar ini seragam dalam penempatan "Afghanistanisme". Kedua surat kabar ini tidak membuat tajuk rencana tentang perang, pertahanan dan diplomasi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, atau pendidikan dan seni klasik. Temuan ini mendukung hipotesis ketiga.

Razak mengambil sampel surat-surat kabar non-pemerintah, yaitu *Kompas* dan *Sinar Harapan*, dan surat-surat kabar yang diprakarsai oleh

pemerintah, yaitu *Berita Yudha* dan *Suara Karya* edisi 1 Maret sampai 31 Maret 1983. Alasan pemilihan edisi tersebut karena Presiden Soeharto mengakhiri masa jabatannya yang kedua (1977-1983) dan Presiden dipilih kembali untuk masa jabatan ketiga (1983-1988). Razak, dalam studi kasusnya dari segi kebebasan pers dalam isi tajuk rencana menguji dua hipotesis. Pertama, *Kompas* dan *Sinar Harapan* sebagai surat-surat kabar non-pemerintah, akan memuat lebih banyak komentar yang bersifat argumentatif daripada yang bersifat informatif, akan memberikan lebih banyak pernyataan yang tidak menyenangkan daripada yang menyenangkan, dan memberikan lebih banyak cercaan daripada pujian dalam membahas masalah-masalah pemerintahan. Kedua, surat-surat kabar pemerintah, *Berita Yudha* dan *Suara Karya*, akan cenderung memberikan komentar yang lebih bersifat informatif daripada argumentatif dan lebih memuji daripada mencela dalam tajuk-tajuk rencananya tentang masalah-masalah pemerintahan.

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh Razak dikemukakan berikut ini. Studi yang dilakukan Razak gagal untuk menegaskan prediksi dalam hipotesis. *Kompas*, dibandingkan, *Sinar Harapan*, cenderung untuk menekankan cara pendekatan yang bersifat informatif, menyenangkan, dan pujian dalam tajuk rencananya. *Sinar Harapan* lebih cenderung untuk memuat komentar-komentar yang bersifat tidak menyenangkan dan celaan. *Berita Yudha* dan *Suara Karya* membuat tajuk rencana yang tidak sesuai dengan nama yang disandangnya sebagai media pemerintah. Kedua

surat kabar ini juga dapat membuat komentar-komentar yang bersifat argumentatif, tidak menyenangkan, dan celaan.

Kritik tajuk rencana dalam pers Indonesia cenderung untuk secara berhati-hati memilih kata-kata dalam menyediakan forum bagi pandangan-pandangan yang bertentangan. Hasil analisis yang dilakukan Razak menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk menutupi komentar-komentar dengan kalimat-kalimat tidak langsung dan penggunaan argumen-argumen yang wajar yang ditujukan pada golongan atas, pembuat keputusan, dan pembentuk pendapat. Komentar-komentar yang terdapat pada tajuk rencana cenderung untuk membahas permasalahan yang dipilih daripada orang-orang yang harus bertanggung jawab terhadap adanya permasalahan tersebut. Pers Indonesia jarang memberikan komentar kotor langsung kepada para pemimpin nasional dan menghindari identifikasi mereka yang dikritiknya, yaitu tanpa menyebut nama dan kedudukannya.

Harjanti mengambil sampel artikel *Tajuk Rencana* pada Harian *Kedaulatan Rakyat* dan *Bernas* edisi 16 Februari 1993 sampai 27 April 1993. Harjanti mendeskripsikan ketidakbakuan struktur kata dan frekuensinya, ketidakbakuan struktur kalimat dan frekuensinya, serta ketidakbakuan kata tugas dan frekuensinya.

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh Harjanti dikemukakan berikut ini. Dalam ketidakbakuan struktur kata ditemukan penggunaan afiks yang tidak lengkap yang menduduki frekuensi tertinggi sebesar 85, 29%,

ketidakkakuan morfofonemik, dan penggunaan afiks rancu yang menduduki frekuensi terendah sebesar 1,47%. Dalam ketidakkakuan struktur kalimat ditemukan penggunaan fungsi gramatikal yang tidak lengkap yang menduduki frekuensi tertinggi sebesar 89,16%, penggunaan konstruksi non-sintetis yang menduduki frekuensi terendah sebesar 1,30%, penggunaan fungsi gramatikal rancu, dan penggunaan fungsi gramatikal yang berlebihan. Dalam ketidakkakuan kata tugas ditemukan penghilangan konjungsi yang menduduki frekuensi tertinggi sebesar 45,18%, penggunaan konjungsi yang berlebihan yang menduduki frekuensi terendah sebesar 12,65%, penghilangan preposisi, dan penggunaan preposisi yang berlebihan.

Wahyudi mengambil sampel rubrik *Tajuk Harian Republika* edisi No. 85-97, 100-103, dan 105-107, Tahun ke-3. Wahyudi mengkaji ketanbakuan penggunaan fungsi-fungsi gramatikal, ketanbakuan penggunaan konjungsi, ketanbakuan penggunaan pola frase verbal pasif, ketanbakuan penggunaan afiks dalam predikat kalimat aktif, penggunaan unsur daerah dan asing, ada tidaknya pemendekan kata, dan penggunaan partikel yang terdapat pada rubrik *Tajuk Harian Republika*.

Hasil-hasil penelitian yang diperoleh Wahyudi yaitu ditemukannya tujuh jenis ketanbakuan kalimat bahasa Indonesia pada rubrik *Tajuk Harian Republika* dengan jumlah kesalahan ada 340 buah. Ketujuh jenis ketanbakuan tersebut adalah (1) kesalahan penggunaan fungsi gramatikal ada 138 buah, (2) kesalahan penggunaan afiks ada 25 buah, (3) kesalahan penggunaan konjungsi ada 66 buah, (4) penggunaan unsur bahasa daerah dan asing ada 89 buah, (5) pemendekan kata ada 12 buah, (6) kesalahan

penggunaan partikel ada 13 buah, dan (7) kesalahan penggunaan pola frase verbal pasif ada 1 buah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Wacana, Paragraf, dan Kalimat

Kata *wacana* dalam bahasa Indonesia sama pengertiannya dengan kata *discourse* dalam bahasa Inggris. Kata *discourse* berasal dari bahasa Latin, yaitu *discursus* yang berarti ‘kian kemari’. Kata *discursus* itu diturunkan dari *dis-* berarti ‘dari, dalam arah yang berbeda’ dan *curre* berarti ‘lari’. Kemudian kata *discourse* diartikan sebagai (1) komunikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan, percakapan, (2) komunikasi umum, terutama sebagai subjek studi, dan (3) risalat tulis, disertasi formal, kuliah, ceramah, khotbah (Webster, 1983: 522 via Baryadi, 1989: 3).

Wacana (*discourse*) adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Kridalaksana, 1993: 231).

Berikut ini dikemukakan pengertian-pengertian paragraf. Kata paragraf berasal dari kata *paragraphe* (bahasa Prancis Kuno), atau *paragraphus* (bahasa Latin), atau *paragraphos* (bahasa Yunani) yang berasal dari kata dasar *para* yang berarti ‘tepi’ dan *graphos* yang berarti ‘tanda’ sehingga lengkapnya berarti ‘tanda di tepi’. Paragraf merupakan

inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan (Akhadiah, *dkk.* 1988: 143).

Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan (biasanya mengandung satu ide pokok dan dimulai penulisannya dengan baris baru) (Moeliono, 1990: 648). Paragraf adalah (1) satuan bahasa yang mengandung satu tema dan perkembangannya; (2) bagian wacana yang mengungkapkan pikiran atau hal tertentu yang lengkap tetapi yang masih berkaitan dengan isi seluruh wacana; dapat terjadi dari satu kalimat atau sekelompok kalimat yang berkaitan (Kridalaksana, 1993: 154).

Pengertian-pengertian kalimat dikemukakan berikut ini. Kalimat adalah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik (Ramlan, 1986: 25-27). Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks (wacana) yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru; tanda baca tersebut sepadan dengan intonasi selesai, dan disertakan pula berbagai tanda baca yang berupa spasi atau ruang kosong, koma, titik koma, titik dua, dan atau sepasang garis pendek yang

mengapit bentuk tertentu; tanda baca tersebut sepadan dengan jeda (Moeliono, 1997: 254).

Ramlan (1986: 31) menggolongkan kalimat berdasarkan fungsinya menjadi tiga golongan, yaitu (1) kalimat berita, (2) kalimat tanya, dan (3) kalimat suruh. Kalimat berita pada umumnya berfungsi untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain; ia memiliki pola intonasi yang disebut pola intonasi berita yang digambarkan dengan tanda titik (.). Selain itu, dalam kalimat berita tidak terdapat kata-kata tanya seperti *apa*, *siapa*, *di mana*, *mengapa*, kata-kata ajakan seperti *mari*, *ayo*, kata-kata persilaan seperti *silakan* dan *dipersilakan*, serta kata larangan *jangan* (Ramlan, 1986: 31-33).

Kalimat tanya pada umumnya berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Kalimat ini memiliki pola intonasi yang berbeda dengan pola intonasi kalimat berita. Perbedaannya terutama terletak pada nada akhirnya. Pola intonasi berita bernada akhir turun, sedangkan pola intonasi tanya bernada akhir naik. Pola intonasi tanya digambarkan dengan tanda tanya (?). Kalimat tanya ada yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Karena itu, kalimat tanya seperti itu disebut kalimat tanya ya-tidak, misalnya: *Murid itu masih belajar bukan?; Bukankah murid itu masih belajar?.* Ada juga kalimat tanya yang memerlukan jawaban yang memberi penjelasan. Kalimat tanya golongan ini ditandai oleh adanya kata tanya yang bersifat menggantikan kata atau kata-kata yang ditanyakan. Kata-kata tanya itu ialah *apa*, *siapa*, *mengapa*, *bagaimana*, *mana*, *bilamana*, *kapan*, *bila*, dan

berapa. Contoh-contoh kalimatnya: Apa yang sedang direncanakan arsitek itu?; Mengapa banyak mahasiswa tidak mengikuti kuliah hari ini? (Ramlan, 1986: 33-42).

Kalimat suruh berfungsi mengharapkan tanggapan yang berupa tindakan dari orang yang diajak berbicara. Kalimat suruh ditandai oleh pola intonasi suruh yang digambarkan dengan tanda seru (!). Berdasarkan strukturnya, kalimat suruh dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu (1) kalimat suruh yang sebenarnya, (2) kalimat persilaan, (3) kalimat ajakan, dan (4) kalimat larangan. Kalimat suruh yang sebenarnya ditandai oleh pola intonasi suruh. Untuk menghaluskan perintah, pada kata verbal dapat ditambahkan partikel *lah* dan kata *tolong*, misalnya: *Ambillah buku itu!; Tolong tuliskan surat!*. Kalimat persilaan selain ditandai oleh pola intonasi suruh, juga ditandai oleh penambahan kata *silakan* atau *dipersilakan* yang diletakkan di awal kalimat, misalnya: *Silakan Bapak duduk di sini!* (Ramlan, 1986: 42 - 45).

Sama halnya dengan kalimat persilaan dan kalimat suruh yang sebenarnya, kalimat ajakan juga berfungsi mengharapkan suatu tanggapan yang berupa tindakan. Perbedaannya, tindakan yang diharapkan bukan hanya dilakukan oleh orang yang diajak berbicara, melainkan juga oleh orang yang berbicara atau penuturnya, dan penulis. Dengan kata lain, tindakan itu dilakukan oleh kita. Selain ditandai oleh pola intonasi suruh, kalimat ajakan juga ditandai oleh adanya kata-kata ajakan, ialah kata *mari* dan *ayo* yang diletakkan di awal kalimat. Partikel *lah* dapat ditambahkan

pada kedua kata itu sehingga menjadi *marilah* dan *ayolah* dan subjek kalimat boleh dihilangkan, boleh juga tidak, misalnya: *Mari kita belajar ke perpustakaan!*; *Ayolah duduk di depan!*. Kalimat larangan selain ditandai oleh pola intonasi suruh, juga ditandai oleh kata *jangan* pada awal kalimat. Partikel *lah* dapat ditambahkan pada kata tersebut untuk memperhalus larangan, misalnya: *Jangan engkau membaca buku itu!*; *Janganlah membaca buku itu!* (Ramlan, 1986: 45-46).

2.2.2 Jenis Wacana

Tarigan (1987: 52) membedakan jenis-jenis wacana berdasarkan media dan langsung tidaknya pengungkapan. Tarigan (1987: 52) mengemukakan dua jenis wacana berdasarkan media yang digunakan untuk mewujudkannya, yaitu wacana tulis dan wacana lisan.

Wacana tulis (*written discourse*) adalah wacana yang diwujudkan dalam bahasa tulis. Untuk menerima, memahami, dan menangkap isinya, si penerima harus membacanya. Wacana ini sering pula dikaitkan dengan wacana non-interaktif (*non-interactive discourse*) karena wacana ini tidak dapat langsung ditanggapi oleh komunikan. Wacana ini dihasilkan oleh proses komunikasi verbal yang sifatnya searah. Contoh wacana tulis yaitu wacana yang terdapat pada surat kabar, majalah, atau buku (Tarigan, 1987: 52).

Wacana lisan (*spoken discourse*) adalah wacana yang diwujudkan dalam bahasa lisan. Untuk menerima, memahami, dan menikmati jenis wacana ini, si penerima harus menyimak atau mendengarkannya. Wacana

lisan ini sering pula dikaitkan dengan wacana interaktif (*interactive discourse*) karena dihasilkan dari proses interaksi atau hubungan komunikatif secara verbal antarpartisipan komunikasi. Contoh wacana lisan yaitu sastra lisan, siaran-siaran televisi, radio, khotbah, ceramah, pidato, kuliah, dan deklamasi, atau rekaman-rekaman dalam kaset (Tarigan, 1987: 55).

Berdasarkan langsung tidaknya pengungkapan dibedakan wacana langsung dan wacana tidak langsung. Wacana langsung (*direct discourse*) adalah wacana yang berupa kutipan yang dibatasi oleh intonasi atau penguasi. Wacana tidak langsung (*indirect discourse*) adalah pengungkapan kembali wacana tanpa mengutip harafiah kata-kata yang dipakai oleh pembicara dengan mempergunakan konstruksi gramatikal atau kata tertentu antara lain dengan klausa subordinatif, kata *bahwa*, dan sebagainya (Kridalaksana, 1984: 231 *via* Tarigan, 1987: 55-56).

Dalam penelitian ini, jenis wacana yang relevan berdasarkan media yang digunakan untuk mewujudkannya adalah wacana tulis. Berdasarkan langsung tidaknya pengungkapan, jenis wacana yang relevan adalah wacana tidak langsung sebab pembicara tidak secara langsung menyampaikannya, melainkan secara tertulis. Dengan demikian, jenis wacana yang relevan dalam penelitian ini adalah wacana tulis dan wacana tidak langsung.

2.2.3 Struktur Wacana

Wacana menurut Hartman dan Stork (1976: 69 *via* Baryadi, 1989:

1) disebut sebaga “tuturan yang beruntun”. Selaras dengan tahap berlangsungnya komunikasi, wacana memiliki bagian-bagian yang sesuai dengan struktur retorisnya, yaitu ... bagian awal (*exordium*), bagian tubuh wacana (*informatio*), dan bagian penutupan wacana (*peroratio*).

Longacre (1979: 115-116 *via* Subagyo, Tanpa Tahun) berasumsi bahwa wacana mempunyai struktur gramatikal seperti tataran-tataran kebahasaan lain di bawahnya. Tentang cara memerikan struktur wacana, diusulkan dilakukan penentuan slot-slot fungsional (*functional slots*) dari seperangkat butir kebahasaan pengisi slot tersebut. Subagyo (Tanpa Tahun) berpendapat bahwa wacana yang lengkap terdiri atas tiga bagian (slot), yaitu pembuka, isi, dan penutup.

Brown dan Yule (dalam Soetikno, 1996: 6-7) berpendapat tentang teks tertulis berikut ini.

... Sebuah teks mungkin disajikan secara berbeda pada edisi-edisi yang berbeda pula, dengan bentuk huruf yang berbeda, pada ukuran kertas yang berbeda, dalam satu atau dua kolom, dan dari satu edisi ke edisi berikutnya kita masih menganggap bahwa sajian yang berbeda-beda itu merealisasikan ‘teks’ yang sama. Pentinglah untuk diperhatikan apa tepatnya yang ‘sama’ itu. Paling sedikit, kata-katanya mestilah kata-kata yang sama, disajikan dengan urutan yang sama.

... Bilamana teks yang asli menggunakan beraneka macam tipografi, teks yang direproduksi dengan satu bentuk huruf mungkin akan kehilangan sedikit (dari) kualitas teks aslinya. Contoh yang jelas adalah teks dalam surat kabar yang menggunakan beberapa macam bentuk huruf yang berbeda, ukuran huruf yang berbeda, dan bentuk tata letak tertentu.

2.2.4 Pengertian dan Ciri-ciri Linguistik Ragam Bahasa Jurnalistik

Pengertian-pengertian ragam bahasa jurnalistik dikemukakan berikut ini. Ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh para wartawan dalam menulis berita dalam surat kabar yang mempunyai sifat umum ringkas-padat-jelas, yang ditujukan kepada umum sehingga harus mudah, cepat dipahami, dan dimengerti dalam sekali baca (Poerwadarminta, 1967: 17).

Bahasa pers atau bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh wartawan yang mempunyai sifat-sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Akan tetapi, bahasa jurnalistik harus didasarkan pada bahasa baku dan tidak dapat mengangap sepi kaidah-kaidah tata bahasa. Bahasa jurnalistik juga harus memperhatikan ejaan yang benar (Anwar, 1991: 1).

Ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh kalangan pers yang mempunyai sifat praktis, efisien, dan efektif bagi pembaca umum (Siregar, 1987: 119). Ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang dialami, diketahui, dan dipikirkan oleh sebagian besar orang. Hal-hal itu berupa fakta (berita), pendapat (opini), dan pemberitahuan. Sifat umum ragam ini adalah penggunaan unsur-unsur bahasa seefektif-efektifnya, mengingat keterbatasan ruang dan waktu (Soewandi dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 345-346).

Ciri-ciri linguistis ragam bahasa jurnalistik dikemukakan berikut ini. Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 348-360) menguraikan tiga ciri linguistis ragam bahasa jurnalistik, yaitu (1) pada tataran penulisan (ejaan), (2) pada tataran kosa kata dan morfologi, dan (3) pada tataran sintaktis. Dalam penelitian ini, teori tentang campur kode (Nababan, 1991: 32), dan morfologi dalam ragam bahasa jurnalistik menurut Hoed (dalam Halim dan Lumintintang, 1983: 362-363) dan Anwar (1991: 85-86) dimasukkan dalam ciri-ciri linguistis ragam bahasa jurnalistik yang kedua. Teori tentang kalimat yang terdapat pada surat kabar dan majalah menurut Anwar (1991: 96) dimasukkan dalam ciri-ciri linguistis ragam bahasa jurnalistik yang ketiga. Berikut ini diuraikan ketiga ciri tersebut.

2.2.4.1 Pada Tataran Penulisan (Ejaan)

Meskipun di sana-sini masih terdapat kesalahan penulisan kata dan kalimat, boleh dikatakan bahwa pada tataran penulisan ini ragam bahasa jurnalistik sangat memperhatikan kaidah yang berlaku. Adanya kekurangtepatan penulisan bukan merupakan ciri ragam bahasa jurnalistik, melainkan semata-mata berasal dari kekurangpahaman penulis atau pembawa beritanya Di *Kompas* (19 April 1995) terdapat penulisan judul berita: Arwana Irian tidak Boleh Diperdagangkan (Soewandi dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 348-349).

Kesalahan penulisan tersebut mungkin juga disebabkan oleh karena kesengajaan yang dilakukan oleh pimpinan majalah atau surat kabar

sebagai salah satu kebijaksanaan dalam penulisan, atau mungkin juga karena kendala ruang. Kesalahan yang disebabkan oleh karena kendala ruang atau keterbatasan ruang mengakibatkan pemilihan ketentuan penulisan yang lebih ekonomis (Soewandi dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 349-350).

Contoh-contoh pemilihan ketentuan penulisan yang lebih ekonomis dikemukakan berikut ini. Pada wacana *Tajuk Rencana* dijumpai penulisan: Selama tiga hari mulai Rabu (1/12)... (*Kompas*, 3 Desember 1999), *alih-alih* Selama tiga hari mulai Rabu (1 Desember 1999 atau 1-12-1999)...; ... Presiden RI KH Abdurrahman Wahid... (*Kompas*, 3 Desember 1999), *alih-alih* ...Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid...; dan ...Gus Dur sudah mengunjungi 13 negara... (*Kompas*, 3 Desember 1999), *alih-alih* ... Gus Dur sudah mengunjungi *tiga belas* negara....

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 349-350) juga berpendapat bahwa ada penyimpangan dari ketentuan penulisan, akan tetapi dengan maksud untuk menarik perhatian atau mengurangi kekaburan pemahaman. Penyimpangan ini terjadi pada penulisan unsur-unsur kalimat yang inversif; pada umumnya ditemukan pada judul berita, misalnya penulisan judul berikut: “Antisosial, Kebanyakan Film TV untuk Anak” (*Kompas*, 19 April 1995).

2.2.4.2 Pada Tataran Kosa Kata dan Morfologi

Berikut ini dikemukakan teori tentang campur kode. Ada suatu keadaan berbahasa tertentu ialah bilamana orang mencampur dua (atau

lebih) bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa (*speech act* atau *discourse*) tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa itu. Dalam keadaan demikian, hanya kesantiaian penutur dan/atau kebiasaannya yang dituruti. Tindak bahasa yang demikian kita sebut campur kode. Di Indonesia, campur kode ini sering sekali terdapat dalam keadaan orang berbincang-bincang; yang dicampur ialah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jikalau yang berbincang-bincang itu orang-orang yang “terpelajar”, kita dapat juga melihat campur kode antara bahasa Indonesia (atau bahasa daerah) dengan bahasa asing (Inggris atau Belanda) (Nababan, 1991: 32).

Nababan (1991: 32) juga berpendapat bahwa ciri yang menonjol dalam campur kode ini ialah kesantiaian atau situasi informal. Dalam situasi berbahasa yang formal, jarang terdapat campur kode. Kalau terdapat campur kode dalam keadaan demikian, itu disebabkan karena tidak ada ungkapan yang tepat dalam bahasa yang sedang dipakai itu sehingga perlu memakai kata atau ungkapan dari bahasa asing; dalam bahasa tulisan, hal ini kita nyatakan dengan mencetak miring atau menggarisbawahi kata/ungkapan bahasa asing yang bersangkutan. Kadang-kadang terdapat juga campur kode ini bila pembicara ingin memamerkan “keterpelajarannya” atau “kedudukannya”.

Hoed (dalam Halim dan Lumintintang, 1983: 362-363) berpendapat bahwa tentang morfologi dalam ragam bahasa jurnalistik, hal yang menonjol dalam morfologi bahasa berita ialah pemenggalan awalan *me-*

yang ternyata masih tetap tinggi frekuensinya meskipun tidak selalu dilakukan. Berdasarkan penelitiannya, pemenggalan awalan *me-* lebih sering terjadi pada judul berita daripada tubuh berita. Pemenggalan awalan *me-* sering dianggap sebagai penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar. Akan tetapi, pemenggalan awalan *me-* pada judul sebagai cara untuk menonjolkan tindakan atau peristiwa yang dinyatakan oleh kata kerjanya. Dengan demikian, mau tidak mau dapat disimpulkan bahwa gejala ini merupakan salah satu ciri ragam bahasa berita.

Anwar (1991: 85-86) berpendapat bahwa berkaitan dengan morfologi dalam ragam bahasa jurnalistik, kepala berita atau *headline* kadang-kadang mempunyai bahasanya sendiri. Di antaranya ialah kebiasaan menghilangkan bentuk awalan, kata imbuhan, atau *prefiks*.

Contoh:

Kepala berita yang berbunyi:

“Cina serang tapal batas India”

lebih sering kita baca daripada:

“Cina menyerang tapal batas India”

Menghilangkan kata awalan *me-* dalam contoh kepala berita di atas tidak berdasarkan pada pertimbangan ekonomi kata, akan tetapi semata-mata karena hendak membuat berita menjadi lebih hidup.

Anwar (1991: 86-87) lebih lanjut berpendapat bahwa dalam hal penulisan kepala berita dalam bidang jurnalistik menggunakan kata-kata sederhana, menggunakan kata kerja, dan kata kerja itu dalam bentuk aktif,

bukan pasif. Penghilangan awalan yang dilakukan pada bahasa kepala berita dapat diterima. Akan tetapi, pemakaiannya jangan sampai dipukulratakan sehingga sampai meluas ke dalam tubuh berita, dan dalam tubuh berita wartawan harus tetap mengindahkan kaidah-kaidah tata bahasa yang berlaku.

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 350-353) menguraikan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik pada tataran kosa kata dan morfologi sebagai berikut. Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 350) membedakan kosa kata menjadi dua: penuh dan fungsional. Kata penuh memiliki arti leksikal sendiri, sebaliknya kata fungsional tidak: ia menghubungkan kata penuh yang satu dan kata penuh yang lain. Kata penuh terdiri atas nomina, pronomina, ajektiva, verba, adverbialia, numeralia, artikel, dan interjeksi.

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 351) berpendapat bahwa baik kata penuh maupun kata fungsional dibedakan menjadi kata sehari-hari, kata teknis (istilah), dan kata susastra. Kata fungsi terdiri atas preposisi dan konjungsi. Ada preposisi yang menunjuk tempat (*di, ke, dari*), menyatakan perbandingan (*daripada*), alat (*dengan*), sebab (*karena* laparnya), dan ada preposisi yang menghubungkan dua verba (dipanggil *untuk* menghadap). Konjungsi mencakup hubungan kesetaraan (*dan, tetapi, lalu, kemudian*) dan ketergantungan (*jika, bahwa, supaya, agar, karena*).

Baik kata penuh maupun kata fungsional dibedakan lagi menjadi kata-kata yang ditulis secara utuh dan kata-kata yang ditulis secara tidak utuh. Morfologi adalah ilmu bentukan kata yang mencakup bentukan kata dengan imbuhan, pengulangan, dan dengan penggabungan. Dalam pemakaiannya bentukan kata ini pun dibedakan menjadi dua: pemakaian secara utuh dan secara tidak utuh (Soewandi dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 351).

Berdasarkan penjelasan morfologis seperti itu, maka Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 351-353) menguraikan ciri-ciri kosa kata dan pembentukan kata ragam bahasa jurnalistik sebagai berikut.

- (1) Artikel dan interjeksi sangat dihemat 'di dalam pemakaian. *Alih-alih* Ia *seorang* pembunuh berdarah dingin, *akan dipilih* Ia pembunuh berdarah dingin.
- (2) Dalam bahasa yang lengkap muncul konstruksi kalimat dengan kata bantu kata kerja (*adalah, menjadi, merupakan*), kata bantu bilangan penunjuk satuan (*sekuntum, seekor, sebatang, seutas, dsb.*). Pemakaian kata bantu ini sangat dihematkan dalam ragam bahasa jurnalistik. *Alih-alih konstruksi: Ia adalah* seorang pematung; Ia *menjadi* bosan dengan pekerjaan rutin; Perampok itu membawa *seutas* tali, *akan dipilih konstruksi: Ia pematung; Ia bosan* dengan pekerjaan rutin; Perampok itu membawa tali.
- (3) Preposisi penghubung kata kerja dirasakan berlebihan dalam ragam jurnalistik. Oleh karena itu, dihindarkan pemakaiannya. *Alih-alih* PDI Sleman Rencanakan *untuk* Memecat Her Purwanto, *dipilih* PDI Sleman Rencanakan Pecat Her Purwanto (*Kedaulatan Rakyat*, 18 Mei 1995).
- (4) Sepanjang tidak menimbulkan salah tafsir, pemakaian konjungsi ketergantungan pun sangat dihemat, termasuk konjungsi yang mendapat pengaruh dari bahasa asing (*di mana, untuk mana, yang mana, kepada siapa, dsb.*). *Alih-alih* Presiden Soeharto hari Selasa (9/5) menyatakan *bahwa* keputusan pengadilan – yang mengabulkan gugatan Pemimpin Redaksi Majalah Berita Tempo Goenawan Muhammad – harus dihormati, *dipilih* Presiden

Soeharto hari Selasa (9/5) menyatakan keputusan pengadilan – yang mengabulkan gugatan Pemimpin Redaksi Majalah Berita Tempo Goenawan Muhammad – harus dihormati (*Kompas*, 11 Mei 1995).

- (5) Kata-kata teknis yang sukar dipahami sangat dihematkan, dan kata atau ungkapan yang sudah basi, atau pun mubazir dihindarkan supaya pemberitaan tetap menarik. Ungkapan: *antara lain ... dan sebagainya* hampir tidak dijumpai dalam suatu pemberitaan dan penyampaian opini; begitu pula *kata-kata penat* (Anwar, 1991: 60 *via* Soewandi dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 352) ini: *dalam rangka; menurut petunjuk; sementara itu, dalam pada itu; perlu diketahui; dapat ditambahkan; selanjutnya*. Pemilihan pasangan ini – *tetap berkeyakinan* dan *tetap yakin* – cenderung kepada pemilihan *tetap yakin*.
- (6) Karena keberagaman pembaca, maka pemilihan kata jatuh pada kata sehari-hari (kata yang biasa) daripada kata teknis dan susastra. Oleh karena itu, bunga-bunga kata, kata-kata yang muluk-muluk dihindari karena kata seperti itu cenderung mengakibatkan gaya bahasa menjadi lebih berkesan daripada pesan beritanya (Rumhardjono, 1995 *via* Soewandi dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 352). *Alih-alih* Kekuatan ABRI di pos Senayan tampaknya *akan* berkurang hampir satu peleton, *dipilih* Kekuatan ABRI di pos Senayan tampaknya *bakal* berkurang hampir satu peleton (*Gatra*, 6 Mei 1995).
- (7) Pengulangan kata yang sama dan penggunaan kata berulang kedua-duanya enak untuk didengar, tetapi melelahkan untuk dibaca. Oleh karena itu, penggunaan padanan kata, atau penggantinya (kata ganti orang, atau tunjuk) akan lebih menarik.
- (8) Pengungkapan konsep ‘jamak’ dipilih cara yang paling ekonomis, kecuali apabila timbul salah tafsir. Alih-alih *semua pejabat-pejabat*, dipilih *semua pejabat*.
- (9) Khusus di dalam kepala berita (*headline*), terdapat ciri-ciri ini: (a) pemakaian bentuk kata yang tidak lengkap – pada umumnya verba – sering kita jumpai, meskipun di dalam teras berita (*lead*) dan tubuh berita (*body*) kita jumpai pula bentuk kata tidak lengkap, misalnya: *tapi, jika, bila*; (b) penghilangan verba; dan ciri sintaktis adanya (c) pembalikan urutan frase.
Misalnya:
(a) Kasus “Tempo”

Presiden *Benarkan* Langkah Menpen (*Kompas*, 11 Mei 1995)

(b) Direktur Reserse Polri:

Kasus Gus Dur (...) ke Kejaksaan (*Kompas*, 11 Mei 1995)

(c) *Belum* Dikirim Tenaga SLB ke Sendang Biru (*Jawa Pos*, 3 Januari 1993)

2.2.4.3 Pada Tataran Sintaktis

Dalam hal kalimat yang terdapat pada surat kabar dan majalah, Anwar (1991: 96) berpendapat bahwa para wartawan terbiasa untuk menulis anak kalimat yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, anak kalimat yang dimulai dengan kata *sehingga* dan *seterusnya* tidak boleh berdiri sendiri dan harus disatukan dengan induk kalimat.

Contoh:

- (1) Hendaknya ditegaskan kembali mengenai status dan fungsi Badan Musyawarah Desa. *Sehingga* lembaga pengawasan itu berfungsi secara wajar.
- (2) Ruang sidang penuh sesak dan riuh. *Sebab* semua tertuduh hadir disertai seluruh keluarganya.
- (3) Sebab banyak anak yang berhasil menamatkan pendidikannya tetapi sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. *Sehingga* hidup mereka kosong.

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 353) menyebutkan ciri-ciri sintaktis ragam bahasa jurnalistik terutama berkaitan dengan: (1) kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat (jabatan kalimat), (2) pengurutan (tempat) fungsi-fungsi kalimat, (3) jenis kalimat, dan (4) penggunaan kata fungsi. Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 354) berpendapat bahwa dalam hal kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat, di sana-sini

masih terdapat kalimat yang tidak lengkap. Ketidaklengkapan terjadi karena ketidakpahaman penulis akan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat, atau karena kesengajaan, terutama pada judul karangan, atau karena kalimat bersusun-susun.

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 354) berpendapat bahwa judul dapat dibedakan menjadi dua: judul berita dan judul karangan. Boleh dikatakan judul berita menggunakan kalimat yang lengkap fungsi-fungsinya, sedangkan judul karangan (opini) menggunakan frase saja. Contoh judul berita yang menggunakan kalimat yang lengkap fungsi-fungsinya, dan judul karangan yang menggunakan frase dikemukakan berikut ini.

Judul berita: Harga Semen Belum Turun (*Kompas*, 19 April 1995)

Judul karangan: Tentang Pentingnya Dialog Budaya (*Bernas*, 6 Agustus 1994)

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 354-355) memberikan contoh kalimat dalam tubuh berita yang tidak lengkap berikut ini.

- (a) Kekuatan ABRI di pos Senayan tampaknya bakal berkurang hampir satu peleton. (*Pengurangan terjadi*) Dari semula 100 akan tinggal 175 personel (*Gatra*, 6 Mei 1995).
- (b) Namun (*demikian*) ia belum dapat mengatakan sikap MUI terhadap Tapornas. Karena, ia belum bertemu dengan Ketua Umum MUI KH Hasan Basri yang sedang (*berada*) di Surabaya (*Kedaulatan Rakyat*, 20 Mei 1995).

Dalam hal pengurutan atau tempat fungsi-fungsi kalimat terdapat kecenderungan pengurutan berdasarkan fungsi yang lebih ditonjolkan.

Pengurutan fungsi sejalan dengan gaya bicara lisan. Hal ini nampak jelas dalam pemberitaan dan tajuk rencana. Dalam ragam ilmiah kita dapati pengurutan yang baku: Subjek-Predikat-Objek-Keterangan, atau Keterangan-Subjek-Predikat-Objek, dan sangat jarang ditemui pengurutan Subjek-Keterangan-Predikat-Objek. Akan tetapi, dalam ragam jurnalistik banyak kita dapati pengurutan yang beraneka ragam: Subjek-Predikat-Objek-keterangan, atau Subjek-Keterangan-Predikat-Objek, atau Predikat-Subjek-Objek-Keterangan. Fungsi mana yang ditonjolkan bergantung unsur mana yang ingin dikemukakan oleh pemberita atau penulis : *What, Who, When, Where, Why*, atau *How* (Soewandi dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 355).

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 355) memberikan contoh pengurutan atau tempat fungsi-fungsi kalimat yang beraneka ragam berikut ini.

- (a) Menpora Hayono Isman (*S*) secara terbuka (*K*) menyampaikan (*P*) tanggapan balik atas reaksi keras masyarakat terhadap rencana peluncuran Tapornas (*O*) (*Kedaulatan Rakyat*, 20 Mei 1995).
- (b) Presiden (*S*): Tingkatkan Ekspor Habis-habisan (*O*) (*Kompas*, 25 November 1995).
- (c) Terus diwaspadai (*P*), Adanya Tempat Mesum di Bantul (*S*) (*Bernas*, 6 Agustus 1994).
- (d) Lagi (*K*), Mikrolet Ngebut (*S*) Tewaskan (*P*) Penumpangnya (*O*) (*Jawa Pos*, 3 Januari 1993).

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 356) membedakan jenis kalimat menjadi: (1) kalimat aktif dan pasif,

(2) tunggal dan majemuk, (3) verbal dan nominal. Dalam kaitannya dengan jenis kalimat, pada umumnya ragam jurnalistik lebih banyak mempergunakan kalimat aktif, tunggal, dan verbal daripada kalimat pasif, majemuk, dan nominal. Ini nampak dari proporsi kalimat-kalimat itu dalam pemberitaan, tajuk rencana, dan opini seperti ditemukan di bawah ini.

- (a) Dari 34 buah kalimat yang terdapat di dalam Mukadimah (Tajuk Rencana) tentang ABRI (*Gatra*, 6 Mei 1995), terdapat 9 kalimat pasif, dan sisanya kalimat nominal (7) dan kalimat aktif; 6 kalimat majemuk, dan sisanya kalimat tunggal.
- (b) Dari 48 kalimat yang terdapat di dalam Tajuk Rencana tentang pertanggungjawaban Menteri Agama Kepada Jemaah Haji Indonesia (*Kompas*, 19 April 1995) terdapat 15 kalimat pasif, dan sisanya kalimat nominal (12) dan kalimat aktif; 20 kalimat majemuk, dan sisanya kalimat tunggal.

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 356) lebih lanjut berpendapat tentang jenis kalimat yaitu bahwa yang menarik adalah kalimat tunggal yang dipergunakan adalah kalimat tunggal yang beberapa fungsinya terdiri atas banyak kata, seperti contoh-contoh ini.

- (a) Bagi pekerja potensial yang menginginkan pendapatan lebih tinggi (*K*) tersedia (*P*) *piece rated system*, yaitu sistem pengupahan (*yang*) berdasarkan hasil kerja pekerja bersangkutan (*S*) (*Kompas*, 11 Mei 1995).
- (b) Namun, Oklahoma City (*S*) mendadak menjadi *headlines* media massa (*P*) di seluruh dunia (*K*), setelah terjadinya pengeboman atas bangunan Alfred Murrah (*K*), 19 April 1995 (*K*), yang mengakibatkan jatuhnya puluhan korban manusia (*K*) (*Gatra*, 6 Mei 1995).

Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1996: 358) berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan kata fungsi – kata sambung

dan kata depan – ragam bahasa jurnalistik menghemat penggunaannya, terutama apabila penghilangan itu tidak mengaburkan pemahamannya. Analisis sintaktis kalimat-kalimat jurnalistik, karena itu, tidak semudah apabila dibandingkan dengan analisis sintaktis kalimat-kalimat ilmiah. Contoh-contoh penghematan kata-kata fungsi tersebut diberikan berikut ini.

- (a) Meski hanya pertandingan uji coba, namun hasil imbang dari tim yang dipersiapkan di Italia ini membuat pelatih Thord Grip dan Danurwindo harus bekerja keras (*untuk*) mempersiapkan tim menjelang pertandingan sesungguhnya (*pada*) tanggal 25 Mei mendatang (*Kompas*, 11 Mei 1995).
- (b) (*Pada*) hari ini, Rabu (19/4) PSSI berusia 65 tahun. Tepatnya (*adalah ketika*) Ir. R. Suratin mendirikan PSSI di Yogyakarta, (*pada tanggal*) 19 April 1930 (*sebagai*) hasil peleburan tujuh bond yang ada (*pada*) saat itu (*Kompas*, 19 April 1995).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, serta prosedur penelitian yang terdiri atas metode penyediaan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Berikut ini diuraikan metode penelitian tersebut.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini memerikan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada (Sudaryanto, 1992: 62). Dalam penelitian ini dideskripsikan struktur wacana dan penggunaan ragam bahasa jurnalistik berdasarkan ciri-ciri linguistis ragam bahasa jurnalistik pada tataran penulisan (ejaan), tataran kosa kata dan morfologi, dan tataran sintaktis dalam wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas*.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Yang menjadi populasi penelitian adalah keseluruhan wacana *Tajuk Rencana* pada harian *Kompas*. Mengingat tidak terbatasnya wacana tersebut, untuk keperluan penelitian ini digunakan sampel, yaitu wacana-wacana yang representatif dan mewakili populasi.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah wacana *Tajuk Rencana* edisi Desember 1999. Ada dua alasan pemilihan sampel tersebut. Pertama, penelitian ini dilakukan pada tahun 2000 sehingga objek penelitian yang sudah tersedia dan mudah diperoleh adalah objek penelitian pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 1999. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudaryanto (1988b: 19-20) bahwa sampel penelitian adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada, yaitu bentuk bahasa yang telah terbukti digunakan orang seperti tertulis di media massa, maka sampel wacana tersebut dipandang cukup mewakili wacana *Tajuk Rencana* untuk diteliti. Kedua, Desember merupakan bulan terakhir tahun 1999 yang mempunyai keberagaman isi *Tajuk Rencana* karena pada bulan Desember 1999 terdapat berbagai fakta menarik; berbagai fakta menarik tersebut telah dikemukakan pada Bab I Subbab Latar Belakang Masalah Penelitian.

3.3 Prosedur Penelitian

Dalam upaya memecahkan masalah linguistik yang diteliti, setiap penelitian linguistik dilaksanakan melalui tiga tahap upaya strategis yang berurutan, yaitu (1) tahap penyediaan data, (2) tahap analisis data, dan (3) tahap penyajian hasil analisis data (Sudaryanto, 1993: 5-7). Untuk melaksanakan ketiga tahap upaya strategis tersebut diperlukan metode dan teknik. Berikut ini diuraikan metode yang disertai teknik yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan ketiga tahap upaya

strategis itu, yaitu metode penyediaan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data.

3.3.1 Metode Penyediaan Data

Metode penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak karena kegiatan yang dilakukan memang berupa penyimakan, yaitu menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993: 133). Untuk melaksanakan metode simak digunakan dua teknik, yaitu teknik sadap dan teknik catat.

Teknik sadap dilakukan dengan cara menyadap penggunaan bahasa, yaitu mengamati dengan teliti penggunaan bahasa yang berupa kata, frase, klausa, dan kalimat yang terdapat pada wacana *Tajuk Rencana*. Teknik catat dilakukan dengan cara mencatat data yang diperoleh dari sumber tertulis ke dalam kartu data. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan.

Penyedia data dalam penelitian ini adalah harian *Kompas* yang telah menerbitkan wacana *Tajuk Rencana* edisi Desember 1999. Dengan demikian, wacana *Tajuk Rencana* yang diterbitkan selama bulan Desember 1999 berfungsi sebagai sumber data tertulis.

3.3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan dan metode agih. Metode padan menggunakan alat penentu di luar unsur kebahasaan, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari

bahasa (*langue*) yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993: 13). Metode padan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan ortografis yang alat penentunya perekam dan pengawet bahasa, yaitu tulisan, dan penerapannya diuraikan berdasarkan contoh wacana berikut ini.



Wacana (1)

Tajuk Rencana

Memperbaiki Hubungan Baik dengan RRC demi Kemaslahatan Bersama

SELAMA tiga hari mulai Rabu (1/12) Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengadakan kunjungan kenegaraan resmi ke RRC. Selama lima tahun menjabat presiden, Gus Dur sudah mengunjungi 13 negara, tetapi baru kali ini kunjungan bersifat resmi kenegaraan. Melihat kenyataan itu, mitranya, Menteri Luar Negeri Alim Hoesni Sayid, menyatakan penghargaan. Hal itu, menurut pemimpin RRC, memperlihatkan bagaimana Indonesia menilai perannya dalam hubungan dengan RRC.

Kenyataannya, bahkan negara-negara besar, hingga AS pun, tak bisa saja selain memberi perhatian khusus terhadap RRC. Sosok negara di Asia Timur ini memang unik. Dengan penduduk 1,2 milyar jiwa atau seperlima penduduk dunia, dengan pertumbuhan sempat mencapai 10 persen per tahun, RRC adalah potensi yang menggugah.

Baru saja memperingati setengah abad kelahirannya Oktober silam, RRC tahun ini mencatat sejumlah perkembangan penting. Beberapa pekan lalu mereka telah mencapai persetujuan dengan AS berkaitan dengan lamarannya menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lalu dua minggu lalu, untuk pertama kalinya mereka berhasil meluncurkan wahana antariksa tak berawak sebagai tahapan untuk meluncurkan antariksawan yang pertama. Lalu pada bulan ini juga akan menerima penyerahan kembali Macau dari Portugal.

Dengan pencapaian yang diraihinya selama beberapa tahun terakhir, RRC memang makin percaya diri dalam kancah pergaulan internasional. Bila tahun silam citranya anjlok akibat aksi penumpasan gerakan pro-demokrasi Lapangan Tiananmen, kini—meski tuduhan pelanggaran hak asasi manusia masih acap dilontarkan terhadap dirinya—RRC makin mampu berdiri tegak tidak saja di kawasan Asia, bahkan ketika berhadapan dengan adidaya sekalipun.

RRC seperti itulah yang secara geopolitik dan geostrategi harus dihadapi negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

SEJAUH menyangkut hubungan RI-RRC, sejarah mencatat periode buruknya hubungan itu. Di masa periode parah pertama 1960-an kedua negara sempat demikian dekat, sampai muncul istilah Poros Jakarta-Peking. Periode ini berakhir menyusul terjadinya Peristiwa G30S/PKI, dimana RRC diuntungkan. Meski RRC membantah hal itu, hubungan kedua negara pun putus tahun 1967.

Putusnya hubungan ini selama masa Orde Baru telah menjungkirbalikan paradigma tentang RRC. Negara Tirai Bambu ini bahkan sempat dianggap lebih berbahaya dibandingkan Vietnam selama konflik Kamboja di periode 1980-an. Karena RRC masih tetap menganut sistem komunis, dan selama Orde Baru komunis dianggap sebagai satu hal yang secara politis paling berbahaya, maka upaya memperbaiki hubungan kedua negara pun sulit dibayangkan.

Akan tetapi, di RRC sendiri lalu muncul figur pembaharu, dalam hal ini Deng Xiaoping yang pada tahun 1979 melancarkan program modernisasi. Semenjak itu RRC seperti ditransformasi secara radikal. Meski secara ideologi yang dianut masih komunis, tetapi dalam hal ekonomi kapitalisme yang dipraktikkan. Hal ini melahirkan pengaruh yang besar dalam perubahan sosial kemasyarakatan di RRC.

Lalu ada pula figur seperti Qian Qichen yang dianggap sebagai arsitek pemulihan hubungan RI-RRC. Akhirnya pada tahun 1990 hubungan yang putus selama 23 tahun itu pun dipulihkan.

NAMUN pulihnya hubungan tersebut, tidak serta-merta disertai dengan

meningkatnya keakraban. Aksara Cina tetap dilarang, sebutan "Cina" masih resmi meski banyak orang Cina keberatan dengan sebutan itu. Apa yang terjadi di dalam negeri Indonesia sendiri tidak mendukung bagi berkembangnya hubungan tulus kedua negara.

Alasannya macam-macam. Misalnya, etnik Tionghoa yang jumlahnya sekitar tiga persen dari total penduduk Indonesia ternyata menguasai sebagian besar aset ekonomi nasional. Masyarakat Indonesia melihat dengan geram bagaimana pengusaha Tionghoa berkolusi dengan pejabat pemerintah Orde Baru tanpa bisa protes apa-apa. Sering dengan itu, yang terlihat adalah sebagian besar warga etnik Tionghoa hidup berkelimpahan, sementara warga asli secara umum tertinggal.

Sementara pengusaha Tionghoa banyak dijadikan sapi perah penguasa Orde Baru, rezim ini juga menerapkan diskriminasi nyata. Etnik Tionghoa tak diberi peluang berkariir di lingkungan birokrasi, mereka dipersulit dalam mengurus identitas kewarganegaraan.

Semua itu menghasilkan hubungan yang tak masuk ke hati. Suasana tak harmonis terus berkembang. Lalu ketika Indonesia dilanda krisis, persaingan benih kebencian pun meledak dalam kerusuhan Mei 1998 yang di antaranya dilampiaskan terhadap etnik Tionghoa.

ITULAH sekilas apa yang terjadi di hari kemarin. Rabu lalu Gus Dur di-sambut dengan karpet merah dan dentuman meriam. RI dan RRC sepakat menyongsong era baru dalam hubungan bilateralnya.

Seperti kita baca kemarin, kedua negara sepakat agar hubungan kedua negara tidak boleh dirusakkan oleh sentimen etnik. Gus Dur meyakinkan pada tuan rumah bahwa mungkin ada saja di antara masyarakat Indonesia yang memendam sentimen semacam itu, tetapi hal itu bukan merupakan sikap mayoritas rakyat Indonesia dan pemerintah sendiri tidak menjalankan kebijakan seperti itu. Jadi Presiden RI mengharap, jangan sampai hubungan rusak karena di RRC ada persepsi Indonesia menerapkan diskriminasi terhadap etnik Tionghoa.

Kita pun sepakat bahwa hubungan dengan RRC bersifat strategis. Dengan memiliki hubungan tulus dengan RRC, RI tentu bisa menjadi mitra yang dipercaya, misalnya dalam upaya menengahi tumpang tindih klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Selain itu, walaupun di antara kedua negara ada masalah garis batas teritorial di sekitar Natuna, hal ini akan lebih mudah dibicarakan.

Khususnya ketika Indonesia tengah berkuat mengatasi krisis ekonomi, adanya hubungan baik dengan RRC kiranya bisa mempermudah usaha menumbuhkan kepercayaan di kalangan pengusaha etnik Tionghoa yang tersebar di wilayah Asia maupun dunia lain untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

Lalu sebagai sesama negara yang dalam banyak hal juga masih tergo-long berkembang, masih banyak yang bisa dijadikan bahan kerja sama dengan prinsip saling tukar-menukar pengalaman, misalnya dalam pengembangan iptek, atau dalam industri kecil dan menengah.

Jangan pula dilupakan, ketika RI dilanda berbagai aktivitas bersifat dis-integrasi, adanya dukungan RRC bagi RI untuk terus bisa mempertahankan integritas wilayahnya merupakan kontribusi penting.

KITA yakin, dalam kerangka kerja itulah Presiden Gus Dur mengadakan kunjungan kenegaraan pertamanya ke RRC. Dengan prinsip saling menghormati, RI-RRC dapat mengembangkan hubungan baik demi kemaslahatan bersama.

Wacana (1) terdiri atas dua kesatuan tulisan yang terletak di depan (di sebelah kiri) dan di belakang (di sebelah kanan); kesatuan tulisan ini disebut kolom. Wacana (1) juga terdiri atas kesatuan larik dan setiap kesatuan larik dibedakan dengan kesatuan larik yang lain dengan baris baru di bawahnya yang menjorok ke dalam; kesatuan larik ini disebut paragraf. Selain itu, wacana (1) juga terdiri atas larik-larik yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi selesai; larik-larik ini disebut kalimat.

Pelaksanaan metode agih menggunakan teknik bagi unsur langsung, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara membagi satuan lingual yang dianalisis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dasar yang digunakan untuk membagi satuan lingual adalah jeda (Sudaryanto, 1993: 31).

Penerapan teknik bagi unsur langsung dalam penelitian ini dilakukan pada setiap wacana. Contoh penerapannya menggunakan wacana (1) di atas. Wacana mempunyai unsur langsung yang berupa paragraf. Wacana (1) terdiri atas dua puluh paragraf dan setiap paragraf dapat dibagi lagi menjadi kalimat-kalimat. Misalnya, paragraf pertama pada wacana (1) dapat dibagi menjadi empat kalimat sebagai berikut.

- (1) Selama tiga hari mulai Rabu (1/12) Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengadakan kunjungan kenegaraan resmi ke RRC.
- (2) Selama lima pekan menjabat presiden, Gus Dur sudah mengunjungi 13 negara, tetapi baru kali ini kunjungan bersifat resmi kenegaraan.
- (3) Melihat kenyataan itu, mitranya, tuan rumah Presiden Jiang Zemin menyatakan penghargaannya.

- (4) Hal itu, menurut pemimpin RRC, memperlihatkan bagaimana Indonesia menilai penting hubungannya dengan RRC.

Berikut ini dikemukakan pembatasan objek penelitian penggunaan ragam bahasa jurnalistik berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik pada tataran sintaktis. Tataran sintaktis yang diteliti dibatasi penggunaan ragam bahasa jurnalistik berdasarkan ciri kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat dan ciri penggunaan kata fungsi.

Alasan pembatasan objek penelitian pada tataran sintaktis tersebut karena ruang lingkup ciri ragam bahasa jurnalistik pada tataran sintaktis sangat luas. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewandi (dalam Markiswo dan Supratiknya, 1995: 353-354) yaitu ciri sintaktis ragam bahasa jurnalistik meliputi ciri kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat (jabatan kalimat), pengurutan (tempat) fungsi-fungsi kalimat, jenis kalimat, dan penggunaan kata fungsi.

3.3.3 Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Hasil analisis data disajikan dengan menggunakan metode informal dan metode formal. Metode informal adalah metode penyajian hasil analisis data yang menggunakan kata-kata biasa, dalam arti tidak menggunakan rumus atau lambang-lambang. Metode formal adalah metode penyajian hasil analisis data yang menggunakan tanda, yaitu tanda kurung biasa(()), tanda kurung kurawal ({}), dan tanda kurung siku ([]) (Sudaryanto, 1993: 145).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan wacana *Tajuk Rencana* ditinjau dari segi struktural dan ragam bahasanya. Penelitian dari segi struktural menguraikan hasil penelitian struktur wacana *Tajuk Rencana*. Penelitian dari segi ragam bahasa menguraikan hasil penelitian penggunaan ragam bahasa jurnalistik yang terdapat pada wacana *Tajuk Rencana*, berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik. Setelah diuraikan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan pembahasan terhadap hasil penelitian wacana *Tajuk Rencana* ditinjau dari segi struktural dan ragam bahasanya.

4.1 Hasil Penelitian

Setelah diteliti, ditemukan bahwa struktur wacana *Tajuk Rencana* terdiri atas empat bagian, yaitu judul, pembuka, isi, dan penutup. Bagian judul berisi judul wacana yang berfungsi sebagai topik wacana. Bagian pembuka berisi fakta dan penyebabnya yang berfungsi untuk mengarahkan pembaca pada suatu permasalahan. Bagian isi berisi argumen-argumen yang berfungsi untuk menganalisis bagian judul atau topik wacana dan bagian pembuka. Bagian penutup berisi sikap atau pandangan redaksi dan ajakan kepada pembaca. Fungsinya untuk menyatakan sikap atau pandangan redaksi dan ajakan kepada pembaca sesuai dengan judul atau topik wacana.

Hasil penelitian terhadap penggunaan ragam bahasa jurnalistik berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik meliputi tataran penulisan (ejaan), tataran kosa kata dan morfologi, dan tataran sintaktis yang terdapat pada wacana *Tajuk Rencana*. Berikut ini dikemukakan hasil-hasil penelitian tersebut. Pada tataran penulisan (ejaan), ditemukan adanya empat ciri pemilihan ketentuan penulisan yang lebih ekonomis, ada dua judul wacana yang menggunakan kalimat inversif dari 26 judul wacana, dan ada pemilihan penulisan yang sesuai dengan ketentuan EYD. Pada tataran kosa kata dan morfologi, ditemukan ciri-ciri berikut ini. Ada campur kode, yaitu antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Inggris yang berjumlah 25 buah, antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Jawa yang berjumlah 11 buah, dan antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Belanda yang berjumlah 3 buah.

Penghilangan awalan ditemukan pada judul wacana yang jumlahnya ada 4 buah dan pada bagian-bagian wacana yang jumlahnya ada 27 buah. Penghilangan awalan pada judul wacana akan dibahas pada Tataran Kosa Kata dan Morfologi, khususnya bagian sembilan ciri linguistik penggunaan ragam bahasa jurnalistik. Penghilangan awalan pada bagian-bagian wacana akan dibahas pada Tataran Kosa Kata dan Morfologi.

Berdasarkan sembilan ciri linguistik penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran kosa kata dan morfologi, pada wacana *Tajuk*

Rencana ditemukan ciri-ciri berikut ini. Penggunaan artikel, jumlahnya ada 13 buah dan penggunaan interjeksi, jumlahnya ada 2 buah. Penghematan penggunaan kata bantu kata kerja, jumlahnya ada 52 buah. Penghematan penggunaan kata bantu bilangan penunjuk satuan, jumlahnya ada 40 buah. Penghilangan preposisi penghubung kata kerja, jumlahnya ada 11 buah. Penghematan penggunaan konjungsi ketergantungan (konjungsi kalimat majemuk), jumlahnya ada 43 buah. Penggunaan kata-kata penat, jumlahnya ada 16 buah. Penggunaan kata-kata susastra (dalam penelitian ini disebut kata-kata yang bermakna konotasi), jumlahnya ada 186 buah. Penggunaan padanan kata, atau penggantinya (kata ganti orang, atau tunjuk), jumlahnya ada 218 buah. Pengungkapan konsep jamak yang menggunakan cara yang paling ekonomis, jumlahnya ada 87 buah. Di dalam kepala berita, atau dalam penelitian ini disebut judul wacana, terdapat penggunaan bentuk kata yang tidak lengkap (pada umumnya verba) yang jumlahnya ada 4 buah.

Pada tataran sintaktis ditemukan ciri-ciri berikut ini. Anak kalimat yang berdiri sendiri yang terdapat pada bagian-bagian wacana, jumlahnya ada 27 buah. Dalam hal kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat, pada judul wacana, dari 26 judul wacana *Tajuk Rencana* semuanya menggunakan kalimat yang lengkap fungsi-fungsinya. Pada bagian-bagian wacana, dalam hal kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat, ditemukan kalimat-kalimat yang tidak lengkap fungsi-fungsinya yang jumlahnya ada 134 buah. Penghematan

penggunaan kata fungsi, yaitu kata sambung, jumlahnya ada 123 buah dan kata depan, jumlahnya ada 96 buah.

Untuk memperjelas uraian hasil penelitian tersebut, perlu dilakukan pembahasan. Berikut ini dikemukakan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut yang terdiri atas pembahasan terhadap struktur wacana dan penggunaan ragam bahasa jurnalistik berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Struktur Wacana

Struktur wacana *Tajuk Rencana* yang terdapat pada harian *Kompas* terdiri atas bagian judul, bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Berikut ini dikemukakan pembahasan terhadap bagian-bagian wacana tersebut.

4.2.1.1 Bagian Judul

Bagian judul berisi judul wacana yang berfungsi sebagai topik wacana. Contoh dari bagian judul menggunakan wacana (2) berikut ini. Judul dari wacana (2) adalah “Mudik Bagian Peredaan Ketegangan, Berikan Rasa Aman dan Beban Wajar”.

Wacana (2)

Tajuk Rencana

Mudik Bagian Peredaan Ketegangan, Berikan Rasa Aman dan Beban Wajar

DAPAT dipastikan gelombang arus mudik akan meninggi pekan ini. Para penghuni Jakarta dan sekitarnya, mulai memadati aneka sarana angkutan: bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara, maupun kendaraanaraan pribadi.

Setelah tahun lalu "tradisi" mudik cenderung agak sepi, tahun ini di-kan kembali marak. Selain karena berdekatnya saat perayaan Natal, tahun baru, dan Lebaran, juga karena mulai leganya rongga dada war-wetelah hampir dua tahun ditekan kondisi krisis.

Memang pasti urusan kantung belum pulih, sebab krisis ekonomi ma-melilit. Namun saat kondisi aman-stabil-tenang mulai terjadi, ketika ha-an bahwa hari esok sudah akan lebih baik dari hari ini sudah tumbuh, ng pun lantas akan berani berspekulasi. Termasuk, bila perlu menjual a cadangan atau pinjam sana-sini, yang penting bisa mudik.

Akan tetapi, bukankah pula sebenarnya sebagian roda ekonomi b hidup, bahkan ketika puncak krisis ekonomi terjadi? Ekonomi rak-usaha kecil-kecil, sektor informal yang tak mengenal valuta asing, lit atau penyertaan modal pemerintah, tetap bertahan meskipun pas-ak sebaik keadaan normal.

KITA pun sudah mendengar, bahwa instansi terkait telah mencoba akukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi masa-masa abut. Penambahan armada angkutan—laut, udara, darat, dan pe-perangan—konon telah disiapkan. Bahkan dari Jakarta, mobil-mobil er dicadangkan, untuk mengantisipasi luapan penumpang.

Untuk melindungi keselamatan, berlatar belakang buruknya kualitas akukan uji kelaikan di setiap terminal keberangkatan bus. Sementara k mengatasi masalah keamanan, Polda Metro Jaya mengaku telah iyapkan 21.000 personel, termasuk para petugas yang akan diter-an di pusat-pusat konsentrasi para pemudik.

Langkah-langkah antisipasi tersebut bukan hanya dilakukan oleh rat di pusat, di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah, terutama dae-yang banyak dilintasi para pemudik. Sebagai sebuah peristiwa rutin, ilang setiap tahun, pada dasarnya para aparat kita dari pusat hingga rah, sudah sangat tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan pa-nasa-masa tersebut.

AKAN tetapi, bukankah di balik kerutinan itu kita juga kerap kali terke-sangat memberikan toleransi terhadap macam-macam praktik me-kan yang rutin terjadi. Katakanlah, akibat saking rutinitasnya, kita sudah dapat lagi melihat bahwa ini salah dan itu salah.

Hari-hari ini misalnya kita cukup mendapat bukti, bahwa tiket kere-di sudah banyak yang jatuh ke tangan calo, yang untuk menebusnya tangan mereka, konsumen harus mengeluarkan uang dua atau kan tiga kali lipat dari harga resmi.

Dan ketika hal seperti itu kita ketengahkan, jawaban kita pun rutin ... "Kalau ketahuan akan kami tindak", atau "Kami akan menindak te-siapa pun pelakunya."

Bahwa setelah pernyataan seperti itu calo tetap berkeliaran, masya-it tetap dipersulit untuk memperoleh tiket kereta api, itu soal lain lagi. a, memang menjadi wajar apabila misalnya orang sampai pada ke-ulan, "jangan-jangan pelaku percaloan itu memang kita-kita juga".

KASUS tiket kereta api yang diborong calo sekadar contoh, bahwa di balik rutinitas pekerjaan kita masih terdapat hal yang harus kita benahi, kita waspadai, kita kendalikan.

Oleh sebab itu memang sebaiknya, meskipun kita tengah melaku-kan pekerjaan rutin, kita tidak menghadapinya dengan sikap rutin. Kare-ina pada dasarnya, tantangan dan permasalahan baru akan selalu munc-ul, seiring dengan perkembangan zamannya.

Berkaitan dengan masalah angkutan Lebaran, tantangan terbesar adalah menyediakan sarana transportasi dalam jumlah yang cukup dan sekaligus aman, dengan harga relatif wajar.

Kita tekankan faktor aman, sebab telah menjadi pengetahuan umum, bahwa akibat tekanan resesi ekonomi, kualitas keamanan dan keselamatan angkutan umum sudah merosot drastis.

Ban-ban gundul, suku cadang hasil kanibal dari kendaraan lain, su-dah sangat biasa kita temukan. Oleh sebab itu misalnya, kita pandang strategis keputusan pemerintah untuk menerapkan uji kelaikan pada se-tiap terminal keberangkatan bus umum.

Persoalannya, akankah kebijakan itu efektif atau bemasib sama de-ngan macam-macam kebijakan lain yang cuma baik di kertas. Patut kita dengar misalnya tanggapan sinis, "Ah paling minta duit, *wong* uji kelaikan yang rutin saja cuma uji-ujian, yang penting bayar".

MENURUT laporan wartawan harian ini beberapa waktu lalu, secara umum kondisi jalan lintas Jawa—lintas mudik terpadat—lumayan baik. Namun kondisi musim penghujan sekarang, tetap menuntut kewas-padaan baik dari para pemudik maupun para petugas angkutan Lebaran. Selain karena di beberapa wilayah dikenal rawan banjir, kondisi jalan licin juga memerlukan perhatian lebih dari aparat.

Di luar masalah-masalah "rutin", sejak tahun lalu muncul soal baru yang perlu mendapat perhatian lebih dari pihak aparat keamanan. Yakni, meningkatnya intensitas gangguan keamanan, seperti perampokan dan pemerasan, di beberapa lintas Jawa dan Sumatera.

Fenomena ini sudah amat menggelisahkan dalam setahun terakhir. Bukan saja bagi para sopir truk dan pemilik barang yang sering jadi sa-sasaran pembajakan, tetapi juga bagi para penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi. Cerita di sekitar kasus-kasus pembajakan bus umum dan penghadangan mobil pribadi, sudah mengundang kengerian tersendiri bagi para calon pemudik.

KITA ketengahkan berbagai hal tersebut sekadar mengingatkan ki-ta bersama, bahwa menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan ke-sempatan kepada masyarakat agar paling tidak dapat mudik secara aman, selamat, dan pembebanan yang wajar.

Soal-soal kenyamanan tetap layak diusahakan, meskipun sesuai dengan kondisinya sekarang ini, kita sadari bukanlah hal yang harus dan bisa diberi prioritas.

Kita percaya apabila tiga hal itu saja—aman, selamat, dan pem-bebanan yang wajar—bisa dipenuhi, kita sudah ikut memberi ruang bempas pada masyarakat, setelah selama dua tahun mereka ber-ada dalam ketegangan. Kita pandang mudik sebagai bagian dari upa-ya peredaan ketegangan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan saat ini.

4.2.1.2 Bagian Pembuka

Bagian pembuka berisi fakta dan penyebabnya yang berfungsi untuk mengarahkan pembaca pada suatu permasalahan. Contoh dari bagian pembuka menggunakan wacana (2) di atas. Bagian pembuka dari wacana (2) adalah paragraf ke-1 sampai paragraf ke-4. Bagian tersebut dibatasi oleh spasi rangkap (a) dan spasi rangkap (b). Bagian tersebut juga ditandai dengan kurung kurawal, atau bagian pembuka dari wacana (2) adalah yang terdapat dalam tanda kurung kurawal. Bagian pembuka dari wacana (2) berisi fakta tentang gelombang arus mudik yang dipastikan akan meninggi dan diduga kembali marak setelah tahun lalu “tradisi” mudik cenderung agak sepi. Hal tersebut didasarkan pada tiga sebab, yaitu berdekatnya saat perayaan Natal, Tahun Baru, dan Lebaran; mulai leganya rongga dada warga setelah hampir dua tahun ditekan kondisi krisis; dan adanya harapan akan hari esok yang lebih baik sehingga orang berani menjual harta cadangan atau pinjam sana-sini agar bisa mudik.

4.2.1.3 Bagian Isi

Bagian isi berisi argumen-argumen yang berfungsi untuk menganalisis bagian judul atau topik wacana dan bagian pembuka. Contoh dari bagian isi menggunakan wacana (2) di atas.

Bagian isi dari wacana (2) adalah paragraf ke-5 sampai paragraf ke-20. Bagian tersebut dibatasi oleh spasi rangkap (b) sampai spasi rangkap (f). Bagian tersebut juga ditandai dengan kurung siku, atau bagian isi dari wacana (2) adalah yang terdapat dalam tanda kurung siku. Bagian isi dari wacana (2) terdiri atas empat argumen berikut ini.

- (1) Departemen perhubungan dan aparat keamanan telah mencoba melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi masa-masa mudik [argumen I, paragraf ke-5 sampai paragraf ke-7, dibatasi oleh spasi rangkap (b) dan spasi rangkap (c)].
- (2) Meskipun instansi terkait sudah mengeluarkan pernyataannya, akan tetapi selalu saja terjadi secara rutin praktik-praktik yang merugikan para pemudik, yaitu praktik percaloan [argumen II, paragraf ke-8 sampai paragraf ke-13, dibatasi oleh spasi rangkap (c) dan spasi rangkap (d)].
- (3) Berkaitan dengan masalah angkutan Lebaran, hal yang perlu ditekankan adalah menyediakan sarana transportasi dalam jumlah yang cukup dan sekaligus aman, dengan harga relatif wajar. Faktor aman ditekankan karena akibat tekanan resesi ekonomi, kualitas keamanan dan keselamatan angkutan umum sudah merosot drastis. Keputusan pemerintah untuk menerapkan uji kelaikan pada setiap terminal keberangkatan bus umum merupakan keputusan strategis. Akan tetapi, apakah hal itu efektif atau bernasib sama dengan kebijakan-kebijakan lain yang hanya baik di atas kertas [argumen III, paragraf ke-14 sampai paragraf ke-17, dibatasi oleh spasi rangkap (d) dan spasi rangkap (e)].
- (4) Di luar masalah-masalah rutin itu, sejak tahun lalu muncul soal baru yaitu meningkatnya intensitas gangguan keamanan, seperti perampokan dan pemerasan terhadap para sopir truk dan pemilik

barang, dan para penumpang bus umum dan mobil pribadi. Hal ini juga perlu mendapat perhatian yang lebih dari aparat keamanan karena para calon pemudik merasa ngeri [argumen IV, paragraf ke-19 dan paragraf ke-20, dibatasi oleh spasi rangkap (e) dan spasi rangkap (f)].

4.2.1.4 Bagian Penutup

Bagian penutup berisi sikap atau pandangan redaksi dan ajakan kepada pembaca. Fungsinya untuk menyatakan sikap atau pandangan redaksi dan ajakan kepada pembaca sesuai dengan judul atau topik wacana.

Contoh dari bagian penutup menggunakan wacana (2) di atas. Bagian penutup dari wacana (2) adalah paragraf ke-21 sampai paragraf ke-23. Bagian tersebut dibatasi oleh spasi rangkap (f). Bagian tersebut juga ditandai dengan kurung biasa, atau bagian penutup dari wacana (2) adalah yang terdapat dalam tanda kurung biasa. Bagian penutup dari wacana (2) dikemukakan berikut ini.

- (1) Kita ketengahkan berbagai hal tersebut sekadar mengingatkan kita bersama, bahwa menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar paling tidak dapat mudik secara aman, selamat, dan pembebanan yang wajar (paragraf ke-21, berfungsi untuk menyatakan ajakan kepada pembaca).
- (2) Soal-soal kenyamanan tetap layak diusahakan, meskipun sesuai dengan kondisinya sekarang ini, kita sadari bukanlah hal yang harus

dan bisa diberi prioritas (paragraf ke-22, berfungsi untuk menyatakan sikap/pandangan redaksi).

- (3) Kita percaya apabila tiga hal itu saja – aman, selamat, dan pembebanan yang wajar – bisa dipenuhi, kita sudah ikut memberi ruang bernapas pada masyarakat, setelah selama dua tahun mereka berada dalam ketegangan. Kita pandang mudik sebagai bagian dari upaya peredaan ketegangan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan saat ini (paragraf ke-23, berfungsi untuk menyatakan sikap/pandangan redaksi dan ajakan kepada pembaca).

Setelah diteliti, ditinjau dari jenis kalimat berdasarkan fungsinya, bagian penutup mempunyai empat variasi, yaitu bagian penutup yang disusun dengan menggunakan (1) kalimat berita yang jumlahnya ada 11 buah, (2) gabungan antara kalimat berita dan kalimat tanya yang jumlahnya ada 8 buah, (3) gabungan antara kalimat berita dan kalimat suruh yang jumlahnya ada 4 buah, dan (4) gabungan antara kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh yang jumlahnya ada 3 buah. Adanya variasi-variasi bagian penutup tersebut berfungsi untuk menyatakan sikap atau pandangan redaksi dan ajakan kepada pembaca dengan cara yang berbeda-beda.

Contoh bagian penutup yang disusun dengan menggunakan kalimat berita adalah bagian penutup dari wacana (2). Contoh-contoh bagian penutup yang disusun selain dengan menggunakan kalimat berita dikemukakan berikut ini.

4.2.1.3.1 Bagian penutup yang disusun dengan menggunakan kalimat berita dan kalimat tanya

Wacana (3)

Tajuk Rencana

Menentang Persoalan HAM di Timor Timur, Janganlah Kita Ribut Sendiri!

DEWASA ini, kita semakin ribut sendiri tentang tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur yang dianggap melibatkan beberapa perwira tinggi TNI. Perkembangan itu harus kita pandang wajar atau mengherankan dan sebaiknya membangkitkan perhatian kita secara kritis.

Kita cenderung untuk berpendapat mengherankan dan sebaiknya beri perhatian secara kritis.

Keributan itu tampak dari terjadinya polemik secara terbuka yang melibatkan satu antara Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur dan Tim Advokasi HAM TNI.

Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur, setelah melakukan penyelidikan di berbagai lokasi di Timtim dan juga di Kupang, mengumumkan penemuannya secara terbuka.

Langkah itu digugat dan disalahkan oleh Tim Advokasi HAM TNI. Advokasi berpendapat, seharusnya hasil penyelidikan itu dilaporkan kepada Komnas HAM seraya terus dilengkapi, termasuk dari sumber-sumber yang berlawanan, misalnya sumber TNI.

Komisi Penyelidik, KPP HAM, berpandangan, disiarikannya temuan HAM bukan untuk mempengaruhi atau mendiskreditkan pihak tertentu, misalnya beberapa jenderal yang disebut-sebut. Pengumuman lebih baik segera menunjukkan Komisi itu bekerja secara serius dan jujur.

Langkah publikasi itu dinilai penting oleh Komisi karena yang dipublikasi bukan hanya khalayak dalam negeri, tetapi terutama publik internasional.

Setiap kali diingatkan, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur, di antaranya dengan pertimbangan politik, agar persoalan itu tetap secara kredibel ditangani dan diserahkan kepada penyelidikan serta — jika diperlukan — pengadilan Indonesia, atau tribunal internasional.

(b)

JIKA bertitik tolak dari pertimbangan itu, bukankah sebenarnya ada singgung antara Komisi Penyelidik KPP HAM dengan Tim Advokasi HAM TNI. Titik singgung itu ialah agar penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM dilakukan oleh tim Indonesia dan bahwa cara bekerja hasil tim Indonesia itu kredibel dan karena itu diakui dan diterima oleh tim HAM PBB.

Ada baiknya, semua pihak, baik KPP HAM maupun Tim Advokasi HAM mempertimbangkan aspek internasional itu. Masuk akal, jika kita tidak hanya dengan aspek itu. Namun itulah kenyataan konkret yang kita hadapi — itulah kenyataan yang dihasilkan oleh perubahan, terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi belumlah secanggih sekarang, tetapi tuduhan pelanggaran HAM terjadi di Aceh, Irian Jaya dan daerah lain. Teknologi informasi yang menjadi faktor bangkit dan meluasnya kecurigaan dan kepekaan tentang HAM telah marak ketika berlangsung proses penentuan pendapat serta epilognya di Timor Timur.

Teknologi informasi dan meluasnya kesadaran dan kepekaan soal HAM itulah membuat apa yang terjadi pada periode pascapenentuan pendapat bukan saja berkepanjangan, tetapi serentak menjadi perhatian kepedulian dunia. Komisi Hak Asasi Manusia PBB turun tangan.

Dalam konteks itu, tidaklah bijak untuk mempertimbangkan agar semua pihak, khususnya KPP HAM dan Tim Advokasi bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga dan memperkuat kredibilitas penyelidikan tim Indonesia sendiri dan dengan demikian menjauhkan usaha inter-

nasional untuk bukan saja menyelidiki tetapi juga mengadili.

SILAKAN kedua usaha itu, KPP HAM dan Tim Advokasi bekerja keras dan serius mengumpulkan bahan dari sumber-sumber di lapangan. Usaha itu harus berpedoman kepada komitmen menemukan dan menegakkan substansi kebenaran dan keadilan.

Akan ditemukan fakta-fakta. Masuk akal sekiranya ditemukan indikator pelanggaran-pelanggaran. Siapa pun, kabarnya, begitu menyaksikan puing-puing perusakan bangunan dan prasarana di berbagai lokasi di Timtim akan tersentak dan terbawa untuk membayangkan berbagai kengerian yang diasosiasikan dengan pelanggaran HAM.

Tidaklah dapat kita benarkan setiap bentuk dan praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tidak pula orang dapat menutupi dan menyembunyikannya dalam zaman teknologi informasi dan komunikasi super canggih dewasa ini.

Akan tetapi, jika misalnya fakta-fakta itu akan ditempatkan sebagai upaya menemukan proporsi kebenaran dan keadilan, dapatkah fakta-fakta itu ditanggalkan begitu saja dari konteksnya. Bukanlah distorsi yang kita cari atau kita upayakan, tetapi proporsi.

(d)

MESKIPUN kini telah menjadi sejarah, tetapi justru sejarah itu tetap masih memberikan pengalaman dan pelajarannya. Kita tahu sejarah Timor Timur yang kontroversial sejak semula dan yang sekaligus menjadi bagian yang sekurang-kurangnya berkoinsidensi dengan perang dingin.

Masuk akal dan *fair* jika misalnya ikut menjadi pertimbangan bagaimana peranan TNI dalam sistem politik dan pemerintahan lama. Kita menjangka keberatan bahkan oposisi diam-diam terhadap keputusan pemerintah memberikan opsi otonomi luas dan opsi merdeka kepada rakyat Timor Timur.

Kita mencium betapa kegetiran menjadi lebih pahit, ketika pendapat yang anti keputusan pemerintah itu, terutama dari kalangan TNI, ditempatkan pada posisi tak berdaya karena terjepit antara loyalitas dan suara hati.

Tampak benar, hasil referendum membangkitkan suatu perasaan kecewa secara mendalam dan frustrasi karena dirasakan identik dengan kapitulasi. Kapitulasi setelah menjalankan kebijaksanaan dan keputusan pemerintah bertahun-tahun dan bukannya tanpa pengorbanan.

Faktor-faktor semacam itu bisa kita tambahkan misalnya situasi serba tidak menentu dan mencari-cari dengan maksud baik posisi dan peranan TNI sebagai bagian dan akibat dari reformasi prodemokrasi dan prosupremasi otoritas sipil.

(e)

UNTUK apa hal-hal itu kita kemukakan? Untuk menemukan proporsi kebenaran dan keadilan. Yang ternyata dan terbukti salah harus disalahkan, bahkan dihukum menurut ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, jika baik proses maupun hasilnya akan seoptimal, mungkin *fair*, konteks seperti kita paparkan di atas tidakkah sepatutnya menjadi bahan pertimbangan dan referensi?

Kemauan mempertimbangkan proporsi dan konteks itu juga kita maksudkan agar dalam usaha penyelidikan terhadap tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur, kita tidak ribut sendiri, bersitegang sendiri, *berperang* sendiri.

Pertimbangan itu tidak mengurangi kejujuran dan keseriusan menemukan kebenaran dan keadilan. Pertimbangan itu barangkali justru memperkuat *fairness* dan kredibilitas.

(Kompas, 17 Desember 1999)

Bagian penutup dari wacana (3) dibatasi oleh spasi rangkap (e). Bagian tersebut juga diberi tanda kurung biasa atau yang terdapat dalam tanda kurung biasa. Bagian tersebut disusun dengan menggunakan kalimat berita dan kalimat tanya seperti dikemukakan berikut ini.

- (1) Untuk apa hal-hal itu kita kemukakan (kalimat tanya)? (Hal-hal itu kita kemukakan) Untuk menemukan proporsi kebenaran dan keadilan (kalimat berita). Yang ternyata dan terbukti salah harus disalahkan, bahkan dihukum menurut ketentuan yang berlaku (kalimat berita) (paragraf ke-23, berfungsi untuk menyatakan sikap/pandangan redaksi).
- (2) Akan tetapi, jika baik proses maupun hasilnya akan seoptimal, mungkin *fair*, konteks seperti kita paparkan di atas tidakkah sepatutnya menjadi bahan pertimbangan dan referensi (kalimat tanya) (paragraf ke-24, berfungsi untuk menyatakan ajakan kepada pembaca)?
- (3) Kemauan mempertimbangkan proporsi dan konteks itu juga kita maksudkan agar dalam usaha penyelidikan terhadap tuduhan pelanggaran HAM di Timor-Timur, kita tidak ribut sendiri, bersitegang sendiri, berperang sendiri (kalimat berita) (paragraf ke-25, berfungsi untuk menyatakan ajakan kepada pembaca).
- (4) Pertimbangan itu tidak mengurangi kejujuran dan keseriusan menemukan kebenaran dan keadilan (kalimat berita). Pertimbangan itu barangkali justru memperkuat *fairness* dan kredibilitas (kalimat berita) (paragraf ke-26, berfungsi untuk menyatakan sikap/pandangan redaksi).

4.2.1.3.2 Bagian penutup yang disusun dengan menggunakan kalimat berita dan kalimat suruh

Wacana (4)

Tajuk Rencana

Hari Ini Hari Terakhir Tahun 1999, Hari Terakhir Abad XX, Milenium Baru?

(a)
 PERGANTIAN tahun dari tanggal 31 Desember 1999 ke 1 Januari adalah juga pergantian abad, abad ke-20 ke abad ke-21, bahkan pergantian milenium, dari milenium ke-2 ke milenium ke-3. Perjalanan hidup kita bersama sebagai bangsa dalam tahun 1999, tahun 1998, dalam tahun 1997, dan tahun-tahun sebelumnya mendahului tahun krisis menghentakkan kesadaran, refleksi, dan gugatan diri. Tidak habis-habisnya kita bertanya, kenapa nasib kita jadi begini? Kenapa konflik agama di Ambon tidak surut, tetapi setiap kali berkobar dalam eskalasi yang lebih besar? Kenapa korban-korban terus beran dan merusakkan susul-menyusul? Marisan masalah lama belum juga surut. Bahkan entah kenapa, konflik seperti timbul keruwetan-keruwetan baru. Dari perspektif itu, kita memasuki tahun baru, tidak dengan langkah pasti, melainkan lebih semenarik kaki terseok-seok!

(b)
 ADA baiknya kita menggunakan perspektif lain yang lebih luas, bukan setahun atau beberapa tahun, bukan usia Indonesia Merdeka 54 tahun, tetapi seabad. Perspektif 100 tahun! Tentu juga pasang surut. Tetapi pasang surut pergulatan dan perjuangan yang mencapai klimaks gemilang Indonesia Merdeka. Kita catat peranan gerakan dan perlawanan rakyat. Gerakan dan wanan rakyat yang disertai pengorbanan, membawa hasil. Beberapa aktor membuat pergerakan dan perlawanan rakyat itu berhasil. Di antaranya, ketika naluri dan suara hati pergerakan rakyat dicerikan dan dilengkapi dengan visi, ide serta perangkat modern. Modern n arti visi dibangun lewat pergulatan dan perumusan ideologi. Gerakan diberi wadah organisasi. Kebangkitan rakyat dicerdaskan oleh pendidikan dan pergaulan aktual, kultural dan teknologi. Gerakan rakyat mengambil organisasi, dan manajemen yang juga digunakan oleh sistem dan pemerintahan kolonial.

(c)
 KESADARAN dan gerakan rakyat dibangun menjadi kesadaran bangsa, berbahasa, bermegara. Warisan kemacramragaman sejarah oleh sistem kolonial dieksploitir untuk politik *divide et impera*, pembelahan dan perintah, oleh gerakan rakyat diubah menjadi dasar kerairan dan kebangkitan kebangsaan. Bertahap-tahap dan berproses lama, bangkitnya kesadaran dan keanian untuk membangun satu bangsa, bangsa Indonesia; satu bahasa, isa Indonesia; satu Tanah Air, Tanah Air Indonesia; dan satu negalegara Republik Indonesia.

(d)
 DUNIA kagum, mereka, bangsa Indonesia berhasil mendirikan satu ira, tempat penduduk nomor empat terbesar di dunia bisa hidup ber-a dalam persaudaraan, kekeluargaan, dan rasa persatuan. Orang hormat, para Bapak Pendiri Republik berhasil menggali dan yerap aspirasi rakyat meletakkan lima sendi dasar tempat tegaknya ublik menaungi dan melindungi seluruh rakyat dengan latar belakang coraknya yang begitu aneka-ragam. Ketika bangsa-bangsa masih bergulat, bersaing bahkan perang unenenemukan jalan ketiga, sistem sosial ekonomi yang tidak menin-

das dan tidak mengangakan kesenjangan sosial tetapi sebaliknya juga tetap produktif dan menghargai individu, bukankah sebenarnya kita bangsa Indonesia telah menemukan kerangka, semangat, dan arah jalan ketiga itu? Di antaranya disebut sebagai sublimasi dari paham kapitalisme dan paham komunisme. Disebut juga sebagai demokrasi yang menampung persamaan aspirasi politik dan ekonomi.

(e)
 KITA mengalami jatuh-bangun. Komitmen yang disertai usaha uji coba untuk mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan, setiap kali terdesak oleh kuatnya warisan feodal. Warisan feodal membenkan *privilege* yang dianggap sudah pada tempatnya dan dengan sendirinya kepada mereka yang memegang jabatan dan kekuasaan. Pertemuan antara warisan feodal, otokrasi, hirarki birokrasi, dan unsur fasisme merusak penyelenggaraan kekuasaan, pemerintahan, dan pembangunan. Komitmen membangun demokrasi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan tinggal merupakan jargon kosong.

Keroposnya penyelenggaraan kekuasaan, pemerintahan, dan pembangunan ke dalam membuat Indonesia mengalami krisis multidimensi ketika badai global ikut bertiup. Indonesia menjadi orang sakit di Asia. Wajah Indonesia menimbulkan asosiasi dengan sementara wajah negara-negara Afrika.

(f)
 PERGERAKAN rakyat lewat gerakan mahasiswa, LSM, kaum cendekiawan, dan eksponen-eksponen bangsa berhasil bangkit. Kita bangkit lewat jalan demokrasi dan ekonomi pasar sosial. Pemilihan Umum 7 Juni 1999 lagi-lagi dihormati orang.

Akan tetapi warisan krisis belum usai. Baik oleh faktor obyektif maupun oleh hadimnya desas-desus rekayasa seperti provokator, konflik antarsesama warga berkecamuk seperti di Ambon. Tuntutan daerah untuk mengatur dirinya secara adil tumpang-tindih dengan beberapa gerakan separatisme. Disintegrasikan bangsa mengancam.

Belum seumur jagung usia pemerintah baru, tanda-tanda penyakit menahun bisa kambuh lagi. Esensi dan substansinya ialah kolusi kekuasaan dan kesempatan. Substansinya ialah pemimpin yang tergoda untuk menjadi tidak peka dengan penghayatan senasib-sepenanggungan dengan rakyat. Esensinya, lagi-lagi mulai maraknya intrik, bersaing kepentingan, rebutan rezeki!

(g)
 JANGAN kita biarkan larut dan hanyut oleh arus gelombang yang merupakan warisan dan sisa demoralisasi *kemarin*. Pada hari terakhir tahun 1999, yang berarti akhir abad ke-20 dan masuknya kita ke abad ke-21, kita tengok pasang-surut pergulatan bangsa sepanjang abad ke-20 itu! Puncak pergulatan dan pengorbanan panjang, yakni Indonesia Merdeka, jangan kita biarkan terurai dan berantakan lagi. Kita harus bijak mengambil pelajaran sejarah dan pengalaman. Kita perbaiki secara menyeluruh dan mendasar apa yang harus kita perbaiki. Akan tetapi janganlah sendi dan kerangka bangunan Negara Republik Indonesia Merdeka, diporakporandakan kembali. Langkah itu bukan kemajuan, justru *retrogesi*, langkah mundur. Sejarah tidak surut. Sejarah maju, bahkan sedang melangkah ke tahun baru, abad baru, milenium baru. Jadilah bangsa yang cerdas dan bijak!

(Kompas, 31 Desember 1999)

Bagian penutup dari wacana (4) dibatasi oleh spasi rangkap (g). Bagian tersebut juga diberi tanda kurung biasa atau yang terdapat dalam tanda kurung biasa. Bagian tersebut disusun dengan menggunakan kalimat berita dan kalimat suruh seperti dikemukakan berikut ini.

- (1) Jangan kita biarkan larut dan hanyut oleh arus gelombang yang merupakan warisan dan sisa demoralisasi kemarin (kalimat suruh golongan kalimat larangan). Pada hari terakhir tahun 1999, yang berarti akhir abad ke-20 dan masuknya kita ke abad ke-21, kita tengok pasang surut pergulatan bangsa sepanjang abad ke-20 itu (kalimat suruh golongan kalimat ajakan) (paragraf ke-21, berfungsi untuk menyatakan ajakan kepada pembaca)!
- (2) Puncak pergulatan dan pengorbanan panjang, yakni Indonesia Merdeka, jangan kita biarkan terurai dan berantakan lagi (kalimat suruh golongan kalimat larangan). Kita harus bijak mengambil pelajaran sejarah dan pengalaman (kalimat berita). Kita perbaiki secara menyeluruh dan mendasar apa yang harus kita perbaiki (kalimat berita) (paragraf ke-22, berfungsi untuk menyatakan ajakan kepada pembaca dan sikap/pandangan redaksi).
- (3) Akan tetapi janganlah sendi dan kerangka bangunan Negara Republik Indonesia Merdeka, diporak-porandakan kembali (kalimat suruh golongan kalimat larangan). Langkah itu bukan kemajuan, justru *retrogesi*, langkah mundur (kalimat berita). Sejarah tidak surut (kalimat berita). Sejarah maju, bahkan sedang melangkah ke tahun baru, abad baru, milenium baru (kalimat berita). Jadilah bangsa yang cerdas dan bijak (kalimat suruh yang sebenarnya) (paragraf ke-23, berfungsi untuk menyatakan ajakan kepada pembaca dan sikap/pandangan redaksi)!

4.2.1.3.3 Bagian penutup yang disusun dengan menggunakan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh

Wacana (5)

Tajuk Rencana

ta Bertanya, Komitmen Memberantas dan Menindak KKN Dilanjutkan atau Tidak!

SUS Bank Bali menggemparkan. (a) Kini, kasus pemberian kredit Rp 10 triliun kepada perusahaan Texmaco, lebih seru. Masih menyusul kasus-kasus lain.

Kasus Bank Bali melibatkan uang negara (baca: uang rakyat) hampir 10 triliun. Kasus kredit Texmaco mengucurkan kredit hampir Rp 10 triliun. Kasus Bank Bali gempar karena dilakukan dalam pemerintahan resmi.

Memberantas dan menindak KKN termasuk agenda pokok reformasi. Presiden Soeharto surut karena KKN. Amatlah ironis, bahwa pelepasan reformasi mengulangi lagi praktik KKN. Kapan kita belajar. Kita jera.

Kasus Texmaco terjadi dalam pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Kredit mengucur ketika Indonesia sudah dilanda krisis ekonomi. Kasus Texmaco riuh rendah karena jumlahnya yang besar, hampir Rp 10 triliun. Juga karena pemberian kredit oleh Bank Indonesia disertai disposisi Presiden Soeharto.

(b)

Sejak kasus Bank Bali, sejak berbagai isu KKN lain dan kini muncul kasus kredit besar kepada Texmaco, muncul pertanyaan dan keraguan pada banyak kalangan, yakni pemberantasan dan tindakan terhadap KKN akan dilanjutkan atau pudar dan surut di telan.

Beberapa faktor menjadi penyebab timbulnya keraguan dan pertanyaan. Yang satu belum selesai ditangani sudah tampil kasus lain. Proses pemberantasan, padahal seperti halnya dalam kasus politik, masyarakat tidak sabar.

Keraguan dan pertanyaan bukan hanya disebabkan oleh jumlah dan kasus KKN yang harus dihadapi oleh pemerintahan Presiden KH Soeharto. Keraguan dan pertanyaan, lebih-lebih lagi muncul dan mulai tampak lagi penyakit kita selama ini.

Perjuangan KKN merupakan perjuangan secara umum dan abstrak, oke saja. Semua kita setuju. Begitu KKN menjadi kasus-kasus nyata, terdapat diproses secara hukum, pendapat dan sikap terbelah.

Yang akan lihat-lihat dulu siapa yang disangka melakukan dan siapa yang kiranya akan terlibat? Terhadap kasus-kasus KKN secara umum, komitmen reformasi tidak lagi seia sekata.

Sejak mulai kita dengar berbagai tanggapan seperti: ah itu bermotif di belakangnya. Sengaja akan menghabisi. Ada konspirasi di belakngnya. Bahkan tokoh-tokoh yang vokal terhadap reformasi anti-KKN, dihadapkan pada kasus-kasus konkret, berubah nada suaranya.

Perkembangan semacam itu bisa saja ditafsirkan sebagai wajar. Tetapi apun masuk akal, cainya komitmen terhadap pergulatan memberantas dan menindak KKN, merupakan perkembangan yang mencemaskan. Dari pengalaman masa lampau, sikap subyektif dan pilih-pilih bulu merupakan salah satu sebab suburnya praktik KKN.

Perimbangan-pertimbangan politik seperti yang sudah mulai terdesak ini juga menjadi salah satu sebab, mengapa praktik KKN, dengan kekuasaan, wewenang dan kesempatan begitu meluas dan laiam di negeri kita.

(c)

MEMBERANTASAN dan penindakan secara hukum terhadap KKN sunenjadi komitmen kita, terutama komitmen gerakan reformasi serta eksponennya. Segala sesuatu dicatat, direkam, didokumentasikan. Jika sesuatu terbuka.

Ya, keterbukaan atau transparansi, itulah faktor lain yang begitu sentral dan berdampak besar, dan karena itu, janganlah kita alpa. Dalam pemerintahan masa lalu, segala sesuatu secara relatif efektif dapat diatur dan dikendalikan publisitasnya.

Kini, berkat reformasi prodemokrasi dan proketerbukaan serta kemerdekaan informasi, segala sesuatu menjadi terbuka. Dulu kasus seperti Bank Bali dapat ditutupi. Bahkan kasus Texmaco baru sekarang terungkap. Belum terungkap misalnya dalam pemerintahan Presiden Habibie.

Memang orang sudah dengar dan melihat tanda dan isyaratnya, tetapi kondisi keterbukaan dan demokrasi prokemerdekaan informasi belum-lah sedemikian rupa, sehingga orang tidak memaparkannya secara terbuka.

Apa efek dari keterbukaan dan publikasi itu? Mau tidak mau memunculkan dorongan untuk menindaklanjuti secara hukum kasus yang terbuka. Jika tidak ada tindak lanjut secara adil dan benar sesuai asas dan proses hukum, kekecewaan masyarakat akan kembali merajalela. Krisis kepercayaan dan wibawa akan terulang lagi.

(d)

BENAR, adakalanya kita mendua. Taruhlah kasus Texmaco itu. Sosok perusahaannya begitu impresif, tumbuh dari kecil. Pimpinannya bijak dan luas komunikasinya. Belum lagi nilai asetnya, nilai ekspornya, jumlah karyawan.

Bukan hanya Texmaco yang bersosok perusahaan dan manajemen seperti itu. Beberapa bahkan lebih banyak lagi, sosok perusahaan semacam itu. Itu barulah sisi sebelah wajahnya.

Ada sisi lain. Secara ekstrem dan secara dramatis sisi wajah yang lain itu adalah bagaimana perusahaan-perusahaan itu, termasuk bank-banknya justru dinilai ikut menyebabkan timbulnya krisis ekonomi Indonesia.

Gradasinya macam-macam. Ada yang mungkin lebih menjadi korban situasi. Ada yang karena melakukan praktik KKN ikut menjadi pemicu krisis. Utang luar negeri dan dalam negeri berlebihan.

Untuk menyelamatkan perusahaannya, menempuh atau merasa terpaksa menempuh praktik KKN dalam skala besar-besaran. Praktik KKN berimplikasi semakin merusak mental pejabat, semakin mengangakan kesenjangan dan ketidakadilan sosial.

Dan jika perusahaannya *toh* tutup juga, berarti menimbulkan pengangguran. Belum lagi data yang kita peroleh, betapa krisis ekonomi yang antara lain bersumber pokok pada KKN, membuat penghasilan rakyat turun, penduduk miskin melonjak lagi dan anak-anak terancam menjadi generasi hilang.

(e)

SEKURANG-kurangnya sekadar sebagai bahan perbandingan dan bahan mempertanyakan dan menggugat, acapkali kita bertanya, praktik KKN yang melibatkan pejabat dan pengusaha, tidakkah akhirnya juga melanggar perikemanusiaan dan hak-hak asasi manusia?

Ternyata refleksi diri itu sejalan dengan pendapat diskusi tentang Hak Hak Asasi kemarin ini. Diskusi itu sampai pada kesimpulan, bukan hanya tindakan politik dan tindakan kekerasan yang melanggar HAM. Tindakan ekonomi, tindakan sosial dan lain-lain, juga dapat melanggar Hak Asasi Manusia.

(f)

MAKA, janganlah kendur komitmen kita memberantas dan menindak KKN. Komitmen barulah menjadi komitmen yang terlaksana secara efektif, jika komitmen disertai konsistensi. Bukan komitmen namanya, jika tanpa konsistensi.

Bagian penutup dari wacana (5) dibatasi oleh spasi rangkap (e) dan spasi rangkap (f). Bagian tersebut juga diberi tanda kurung biasa atau yang terdapat dalam tanda kurung biasa. Bagian tersebut disusun dengan menggunakan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh seperti dikemukakan berikut ini.

- (1) Sekurang-kurangnya sekadar sebagai bahan perbandingan dan bahan mempertanyakan dan menggugat, acapkali kita bertanya, praktik KKN yang melibatkan pejabat dan pengusaha, tidakkah akhirnya juga melanggar perikemanusiaan dan hak-hak asasi manusia (kalimat tanya) (paragraf ke-24, berfungsi untuk menyatakan sikap/pandangan redaksi)?
- (2) Ternyata refleksi diri itu sejalan dengan pendapat diskusi tentang Hak-hak Asasi kemarin ini (kalimat berita). Diskusi itu sampai pada kesimpulan, bukan hanya tindakan politik dan tindakan kekerasan yang melanggar HAM (kalimat berita). Tindakan ekonomi, tindakan sosial dan lain-lain, juga dapat melanggar Hak Asasi Manusia (kalimat berita) (paragraf ke-25, berfungsi untuk menyatakan sikap/pandangan redaksi).
- (3) Maka, janganlah kendur komitmen kita memberantas dan menindak KKN (kalimat suruh golongan kalimat larangan). Komitmen barulah menjadi komitmen yang terlaksana secara efektif, jika komitmen disertai konsistensi (kalimat berita). Bukan komitmen namanya, jika

tanpa konsistensi (kalimat berita) (paragraf ke-26, berfungsi untuk menyatakan ajakan kepada pembaca dan sikap/pandangan redaksi).

4.2.2 Penggunaan Ragam Bahasa Jurnalistik Berdasarkan Ciri-ciri Linguistik Ragam Bahasa Jurnalistik pada Tataran Penulisan (Ejaan), Tataran Kosa Kata dan Morfologi, dan Tataran Sintaktis dalam Wacana *Tajuk Rencana*

4.2.2.1 Pada Tataran Penulisan (Ejaan)

Pada tataran ini, ada empat ciri pemilihan ketentuan penulisan yang lebih ekonomis. Berikut ini dibahas keempat ciri tersebut.

4.2.2.1.1 Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak ditulis dengan huruf, tetapi tetap ditulis dengan lambang bilangan; jumlahnya ada 20 buah.

Contoh:

- (1) Korban kecanduan obat terlarang berlipat jumlahnya, disebut angka 2 juta untuk Jakarta saja (*Kompas*, 3 Desember 1999), *alih-alih* Korban kecanduan ... *dua* juta untuk Jakarta saja.
- (2) Demi menuruti kehendak penguasa itu, maka Yusuf dan Maria terpaksa menempuh perjalanan kaki sejauh 128 km ke selatan menuju Kota Bethlehem, yang terletak sekitar 10 km selatan Yerusalem, (*Kompas*, 24 Desember 1999), *alih-alih* Demi menuruti ... *sepuluh* km selatan Yerusalem.

- (3) Sementara di Kolumbia, lebih dari 200 keluarga terpaksa mengungsi guna menghindari konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan para gerilyawan (*Kompas*, 24 Desember 1999), *alih-alih* Sementara di Kolumbia, lebih dari *dua ratus* keluarga

4.2.2.1.2 Penulisan singkatan nama orang, gelar, jabatan, dan pangkat tanpa tanda titik, jumlahnya ada 13 buah.

Contoh:

- (1) Termasuk Gubernur Bank Indonesia (waktu itu) *J* Soedrajat Djiwandono, bahkan Presiden (waktu itu) Soeharto, seperti dikemukakan Menteri Laksamana Sukardi, berada di belakang skandal kredit tersebut (*Kompas*, 1 Desember 1999), *alih-alih* Termasuk Gubernur Bank Indonesia (waktu itu) *J.* Soedrajad Djiwandono,
- (2) Dalam kaitan inilah kita melihat relevansi apa yang Rabu (8/12) kemarin dengan gamblang diuraikan oleh *Dr* Jalaludin Rakhmat di harian ini (*Kompas*, 9 Desember 1999), *alih-alih* Dalam kaitan inilah ... *Dr.* Jalaludin Rakhmat di harian ini.
- (3) Pendapat Dewan Ekonomi Nasional dikemukakan oleh Ketua DEN *Prof* Emil Salim dan Sekretaris Dewan *Dr* Sri Mulyani Indrawati, yang disertai beberapa anggota dewan (*Kompas*, 13 Desember 1999), *alih-alih* Pendapat Dewan Ekonomi Nasional ... *Prof.* Emil Salim dan Sekretaris Dewan *Dr.* Sri Mulyani Indrawati,

4.2.2.1.3 Tanggal, bulan, dan tahun tidak ditulis lengkap, baik menggunakan angka atau gabungan antara angka dan huruf, tetapi ditulis dengan menggunakan angka yang dipisah oleh garis miring untuk menunjukkan tanggal dan bulan, dan terletak di dalam kurung, dan angka tahun tidak dituliskan; jumlahnya ada 5 buah.

Contoh:

- (1) Dalam kaitan itulah misalnya, kita ikut menggarisbawahi ajakan Presiden Gus Dur pada saat bertatap muka dengan para investor asing hari Selasa (30/11), agar para investor segera melakukan investasi, tanpa harus menunggu selesainya berbagai konflik (*Kompas*, 2 Desember 1999), *alih-alih* Dalam kaitan itulah misalnya, ... hari Selasa (30 November 1999) atau (30-11-1999)....
- (2) Latar belakang dan dimensinya bertali-temali, juga dalam kasus Doulos di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (15/12) malam (*Kompas*, 18 Desember 1999), *alih-alih* Latar belakang dan dimensinya ... Rabu (15 Desember 1999) atau (15-12-1999) malam.
- (3) Mengemukakan alasan bahwa mereka berbeda pendapat secara prinsipil dengan pemerintah dalam menangani penyelesaian kontrak-kontrak pembelian listrik (Power Purchase Agreement/ PPA) swasta, keduanya mundur sejak Selasa (21/12) (*Kompas*, 21 Desember 1999), *alih-alih* Mengemukakan alasan ... Selasa (21 Desember 1999) atau (21-12-1999).

4.2.2.1.4 Penulisan nilai uang tanpa menggunakan angka nol dua di belakang tanda koma atau tanda hubung (-) di belakang tanda titik koma (;), jumlahnya ada 2 buah.

Contoh:

(1) Dan kalau begitu adanya, harga rupiah kemarin dulu – ketika pernah menguat sampai level *Rp 6.000,-an* sesaat setelah pemerintahan baru terbentuk – mungkin justru yang tidak riil, karena sebagian didorong oleh harapan yang berlebihan itu (*Kompas*, 6 Desember 1999), *alih-alih* Dan kalau begitu adanya, ... sampai level *Rp 6.000,00-an* atau *enam ribuan rupiah*

(2) Bagaimana kita mengartikan kurs rupiah yang kembali melemah hingga *Rp 7.400* per dollar AS, atau indeks harga saham yang cenderung terus merosot pekan-pekan terakhir ini (*Kompas*, 2 Desember 1999)?, *alih-alih* Bagaimana kita ... hingga *Rp 7.400,00* atau *tujuh ribu empat ratus rupiah ... ?*

Hasil analisis judul menunjukkan bahwa dari 26 judul wacana *Tajuk Rencana* ditemukan penulisan dua judul wacana yang menggunakan kalimat inversif. Kedua judul tersebut yaitu “Tentang Persoalan HAM di Timor Timur, Janganlah Kita Ribut Sendiri (*Kompas*, 17 Desember 1999)” dan “Menjelang Hari-hari Keagamaan, Mari Kita Ciptakan Kedamaian (*Kompas*, 18 Desember 1999)”.

Selain keempat ciri pemilihan ketentuan penulisan yang lebih ekonomis dan pemilihan judul yang menggunakan kalimat inversif di

atas, ada juga pemilihan penulisan yang sesuai dengan ketentuan EYD, yaitu lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu kata yang ditulis dengan huruf, jumlahnya ada 32 buah dan penulisan tanggal, bulan, dan tahun, jumlahnya ada 3 buah.

Contoh lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu kata yang ditulis dengan huruf yang sesuai dengan ketentuan EYD dikemukakan berikut ini.

- (1) Belum selesai melaporkan peringatan ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka, yang damai tetapi *toh* disertai *dua* korban tertembak dan *satu* tewas, kita dihadapkan pada pertikaian di Maluku (*Kompas*, 7 Desember 1999).
- (2) Setelah *dua* pekan puasa dijalani, *dua* hari lagi perayaan Natal dan kurang dari *dua* pekan Tahun Baru, secara umum kita masih dapat menyaksikan suasana pasar yang relatif tenang (*Kompas*, 23 Desember 1999).
- (3) Menurut laporan badan PBB urusan pengungsi, saat ini saja terdapat sekitar *satu* juta warga Afrika yang berstatus sebagai pengungsi (*Kompas*, 24 Desember 1999).

Contoh penulisan tanggal, bulan, dan tahun yang sesuai dengan ketentuan EYD dikemukakan berikut ini.

- (1) Hari ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka diperingati hari ini, *4 Desember* (*Kompas*, 4 Desember 1999).

- (2) Siapa yang akan melakukan renegotiasi, pemerintah juga sudah membentuk tim atas dasar Keppres No 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN tanggal 18 Desember 1999 (*Kompas*, 22 Desember 1999).
- (3) Pergantian tahun dari tanggal 31 Desember 1999 ke 1 Januari 2000 adalah juga pergantian abad, abad ke-20 ke abad ke-21, bahkan pergantian milenium, dari milenium ke-2 ke milenium ke-3 (*Kompas*, 31 Desember 1999).

4.2.2.2 Pada Tataran Kosa Kata dan Morfologi

Pada tataran kosa kata dan morfologi, ditemukan adanya campur kode, yaitu antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Inggris yang berjumlah 25 buah; antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa yang berjumlah 11 buah; dan antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Belanda yang berjumlah 3 buah. Adanya campur kode tersebut disebabkan oleh karena tidak ada kosa kata yang tepat dalam bahasa yang sedang dipakai (bahasa Indonesia) sehingga perlu menggunakan kosa kata dari bahasa asing (bahasa Inggris dan bahasa Belanda) dan kosa kata dari bahasa daerah (bahasa Jawa). Campur kode antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Inggris meliputi kata-kata berikut ini: *at any cost, carry-over, civil society, cover both sides, due process of law, error and trial, fair, fairness, full disclosure, fund manager, genuine, go public, hit and run, homo economicus, impunity, make a difference, mark-*

up, Power Purchase Agreement, privilege, shock, strong and effective government, The End of History, the first worst, the second worst, dan trial by the press.

Campur kode antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Jawa meliputi kata-kata berikut ini: “aji mumpung”, *ewuh-pakewuh, gonjang-ganjing, greget, linglung, memlintir*, “ngotot”, *seabreg-abreg, sembrono, toh*, dan *wong*. Khusus pada dua kata, yaitu “aji mumpung” dan “ngotot” ditulis dengan diapit oleh tanda petik karena kedua kata tersebut merupakan ungkapan. Sedangkan campur kode antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Belanda meliputi kata-kata berikut ini: *divide et impera, openbaarheid*, dan *publisitat*.

Ada penghilangan awalan pada bagian-bagian wacana. Kata-kata yang dihilangkan awalannya merupakan kata kerja dasar yang aktif. Penghilangan awalan pada bagian-bagian wacana berjumlah 27 buah yang meliputi awalan *me-* dan *alomorfnya* ada 23 buah serta awalan *se-* ada 4 buah. Contoh adanya penghilangan awalan tersebut dikemukakan berikut ini.

- (1) Dengan pencapaian yang diraihnyanya selama beberapa tahun terakhir, RRC memang *makin* percaya diri dalam kancah pergaulan internasional (*Kompas*, 3 Desember 1999), *alih-alih* Dengan pencapaian ... RRC memang *semakin*....

- (2) Bentrokan bermuatan agama di Seram *minta* korban 42 orang tewas (*Kompas*, 7 Desember 1999), *alih-alih* Bentrokan ... *meminta* korban
- (3) Lebih serius lagi – tentu bobotnya sebagai isu nasional *jadi* lebih besar – tatkala ditemukan bukti, sejumlah aparat keamanan – TNI maupun kepolisian – juga berfungsi sebagai pengedar (*Kompas*, 11 Desember 1999), *alih-alih* Lebih serius lagi ... *menjadi* lebih besar
- (4) Kita *sebut* Ambon, tidak menyebut Aceh, Riau, Irian Jaya, daerah-daerah genting lainnya, sebab menurut perasaan kita itulah konflik yang relatif berbau konflik antaragama (*Kompas*, 18 Desember 1999), *alih-alih* Kita *menyebut* Ambon,

Berdasarkan sembilan ciri linguistik penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran kosa kata dan morfologi, ditemukan adanya sembilan ciri linguistik. Berikut ini dibahas kesembilan ciri linguistik tersebut.

- 4.2.2.2.1 Ada dua jenis penggunaan artikel yang jumlahnya ada 13 buah, yaitu *sebuah*, jumlahnya ada 7 buah, dan *suatu* jumlahnya ada 4 buah, dan penggunaan interjeksi, yaitu *ah* yang jumlahnya ada 2 buah.

Contoh:

- (1) Kredit yang demikian besar untuk satu kelompok usaha tersebut, diyakini telah melanggar batas maksimum pemberian kredit oleh *sebuah* bank (*Kompas*, 1 Desember 1999).
- (2) Kisah Natal mencoba memperlihatkan bahwa dalam situasi pengungsian paksa itu masih ada harapan untuk memunculkan *sebuah* paradigma baru (*Kompas*, 24 Desember 1999).
- (3) Tampak benar, hasil referendum membangkitkan *suatu* perasaan kecewa secara mendalam dan frustrasi karena dirasakan identik dengan kapitulasi (*Kompas*, 17 Desember 1999).
- (4) Seorang menteri, kabarnya, sebelum membuka *suatu* kasus besar, minta persetujuan anggota DPR dulu, dibuka atau tidak dibuka (*Kompas*, 21 Desember 1999).
- (5) Sudah mulai kita dengar berbagai tanggapan seperti: *ah* itu bermotif politik di belakangnya (*Kompas*, 6 Desember 1999).
- (6) Patut kita dengar misalnya tanggapan sinis, “*Ah* paling minta duit, *wong* uji kelaikan yang rutin saja cuma uji-ujian, yang penting bayar (*Kompas*, 28 Desember 1999)”.

4.2.2.2.2 Penghematan penggunaan kata bantu kata kerja, jumlahnya ada 52 buah, yaitu meliputi *adalah* yang jumlahnya ada 29 buah, *menjadi* yang jumlahnya ada 16 buah, dan *merupakan* yang jumlahnya ada 7 buah, dan penghematan penggunaan kata bantu bilangan penunjuk satuan, yang jumlahnya ada 40 buah,

yaitu meliputi *sebesar* yang jumlahnya ada 21 buah dan *sebanyak* yang jumlahnya ada 19 buah.

Contoh penghematan penggunaan kata bantu kata kerja:

- (1) Misalnya, apa yang terjadi di Aceh dan segala tuntutanya (...) kait-mengait dan berpengaruh terhadap keadaan seluruh bangsa dan negara (*Kompas*, 4 Desember 1999), *alih-alih* Misalnya, apa yang terjadi di Aceh dan segala tuntutanya *adalah* kait-mengait
- (2) “Tetapi (KPP HAM) mencoba menanyakan kepada kami apa betul perbuatan itu dilakukan oleh TNI, jawabannya (...) tidak (*Kompas*, 21 Desember 1999)”, *alih-alih* “Tetapi (KPP HAM)... jawabannya *adalah* tidak”.
- (3) Jadi Presiden RI mengharapkan, jangan sampai hubungan (...) rusak karena di RRC ada persepsi Indonesia menerapkan diskriminasi terhadap etnik Tionghoa (*Kompas*, 3 Desember 1999), *alih-alih* Jadi Presiden RI mengharapkan, jangan sampai hubungan *menjadi* rusak
- (4) Begitu KKN menjadi kasus-kasus nyata, terbuka, dan diproses secara hukum, pendapat dan sikap (...) terbelah (*Kompas*, 6 Desember 1999), *alih-alih* Begitu KKN ... pendapat dan sikap *menjadi* terbelah.
- (5) Kasus Ambon yang hampir setahun sebagai contoh, awalnya (...) persoalan sosial, selanjutnya berkembang sebagai kasus berlatar

belakang agama (*Kompas*, 18 Desember 1999), *alih-alih* Kasus Ambon ... awalnya *merupakan* persoalan sosial,

- (6) Bahwa setelah pernyataan seperti itu calo tetap berkeliaran, masyarakat tetap dipersulit untuk memperoleh tiket kereta api, itu (...) soal lain lagi (*Kompas*, 28 Desember 1999), *alih-alih* Bahwa setelah ... itu *merupakan* soal lain lagi.

Contoh penghematan penggunaan kata bantu bilangan penunjuk satuan:

- (1) Kita kembali ke akar persoalan: kredit macet (...) Rp 600 trilyun (*Kompas*, 10 Desember 1999), *alih-alih* Kita kembali ... kredit macet *sebesar* Rp 600 trilyun.
- (2) Misalnya, jika gaji pegawai naik (...) 100 persen, terserah saja, asal sekaligus dipahami, akibat kenaikan sebesar itu, inflasi akan naik (...) 500 persen (*Kompas*, 13 Desember 1999), *alih-alih* Misalnya, jika gaji pegawai naik *sebesar* 100 persen, ... inflasi akan naik *sebesar* 500 persen.
- (3) Dengan penduduk (...) 1,2 milyar jiwa atau seperlima penduduk dunia, dengan pertumbuhan sempat mencapai 10 persen per tahun, RRC adalah potensi yang menggentarkan (*Kompas*, 3 Desember 1999), *alih-alih* Dengan penduduk *sebanyak* 1,2 milyar
- (4) Sementara untuk mengatasi masalah keamanan, Polda Metro Jaya mengaku telah menyiapkan (...) 21.000 personel, termasuk para petugas yang akan diterjunkan di pusat-pusat konsentrasi para

pemudik (*Kompas*, 28 Desember 1999), *alih-alih* ... Polda Metro Jaya mengaku telah menyiapkan *sebanyak* 21.000 personel

4.2.2.2.3 Penghilangan preposisi penghubung kata kerja, yaitu *untuk*, jumlahnya ada 11 buah.

Contoh:

(1) Seluruh umat beragama diimbau (...) mewujudkan kegembiraan hari raya keagamaan masing-masing tanpa menimbulkan salah paham umat yang lain (*Kompas*, 18 Desember 1999), *alih-alih* ... diimbau *untuk* mewujudkan

(2) Pemerintah bertugas (...) mengambil prakarsa (*Kompas*, 7 Desember 1999), *alih-alih* Pemerintah bertugas *untuk* mengambil prakarsa.

(3) Melalui berpuasa di bulan Ramadhan inilah kita ingin berlatih (...) mengubah paradigma hidup (*Kompas*, 9 Desember 1999), *alih-alih* ... kita ingin berlatih *untuk* mengubah paradigma hidup.

4.2.2.2.4 Penghematan penggunaan konjungsi ketergantungan (konjungsi kalimat majemuk), jumlahnya ada 43 buah, yaitu meliputi *bahwa* yang jumlahnya ada 26 buah, *apabila* yang jumlahnya ada 9 buah, dan *agar* yang jumlahnya ada 8 buah.

Contoh:

(1) Selain kita percaya (...) tidak semua orang telah melakukan praktik bisnis tidak sehat di masa lalu, yang pertama-tama kita kehendaki adalah selamatnya uang bank, uang negara, uang rakyat (*Kompas*, 1

Desember 1999), *alih-alih* Selain kita percaya *bahwa* tidak semua orang

(2) Dapat dipastikan (...) gelombang arus mudik akan meninggi pekan ini (*Kompas*, 28 Desember 1999), *alih-alih* Dapat dipastikan *bahwa* gelombang

(3) Selain jumlah uangnya, kasus Texmaco juga tak kalah menariknya (...) dibandingkan kasus bank Bali (*Kompas*, 1 Desember 1999), *alih-alih* ... juga tak kalah menariknya *apabila* dibandingkan

(4) (...) Mengikuti perjalanan bangsa Indonesia selama setahun terakhir, orang bisa sangat terpana (*Kompas*, 9 Desember 1999), *alih-alih* *Apabila* mengikuti perjalanan

(5) Tujuannya (...) solusi yang diberikan terarah dan tidak terjadi pengkambinghitaman (*Kompas*, 18 Desember 1999), *alih-alih* Tujuannya *agar* solusi

(6) Pemerintah ingin (...) penyelesaian tetap dilakukan di luar pengadilan (*Kompas*, 22 Desember 1999), *alih-alih* Pemerintah ingin *agar* penyelesaian

4.2.2.2.5 Penggunaan kata-kata penat, jumlahnya ada 16 buah, yaitu meliputi *sementara itu* yang jumlahnya ada 5 buah, *selanjutnya* yang jumlahnya ada 3 buah, dan *sedemikian rupa* ... *sehingga* yang jumlahnya ada 3 buah.

Contoh:

- (1) *Sementara itu* kepada kita ditunjukkan sisi yang lain dari persoalan besar yang menyangkut kredit macet ber-KKN atau tidak ber-KKN (*Kompas*, 20 Desember 1999).
- (2) *Sementara itu*, di banyak gereja, umat juga lebih tekun beribadat memanjatkan doa dan mohon pengampunan (*Kompas*, 24 Desember 1999).
- (3) Perubahan yang sedang kita lakukan adalah *sedemikian rupa, sehingga* peringatan ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka, dihadiri oleh ratusan wartawan dalam dan luar negeri serta disiarkan secara bebas dan terbuka (*Kompas*, 7 Desember 1999).
- (4) Kondisi krisis di lingkungan sosial politik, keamanan, ekonomi, hukum mental, dan moralitas adalah *sedemikian rupa* akumulatif, tali-temali serta parahnya, *sehingga* memerlukan cara penanganan khusus (*Kompas*, 29 Desember 1999).
- (5) *Selanjutnya*, biarlah dalam suasana dan semangat apa adanya dan proporsional itulah, pengumpulan bahan dan keterangan dilanjutkan (*Kompas*, 27 Desember 1999).
- (6) *Selanjutnya* sesuai dengan mekanisme dan proses demokrasi, pemerintah yakni menteri bahkan presiden berapat kerja, dengar pendapat, serta berkonsultasi dengan DPR (*Kompas*, 30 Desember 1999).

4.2.2.2.6 Penggunaan kata-kata susastra, atau dalam penelitian ini disebut kata-kata yang bermakna konotasi, jumlahnya ada 186 buah.

Contoh:

- (1) Sementara pengusaha Tionghoa banyak dijadikan *sapi perah* penguasa Orde Baru, rezim ini juga menerapkan diskriminasi nyata (*Kompas*, 3 Desember 1999).
- (2) Banyak kasus dibiarkan *menggantung* atau dibiarkan *menguap* (*Kompas*, 11 Desember 1999).
- (3) Sebagai BUMN pemegang oligopoli pengadaan listrik, PT PLN *ibaratnya tengah sakit keras karena dilanda kanker ganas* (*Kompas*, 22 Desember 1999).
- (4) Napas kebebasan eksistensial semacam inilah yang ingin *diembuskan* oleh Kisah Natal. Melalui napas tersebut, *tulang-tulang yang sudah mati pun dapat dihidupkan. Dari kolam berlumpur, bunga teratai pun bisa menghasilkan bunga yang indah* (*Kompas*, 24 Desember 1999).

4.2.2.2.7 Pengulangan kata yang sama dan penggunaan kata berulang kedua-duanya enak untuk didengar, tetapi melelahkan untuk dibaca. Oleh karena itu, agar lebih menarik digunakan penggunaan padanan kata atau penggantinya (kata ganti orang, atau tunjuk) yang jumlahnya ada 218 buah.

Contoh:

- (1) Sejauh menyangkut hubungan RI-RRC, sejarah mencatat periode naik-turunnya *hubungan itu*. Di masa periode paruh pertama 1960-an

kedua negara sempat demikian dekat, sampai muncul istilah Poros Jakarta-Peking. *Periode ini* berakhir menyusul terjadinya Peristiwa G 30 S/PKI, di mana RRC dituduh terlibat. Meski RRC membantah *hal itu*, hubungan *kedua negara* pun putus tahun 1967 (*Kompas*, 3 Desember 1999).

(2) Pendapat Dewan Ekonomi Nasional disampaikan oleh Ketua DEN Prof Emil Salim dan Sekretaris Dewan Dr Sri Mulyani Indrawati, yang disertai beberapa anggota Dewan. *Opini itu* dipaparkan kepada media, setelah *mereka* diterima oleh Presiden KH Abdurahman Wahid dan beberapa menteri di Bina Graha (*Kompas*, 13 Desember 1999).

(3) *Penggunaan kata berulang yang dipilih adalah* Mungkin estimasi dan harapan sebagian kitalah yang *terlalu berlebihan* dalam menyambut era baru, era pemerintahan baru, sebagai pengganti rezim lama yang telah runtuh diguncang krisis kepercayaan, *bukan ...* sebagian kitalah yang *berlebih-lebihan ...* (*Kompas*, 2 Desember 1999).

(4) *Penggunaan kata berulang yang dipilih adalah* Kita bekerja sama *saling mengingatkan* agar opsi baik itulah yang terwujud, *bukan* Kita bekerja *bersama-sama ingat-mengingat...* (*Kompas*, 21 Desember 1999).

4.2.2.2.8 Pengungkapan konsep jamak yang menggunakan cara yang paling ekonomis, jumlahnya ada 87 buah.

Contoh:

- (1) *Pengungkapan konsep jamak yang dipilih adalah* Bahwa bila pemilik usaha dihukum, pabrik akan hancur, *puluhan ribu* karyawan akan terlunta-lunta; padahal sepanjang kita tahu, antara perusahaan dan orang adalah dua institusi yang terpisah (*Kompas*, 10 Desember 1999), *bukan* Bahwa bila pemilik usaha ... *berpuluh-puluh* ribu
- (2) *Pengungkapan konsep jamak yang dipilih adalah* Trilyunan dollar AS dana global berada dalam kendali mereka (*Kompas*, 14 Desember 1999), *bukan* Bertrilyun-trilyun dollar AS
- (3) *Pengungkapan konsep jamak yang dipilih adalah* Dari para pakar di berbagai bidang dan lingkungan kemasyarakatan, kita sudah mendengar sebab-musababnya (*Kompas*, 16 Desember 1999), *bukan* Dari pakar-pakar di bermacam-macam bidang
- (4) *Pengungkapan konsep jamak yang dipilih adalah* Jutaan penghuni Jakarta dan sekitarnya, mulai memadati *aneka sarana* angkutan; bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara, maupun kendaraan-kendaraan pribadi (*Kompas*, 28 Desember 1999), *bukan* Berjuta-juta ... *bermacam-macam* sarana

4.2.2.2.9 Di dalam kepala berita, atau dalam penelitian ini disebut judul wacana, terdapat penggunaan bentuk kata yang tidak lengkap (pada umumnya verba), yaitu penghilangan awalan yang jumlahnya ada 4 buah.

Contoh:

- (1) *Judul yang dipilih adalah “Kita Kembangkan Hubungan Baik dengan RRC demi Kemaslahatan Bersama (Kompas, 3 Desember 1999)”*, bukan *“Kita Mengembangkan Hubungan Baik dengan RRC demi Kemaslahatan Bersama”*.
- (2) *Judul yang dipilih adalah “Kita Beri Ruang Bernapas pada Rakyat dengan Menjaga Inflasi Rendah (Kompas, 23 Desember 1999)”*, bukan *“Kita Memberi Ruang Bernapas pada Rakyat dengan Menjaga Inflasi Rendah”*.
- (3) *Judul yang dipilih adalah “Beda Pendapat Soal Harga BBM Jangan Mengorbankan Kepentingan Lain (Kompas, 15 Desember 1999)”*, bukan *“Perbedaan Pendapat Soal Harga BBM Jangan Mengorbankan Kepentingan Lain”*.
- (4) *Judul yang dipilih adalah “Mundurinya Dua Direktur Memperjelas Soal Betapa Berat Masalah PLN (Kompas, 22 Desember 1999)”*, bukan *“Mundurinya Dua Direktur, Memperjelas Persoalan Betapa Berat Masalah PLN”*.

4.2.2.3 Pada Tataran Sintaktis

Pada tataran ini, ditemukan tiga ciri linguistis penggunaan ragam bahasa jurnalistik yaitu meliputi anak kalimat yang berdiri sendiri yang terdapat pada bagian-bagian wacana, kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat yang terdapat pada judul wacana dan bagian-bagian

wacana, dan penghematan penggunaan kata fungsi. Berikut ini dibahas ketiga ciri tersebut.

4.2.2.3.1 Anak kalimat yang dimulai dengan kata *sehingga* dan *sebagainya*, yang berdiri sendiri yang terdapat pada bagian-bagian wacana, jumlahnya ada 27 buah.

Contoh:

- (1) Apa yang dikerjakan pemerintah berikut aparatnya menjadi isu nasional, menjadi bahan pembicaraan masyarakat, menciptakan dukungan moral yang produktif. *Sehingga* yang mereka tempuh tidak hanya ditopang secara yuridis formal, tetapi juga emosi masyarakat, (*Kompas*, 11 Desember 1999), *alih-alih* Apa yang ... dukungan moral yang produktif *sehingga* yang mereka
- (2) Siapa pun yang mau membuka hati tidak dapat mengingkari atau mengecilkan adil dan patutnya tuntutan itu. *Sebab* memang luar biasa akumulasi praktik-praktik pemberian fasilitas kredit di masa lalu kepada para pengusaha besar (*Kompas*, 20 Desember 1999), *alih-alih* Siapa pun ... tuntutan itu *sebab* memang
- (3) Namun pertemuan antara KPP HAM dengan mantan Panglima TNI hari Jumat lalu, telah membuahkan hasil. *Ialah* munculnya rasa lega pada kedua pihak dan surutnya rasa curiga dan saling tak percaya, (*Kompas*, 27 Desember 1999), *alih- alih* Namun ... telah membuahkan hasil, *ialah* munculnya

4.2.2.3.2 Pada judul wacana, dalam hal kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat, dari 26 judul wacana *Tajuk Rencana* semuanya menggunakan kalimat yang lengkap fungsi-fungsinya. Pada bagian-bagian wacana, dalam hal kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat, ditemukan kalimat-kalimat yang tidak lengkap fungsi-fungsinya, jumlahnya ada 134 buah.

Contoh:

- (1) Dengan catatan-catatan itu dan dengan kesadaran bahwa pekerjaan pemerintah tidak bertambah ringan, keputusan Jaksa Agung membatalkan SP3 terhadap mantan Presiden Soeharto, harus diambil. Memang (*keputusan Jaksa Agung membatalkan SP3 terhadap mantan Presiden Soeharto*) serba berat dan serba repot, tetapi janganlah menyalahkan Jaksa Agung (*Kompas*, 8 Desember 1999).
- (2) Jangan pula lupa, Soros yang segera terlibat di sini merupakan hasil perlakuan istimewa. (*Soros*) Ibaratnya tamu undangan khusus, diundang secara khusus, agar tamu-tamu lain mau datang (*Kompas*, 14 Desember 1999).
- (3) Silakan kedua usaha itu (*dilakukan*), (*yaitu*) KPP HAM dan TIM Advokasi bekerja keras dan serius mengumpulkan bahan dari sumber-sumber di lapangan (*Kompas*, 17 Desember 1999).
- (4) Pengalaman selama 32 tahun, di mana SARA ditempatkan sebagai alat, menjadikan perbedaan sebagai kambing hitam. Oleh karena itu

(SARA yang ditempatkan sebagai alat, menjadikan perbedaan sebagai kambing hitam) harus dihindari, ditabukan bahkan hanya di tingkat wacana (*Kompas*, 18 Desember 1999).

4.2.2.3.3 Penghematan penggunaan kata fungsi, yaitu *kata sambung* yang meliputi *dan* yang jumlahnya ada 61 buah dan *yang* berjumlah 52 buah, serta *kata depan* yang meliputi *oleh* yang jumlahnya ada 36 buah, *untuk* yang jumlahnya ada 27 buah, *dengan* yang jumlahnya ada 22 buah, *pada* yang jumlahnya ada 21 buah, *dari* yang jumlahnya ada 8 buah, *di* yang jumlahnya ada 2 buah, dan *tentang* yang jumlahnya ada 2 buah.

Contoh:

- (1) Kesadaran dan gerakan rakyat dibangun menjadi kesadaran berbangsa, berbahasa, (*dan*) bernegara (*Kompas*, 31 Desember 1999).
- (2) Pendekatan (*yang*) bersifat personal kepada investor memang menjadi sangat diperlukan, mengingat apa yang kita alami kemarin dulu adalah krisis kepercayaan (*Kompas*, 14 Desember 1999).
- (3) Seperti berulang kali disampaikan (*oleh*) Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah kelak akan memberikan pengampunan kepada mantan presiden (*Kompas*, 8 Desember 1999).
- (4) Sementara langkah (*untuk*) meminta pertanggungjawaban pengusaha dan bankir yang kreditnya macet, selain penting bagi upaya pemenuhan rasa keadilan rakyat, tetapi juga untuk membangkitkan

kepercayaan pada perekonomian di masa depan (*Kompas*, 10 Desember 1999).

- (5) Dalam hal ini kita juga belum lupa (*dengan*) apa yang terjadi pada awal Mei tahun lalu, ketika pemerintahan Orde Baru – juga atas saran IMF – “ngotot” menaikkan harga BBM (*Kompas*, 15 Desember 1999).
- (6) (*Pada*) Hari Kamis ini, sesuai dengan hasil Sidang Istbat Departemen Agama, kita memasuki 1 Ramadhan 1420 Hijriah (*Kompas*, 9 Desember 1999).
- (7) Hasil dan laporan penelitian (*dari*) berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan itu memperkuat bukti perihal benarnya gugatan dan tuntutan rakyat Aceh mengenai penderitaannya yang berkepanjangan di masa lampau (*Kompas*, 4 Desember 1999).
- (8) Adakah sesuatu yang lebih mendalam di saat umat Kristen (*di*) seluruh dunia memperingati kelahiran Yesus di Kota Bethlehem itu (*Kompas*, 24 Desember 1999)?
- (9) Mereka memprotes (*tentang*) isinya atau komentarnya atau karikатурnya (*Kompas*, 21 Desember 1999).

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, implikasi hasil penelitian bagi pembelajaran bahasa di SMU, dan saran untuk mengadakan penelitian lanjutan terhadap wacana *Tajuk Rencana* ditinjau dari sudut pandang yang lain, serta saran bagi pembelajaran bahasa di SMU terhadap penelitian lanjutan tersebut. Berikut ini diuraikan subbab-subbab tersebut.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian terhadap wacana *Tajuk Rencana* dari segi struktur wacana yaitu wacana *Tajuk Rencana* mempunyai struktur yang terdiri atas empat bagian, yaitu (1) bagian judul, (2) bagian pembuka, (3) bagian isi, dan (4) bagian penutup. Bagian judul berisi judul wacana yang berfungsi sebagai topik wacana. Bagian pembuka berisi fakta dan penyebabnya yang berfungsi untuk mengarahkan pembaca pada suatu permasalahan. Bagian isi berisi argumen-argumen yang berfungsi untuk menganalisis bagian judul atau topik wacana dan bagian pembuka. Bagian penutup berisi sikap atau pandangan redaksi dan ajakan kepada pembaca. Fungsinya untuk menyatakan sikap atau pandangan redaksi dan ajakan kepada pembaca sesuai dengan judul atau topik wacana.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari jenis kalimat berdasarkan fungsinya, bagian penutup mempunyai

empat variasi, yaitu bagian penutup yang disusun dengan menggunakan (1) kalimat berita, (2) gabungan antara kalimat berita dan kalimat tanya, (3) gabungan antara kalimat berita dan kalimat suruh, dan (4) gabungan antara kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat suruh.

Kesimpulan hasil penelitian terhadap wacana *Tajuk Rencana* dari segi ragam bahasanya, yaitu penggunaan ragam bahasa jurnalistik berdasarkan ciri-ciri linguistis ragam bahasa jurnalistik dikemukakan berikut ini. Pada tataran penulisan (ejaan), ada penghematan atau keekonomisan penulisan (penggunaan ejaan), ada dua judul wacana yang menggunakan kalimat inversif dari 26 judul wacana, dan ada pemilihan penulisan (penggunaan ejaan) yang sesuai dengan ketentuan EYD.

Pada tataran kosa kata dan morfologi, ada campur kode antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Inggris, antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Jawa, dan antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Belanda. Selain itu, juga ada penghilangan awalan yang terdapat pada bagian-bagian wacana.

Berdasarkan sembilan ciri linguistis penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran kosa kata dan morfologi, dapat disimpulkan adanya sembilan ciri berikut ini, yaitu (1) ada penggunaan artikel dan interjeksi; (2) ada penghematan penggunaan kata bantu kata kerja dan kata bantu bilangan penunjuk satuan; (3) ada penghilangan preposisi penghubung kata kerja; (4) ada penghematan penggunaan konjungsi ketergantungan (konjungsi kalimat majemuk); (5) ada penggunaan kata-

kata penat; (6) ada penggunaan kata-kata susastra (dalam penelitian ini disebut kata-kata yang bermakna konotasi); (7) ada penggunaan padanan kata, atau penggantinya (kata ganti orang, atau tunjuk); (8) ada pengungkapan konsep jamak yang menggunakan cara yang paling ekonomis, dan (9) di dalam kepala berita (dalam penelitian ini disebut judul wacana), terdapat penggunaan bentuk kata yang tidak lengkap. Pada tataran sintaktis, ada anak kalimat yang berdiri sendiri yang terdapat pada bagian-bagian wacana; dalam hal kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat, pada judul wacana, dari 26 judul wacana, semuanya menggunakan kalimat yang lengkap fungsi-fungsinya, sedangkan pada bagian-bagian wacana, ada kalimat-kalimat yang tidak lengkap fungsi-fungsinya; dan ada penghematan penggunaan kata fungsi.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, struktur wacana *Tajuk Rencana* terdiri atas bagian judul, bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Penggunaan ragam bahasa jurnalistik berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik dikemukakan berikut ini. Pada tataran penulisan (ejaan), ada penghematan atau keekonomisan penulisan (penggunaan ejaan), ada dua judul wacana yang menggunakan kalimat inversif dari 26 judul wacana, dan ada pemilihan penulisan (penggunaan ejaan) yang sesuai dengan ketentuan EYD.

Pada tataran kosa kata dan morfologi, ada campur kode antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Inggris, antara kosa kata

bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Jawa, dan antara kosa kata bahasa Indonesia dengan kosa kata bahasa Belanda. Selain itu ada penghilangan (keekonomisan) penggunaan kata, yaitu awalan, kata bantu kata kerja, kata bantu bilangan penunjuk satuan, preposisi penghubung kata kerja, dan konjungsi ketergantungan (konjungsi kalimat majemuk); ada penggunaan kata-kata penat; ada penggunaan kata-kata susastra (kata-kata yang bermakna konotasi); ada penggunaan padanan kata, atau penggantinya (kata ganti orang, atau tunjuk); dan ada pengungkapan konsep jamak yang menggunakan cara yang paling ekonomis. Pada tataran sintaktis, ada anak kalimat yang berdiri sendiri yang terdapat pada bagian-bagian wacana; dalam hal kelengkapan fungsi-fungsi kata atau frase dalam kalimat, pada judul wacana, dari 26 judul wacana, semuanya menggunakan kalimat yang lengkap fungsi-fungsinya, sedangkan pada bagian-bagian wacana, ada kalimat-kalimat yang tidak lengkap fungsi-fungsinya; dan ada penghematan penggunaan kata fungsi.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, dapat dikemukakan adanya implikasi hasil penelitian ini terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMU, khususnya pembelajaran wacana dan pembelajaran ragam bahasa. Implikasi terhadap pembelajaran wacana, hasil penelitian ini bermanfaat untuk siswa agar dapat menemukan struktur wacana *Tajuk Rencana*. Hal ini sesuai dengan butir pembelajaran kelas II caturwulan ketiga Kurikulum 1994 sebagai berikut: "Membaca tajuk rencana surat kabar

untuk mengetahui maksud, tujuan, atau pandangan redaksi dan menanggapi (GBPP, 1994: 12)".

Implikasi terhadap pembelajaran ragam bahasa, hasil penelitian ini bermanfaat untuk siswa agar dapat menemukan penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada wacana *Tajuk Rencana*, berdasarkan ciri-ciri linguistik ragam bahasa jurnalistik. Hal ini sesuai dengan butir pembelajaran kelas I caturwulan kedua Kurikulum 1994 sebagai berikut: "Menemukan dan membedakan ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan serta ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi (GBPP, 1994: 8)".

Berdasarkan uraian singkat tentang penggunaan ragam bahasa jurnalistik tersebut, ada penghematan atau keekonomisan penulisan (penggunaan ejaan), ada penghilangan dan penghematan (keekonomisan) penggunaan kata, ada kalimat-kalimat yang tidak lengkap, ada anak kalimat yang berdiri sendiri yang terdapat pada bagian-bagian wacana, dan ada penghematan penggunaan kata fungsi. Berkaitan dengan adanya hal-hal tersebut, guru perlu memberikan pemahaman kepada siswa bahwa adanya hal-hal tersebut mengikuti sifat-sifat khas ragam bahasa jurnalistik, seperti yang dikemukakan oleh Anwar (1991: 1), yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik. Selain itu, adanya hal-hal tersebut juga dapat disebabkan oleh karena, seperti pendapat Soewandi (1995: 349-350, 354), hal-hal berikut ini: kekurang-pahaman penulis akan ketentuan-ketentuan EYD atau fungsi-fungsi kata

atau frase dalam kalimat, kesengajaan yang dilakukan oleh pimpinan surat kabar sebagai salah satu kebijaksanaan dalam penulisan, bertujuan untuk menarik perhatian pembaca atau mengurangi keaburan, atau karena keterbatasan ruang surat kabar.

5.3 Saran

Penelitian terhadap wacana *Tajuk Rencana* dari segi struktural dan ragam bahasanya ini merupakan penelitian yang belum lengkap. Penelitian ini akan lebih lengkap apabila dilanjutkan dengan penelitian dari segi struktur wacana dan penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran sintaktis. Penelitian lanjutan dari segi struktur wacana dianalisis struktur wacananya dengan menggunakan pendapat Bolivar (1994: 280 *via* Subagyo, Tanpa Tahun) tentang struktur wacana editorial berikut ini. Wacana editorial dibangun oleh tiga bagian fundamental, yaitu *lead*, *follow*, dan *valuate* yang masing-masing berwujud kalimat(-kalimat). Ketiga bagian itu membentuk *triad* (tritunggal). *Lead* (pokok) berfungsi untuk mengantar permasalahan, *follow* (lanjutan) berfungsi untuk merespon bagian sebelumnya sekaligus untuk mempertahankan topik, dan *valuate* (penilaian) berfungsi untuk mengemukakan evaluasi terhadap informasi dalam kedua bagian sebelumnya.

Dalam sebuah wacana editorial, dapat ditemukan beberapa *triad* sehingga *triad* dapat dibedakan menurut letak dan fungsinya, yaitu menjadi *Situation* (Situasi), *Development* (Pengembangan), dan *Recommendation* (Rekomendasi). *Triad* dalam *Situation* berada di awal

wacana, dan berfungsi mengacu kepada peristiwa atau persoalan yang sedang menjadi bahan pembicaraan publik. *Triad* pada *Development* hadir di tengah wacana setelah *Situation*, dan berfungsi membangun referensi (sebagai dasar evaluasi). Adapun *Recommendation* terletak di akhir wacana, dan berfungsi untuk mengevaluasi persoalan (Bolivar, 1994: 281 via Subagyo, Tanpa Tahun).

Subagyo (Tanpa Tahun, mengacu pada Bolivar, 1994: 281-282) membuat bagan tentang bagian-bagian sebuah wacana editorial berikut ini.

Struktur Wacana Editorial Menurut Adriana Bolivar

Triad	Turn	Sentence
Situation	Lead	1
	Follow	2
	Valuate	3
Development	Lead	4
	Follow	5
	Valuate	6
Recommendation	Lead	7
	Follow	8
	Valuate	9

Penelitian lanjutan dari segi penggunaan ragam bahasa jurnalistik pada tataran sintaktis, yaitu dianalisis pengurutan atau tempat fungsi-fungsi kalimat dan jenis-jenis kalimatnya, atau pada tataran wacana, yaitu dianalisis kohesi dan koherensinya. Alternatif penelitian lanjutan terhadap wacana *Tajuk Rencana* apabila dianalisis struktur wacana dengan

menggunakan pendapat Bolivar, akan membantu siswa untuk menemukan struktur wacana *Tajuk Rencana* yang lebih lengkap dan lebih terperinci.

Alternatif penelitian lanjutan terhadap wacana *Tajuk Rencana* apabila dianalisis pengurutan atau tempat fungsi-fungsi kalimatnya, akan membantu siswa untuk menemukan Subjek, Predikat, Objek, dan Keterangan, dan menemukan pengurutan (tempat) fungsi-fungsi kalimat. Alternatif penelitian lanjutan terhadap wacana *Tajuk Rencana* apabila dianalisis jenis-jenis kalimatnya, akan menambah wawasan bagi siswa tentang berbagai jenis kalimat dan jenis-jenis kalimat yang paling banyak digunakan dalam wacana *Tajuk Rencana*. Alternatif penelitian lanjutan terhadap wacana *Tajuk Rencana* apabila dianalisis kohesi dan koherensinya, akan membantu siswa untuk memahami kesatuan dan kepaduan wacana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiyah, Sabarti, Maidar G. Arsjad dan Sakura H. Ridwan. 1989. *Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Anwar, H. Rosihan. 1991. *Bahasa Jurnalistik dan Komposisi*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Baryadi, I. Praptomo. 1989. "Salam pembuka komunikasi dalam wacana langsung suatu tinjauan pragmatis". Dalam *Majalah Linguistik Indonesia*. Th. 7. No. 4.
- Brown, Gillian dan George Yule. 1996. *Analisis Wacana*. Diterjemahkan oleh I. Soetikno. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum: Garis-garis Besar Program Pengajaran Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Harjanti, Fransiska Puji. 1995. *Ketidakbakuan Kalimat dalam Artikel Tajuk Rencana Surat Kabar-surat kabar di DIY*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Hoed, B.H. 1983. "Ragam bahasa berita dan cirinya". Dalam Amran Halim dan Yayah B. Lumintintang (Eds.). *Kongres Bahasa Indonesia III* (hlm. 357-371). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hutabarat, Saur dan Susanto Pudjomartono. 1995. "Menukik ke dalam artikel opini". Dalam Ashadi Siregar dan I Made Suarjana (Eds.). *Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini untuk Media Massa* (hlm. 15-23). Yogyakarta: Kanisius.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Moeliono, Anton M. (Ed.). 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 1997. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Naina, Akhmadsyah. 1989. "Analisa isi tajuk rencana". Dalam Don Michael Flournoy (Ed.). *Analisa Isi Surat Kabar-surat kabar Indonesia*. (hlm.

120-150). Diterjemahkan oleh Akhmadsyah Naina. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pedoman Penulisan Skripsi. 1998. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Poerwadarminta, W. J. S. 1967. *Bahasa Indonesia untuk Karang-Mengarang*. Yogyakarta: UP Karyono.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1980. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ramlan, M. 1986. *Sintaksis*. Yogyakarta: CV. Karyono.

Razak, Abdul. 1989. "Analisa kebebasan pers dalam isi tajuk rencana". Dalam Don Michael Flournoy (Ed.). *Analisa Isi Surat Kabar-surat kabar Indonesia* (hlm. 151-181). Diterjemahkan oleh Akhmadsyah Naina. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rini, Alit S. 1995. "Pedoman umum mengelola rubrik opini dari sejumlah redaktur". Dalam Ashadi Siregar dan I Made Suarjana (Eds.). *Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini untuk Media Massa* (hlm. 110-115). Yogyakarta: Kanisius.

Siregar, Ashadi dan I Made Suarjana (Eds.). 1995. *Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.

Siregar, Ras. 1987. *Bahasa Indonesia Jurnalistik: Kerangka Teori Dasar Bahasa Pers*. Jakarta: Pustaka Grafika.

Søewandi, A. M. Slamet. 1996. "Ragam bahasa jurnalistik: apa, mengapa, di mana?". Dalam J. Markiswo dan A. Supratiknya (Eds.). *Romo Kadarman: Kenangan dan Persembahan bagi Prof. Dr. A.M. Kadarman, S.J.* (hlm. 342-369). Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma.

Subagyo, P. Ari. Tanpa Tahun. "Struktur wacana: beberapa pendapat dasar". Bahan Kuliah di Program Studi PBSID, JPBS, FKIP, USD, Yogyakarta.

Swantoro, P. dan Th. Sumartana. 1995. "Artikel opini dalam pers Indonesia". Dalam Ashadi Siregar dan I Made Suarjana (Eds.). *Bagaimana Mempertimbangkan Artikel Opini untuk Media Massa* (hlm. 15-23). Yogyakarta: Kanisius.

Sudaryanto. 1988b. *Metode Linguistik Bagian Kedua: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

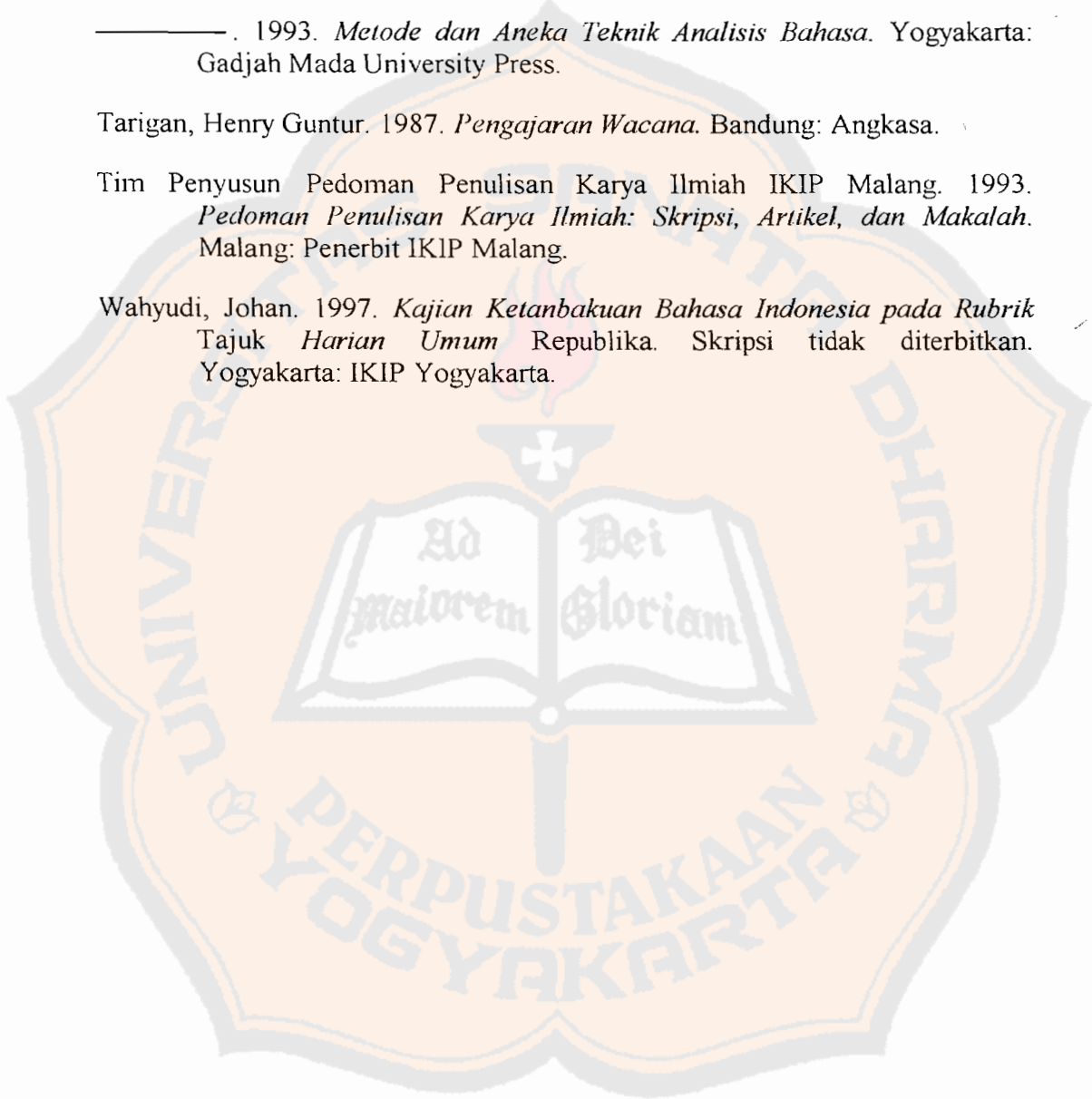
———. 1992. *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

———. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tarigan, Henry Guntur. 1987. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IKIP Malang. 1993. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Artikel, dan Makalah*. Malang: Penerbit IKIP Malang.

Wahyudi, Johan. 1997. *Kajian Ketanbakuan Bahasa Indonesia pada Rubrik Tajuk Harian Umum Republika*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.





LAMPIRAN

Tajuk Rencana

Bila Benar Begitu Duduk Soalnya, Kasus Texmaco Sungguh Dahsyat

PENYELESAIAN hukum kasus Bank Bali belum tuntas, kini mencuat kasus kredit bermasalah bernilai trilyunan rupiah grup perusahaan Texmaco pada sejumlah bank pemerintah, terutama Bank BNI.

Diukur dari jumlah uang, kredit bermasalah kelompok Texmaco jauh melampaui hitungan angka skandal Bank Bali. Menurut keterangan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Laksamana Sukardi, total dana kredit yang sudah dicairkan pada tahun 1997 mencapai 716 juta dollar AS dan Rp 1,473 trilyun.

Kredit yang demikian besar untuk satu kelompok usaha tersebut, diyakini telah melanggar batas maksimum pemberian kredit oleh sebuah bank. Yakni, ketentuan yang membatasi pemberian kredit pada satu kelompok usaha tidak boleh melampaui 20 persen modal bank. Sementara keberadaannya juga terkesan ditutup-tutupi oleh pihak bank, sampai kemudian pers menciumnya.

Selain jumlah uangnya, kasus Texmaco juga tak kalah menariknya dibandingkan kasus Bank Bali. Nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)-nya begitu kental, yang bukan saja melibatkan unsur pengusaha dan bank, melainkan para pemegang kekuasaan.

Termasuk Gubernur Bank Indonesia (waktu itu) J Soedradjad Djiwandono, bahkan Presiden (waktu itu) Soeharto, seperti dikemukakan Menteri Laksamana Sukardi, berada di belakang skandal kredit tersebut. Disposisi Presiden Soeharto-lah yang kemudian telah membuka kemungkinan bagi terjadinya macam-macam penyimpangan peraturan, baik oleh Bank Indonesia maupun bank pemberi kredit.

KITA tahu dan yakin benar, bahwa praktik KKN untuk mengeruk uang bank di masa lalu begitu merajalela. Kalau kita masih ingat kasus Edy Tansil yang sempat menghebohkan, sejak dulu kita percaya, bahwa kasus tersebut sesungguhnya "belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi".

Mengapa sistem perbankan kita hancur sekarang ini, jelas karena lilitan kredit macet bernilai ratusan trilyun rupiah. Dan siapa saja para penikmat kredit itu, tak lain adalah segelintir pengusaha yang dekat dengan para pemegang kekuasaan pada waktu itu.

Meskipun demikian, kita tetap saja merasa kaget ketika kasus Texmaco meledak ke permukaan. Pertama, karena Bank BNI adalah bank yang sudah *go public*, sehingga pada dirinya melekat keharusan untuk melaksanakan *principle of full disclosure*.

Kedua, bank tersebut juga turut dalam program rekapitalisasi. Sehingga semestinya, paling tidak pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahu betul apa isi perut bank BUMN tersebut. Bahkan bila kredit Texmaco itu statusnya sudah menjadi kredit bermasalah, semestinya BPPN-lah yang selanjutnya menangani kredit tersebut.

MESKIPUN kita sudah sangat tahu praktik KKN merajalela, membaca keterangan Menteri Laksamana tetap saja kita tercengang. Kita tetap sulit dapat menerima, kalau praktik penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu sebegitu dahsyat. Bukan saja untuk mencapai maksud tertentu bila perlu mengubah peraturan atau membuat peraturan baru, tetapi melanggar peraturan yang diuatnya sendiri pun bukan tidak mungkin.

Apakah sungguh begitu duduk soalnya, kita masih harus mendengar versi berbagai pihak lain yang terkait dengan permasalahan. Baik itu pihak bank, Texmaco, Bank Indonesia, bahkan pihak yang disebut telah memben disposisi, yakni mantan Presiden Soeharto.

Yang pasti, mengingat begitu rumit tali-temali persoalannya—dan lebih dari itu disebut-sebut melibatkan tokoh sentral Orde Baru yang hingga kini masih memiliki pengaruh besar—jelas mencari upaya penyelesaian atas kasus ini bukan pekerjaan mudah.

Padahal sebaliknya, membiarkan masalahnya terkatung-katung tanpa solusi, bukan saja akan memperpanjang daitar masalah yang bisa menjadi sumber ketidakpastian bagi masa depan bangsa, tetapi juga sangat diyakini akan menambah luka rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian dalam rangka mencari penyelesaian, juga kita harus melihat sisi lain, yakni perasaan rakyat.

Lantas, penyelesaian macam apakah itu? Sejauh menyangkut kredit, mungkin bisa saja misalnya, dilakukan restrukturisasi. Tetapi dengan telah bukanya dugaan unsur tidak wajar dalam proses pemberian kredit, apakah jalan keluar seperti itu akan diterima rakyat sebagai solusi yang *fair*, adil, belum tentu.

Oleh sebab itu, barangkali satu-satunya alternatif tinggallah proses hukum. Kita kembali semuanya ke sana, meskipun untuk itu juga kita yakin jalannya tidak mudah. Hanya tindakan hukum yang segera dan transparan, yang dipercaya akan mampu menjembatani dua kepentingan sekaligus. Yaitu, kepentingan segera menyelesaikan masalah demi menumbuhkan kepastian dan rasa keadilan rakyat.

PENDEKATAN penyelesaian masalah seperti itu, tentu tidak hanya sebatas pada kasus Texmaco. Tetapi juga bagi ratusan perusahaan dan bank yang telah memacetkan kredit ratusan trilyun rupiah yang kini berada di tangan BPPN, sejauh memang mereka diduga telah melakukan praktik bisnis tidak sehat.

Apakah dengan demikian kita berarti ingin menghukum semua orang, atau lebih spesifik lagi semua pengusaha?

Kiranya, tidaklah persis begitu. Selain kita percaya tidak semua orang telah melakukan praktik bisnis tidak sehat di masa lalu, yang pertama-tama kita kehendaki adalah selamatnya uang bank, uang negara, uang rakyat. Bersamaan dengan itu kita tunjukkan siapa benar siapa salah, tak terkecuali mereka yang pernah dan sedang berkuasa.

Selain cara itu sesuai dengan semangat dasar Gerakan Reformasi, yakni menghapuskan segala bentuk KKN, juga hanya dengan cara itulah pada masa depan bisa tercipta lingkungan usaha yang sehat, bisnis yang sehat, yang bisa menjadi salah satu modal bagi upaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dengan kata lain, dorongan bagi penyelesaian hukum atas kredit bermasalah—jadi bukan hanya kredit Texmaco—janganlah diberi makna sebagai ekspresi dari adanya sikap memusuhi dunia usaha. Justru dalam hal ini, sungguh kita sependapat dengan apa yang disampaikan pengusaha properti, Ir Ciputra beberapa waktu lalu. Bahwa pengusaha jangan dipandang sebagai lawan, tetapi harus dijadikan mitra untuk bersama-sama membangun negara.

Tajuk Rencana

Apa yang Terjadi di Pasar, Akibat Balik dari Harapan Berlebihan

MUNGKIN estimasi dan harapan sebagian kitalah yang terlalu berlebihan dalam menyambut era baru, era pemerintahan baru, sebagai pengganti rezim lama yang telah runtuh diguncang krisis kepercayaan.

Sebagian kita menduga, begitu duet KH Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri tampil ke puncak pemerintahan bermodal legalitas dan legitimasinya, macam-macam persoalan segera bisa diselesaikan. Dengan demikian, kita bisa kembali bekerja dengan tenang, tanpa diganggu rasa takut dan khawatir.

Dugaan lebih bermakna harapan seperti itu masuk akal. Sebab selama menjalani periode transisi, sejak aksi menjatuhkan rezim Orde Baru menguat hingga pelaksanaan Sidang Umum MPR lalu, kita telah mengalami hari-hari dengan cobaan sangat berat. Bukan saja berat karena terpaan krisis ekonomi dahsyat, tetapi sesungguhnya, sebagai anggota masyarakat, bahkan kita telah kehilangan rasa aman.

Dalam kondisi seperti itu, memang kita bisa lupa, bahwa apa yang terjadi hari ini adalah rangkaian dari hari-hari kemarin. Kita lupa, bahwa masa lalu masih akan tetap menyisakan sejumlah masalah yang justru bisa jadi, baru terbuka pada hari ini.

Kasus kredit bermasalah trilyunan rupiah kelompok usaha Texmaco yang baru mencuat satu pekan terakhir, jelas sisa dari ulah rezim lama. Tempur antarwarga bangsa di Ambon, tuntutan merdeka di Aceh dan Irian Jaya, juga merupakan akibat dari akumulasi persoalan lama, atau katakanlah ulah penguasa terdahulu.

KITA ketengahkan hal itu, karena kita merasakan masa bulan madu telah lewat. Bila kita percaya bahwa orang pasar adalah yang paling peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi, maka kita pun bisa menyaksikan bulan madu di pasar tidak terjadi lagi.

Pasar telah kembali kepada realitasnya, tak lagi menggebu-gebu dalam antusiasme tinggi. Bagaimana kita mengartikan kurs rupiah yang kembali melemah hingga Rp 7.400 per dollar AS, atau indeks harga saham yang cenderung terus merosot pekan-pekan terakhir ini?

Apakah harga rupiah seperti itu realistis untuk kondisi kita sekarang? Mungkin saja. Dan kalau begitu adanya, harga rupiah kemarin dulu—ketika pernah menguat sampai level Rp 6.000-an sesaat setelah pemerintahan baru terbentuk—mungkin justru yang tidak riil, karena sebagian didorong oleh harapan yang berlebihan itu.

Pada hari-hari awal pemerintahan baru kita merasakan optimisme besar, bahwa arus modal dari luar negeri segera masuk. Gejalanya pun sudah tampak, yakni pada dinamika pasar uang dan pasar modal. Tetapi hari-hari ini, yang menguat justru suara ragu, bahwa tidak mungkin uang mengalir masuk apabila kita belum mampu menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah besar, apakah itu masalah Aceh, Ambon, skandal Bank Bali, dan kini bertambah lagi dengan kasus Texmaco.

DALAM suasana seperti itu, satu-satunya harapan adalah, kita tidak terombang-ambing dari satu ekstrem ke ekstrem lain. Lebih baik kembali kepada realitas, bahwa benar ada persoalan, tetapi tidak harus tenggelam

oleh persoalan tersebut. Kondisi dan situasi tak boleh berkembang menjadi lebih buruk akibat estimasi buruk yang kita kembangkan sendiri.

Sikap seperti itu menjadi amat penting, mengingat kondisi kita yang sudah sangat parah. Dari sisi ekonomi, ketika jumlah penduduk miskin dan kaum penganggur sudah berlipat-ganda, kita dihadapkan pada realitas, bahkan pemerintah pun sudah tidak memiliki daya yang cukup untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, kekuatan masyarakatlah yang harus tampil untuk memperbaiki keadaan.

Persoalan ini menjadi amat krusial, sebab bila kita berlama-lama berjalan di tempat, bukan tidak mungkin justru muncul masalah baru yang lebih kompleks lagi.

Dalam kaitan itulah misalnya, kita ikut menggarisbawahi ajakan Presiden Gus Dur pada saat bertatap muka dengan para investor asing hari Selasa (30/11), agar para investor segera melakukan investasi, tanpa harus menunggu selesainya berbagai konflik. Tanpa mengurangi pemahaman bahwa investasi membutuhkan ruang yang aman—bahkan untuk jangka panjang—selain iklim yang kondusif, sebaliknya kita juga menyadari, kemandekan ekonomi yang berkepanjangan justru bisa memperparah kondisi stabilitas.

ADAKAH argumen yang mendukung kita untuk bersikap optimis? Tentu kita tak bisa hanya bersandar pada kenyataan, bahwa pemerintah sekarang adalah pemerintahan berlegitimasi. Kita juga tak bisa sekadar berharap pada luasnya basis dukungan pasangan Gus Dur-Mega.

Lepas dari urusan politik dan perpolitikan bukanlah hitungan matematis dua tambah dua sama dengan empat, hal pertama-tama yang harus menguatkan kita adalah tekad bersama untuk menyelesaikan apa pun masalah. Lebih dari itu, kita sudah siap untuk melaksanakan hidup bermegara secara lebih beradab. Dalam perspektif itu Gus Dur-Mega ibaratnya lokomotif yang akan membawa kita pada arah tujuan.

Masalahnya, sungguh berliku jalan yang harus ditempuh, karena memang, sekaranglah masa transisi yang sesungguhnya. Dihadapkan pada kondisi itu, sikap sabar dan realistis akan ikut menentukan rupa wajah kita pada hari-hari mendatang.

Lagi pula, mana mungkin masalah yang tumpuk-menumpuk seperti itu akan dapat diselesaikan dalam masa kerja pemerintahan baru yang baru satu bulan?

ATAU, sangat boleh jadi harapan kita pun tidak setinggi itu. Ketika kita bersikap obyektif, gugatan kita sebatas pada seperti apakah rencana atau jalan yang hendak ditempuh untuk bisa sampai pada tujuan bersama. Apa rencananya, bagaimana prioritasnya, kondisi-kondisi apa saja yang akan dan harus dipersiapkan.

Adalah kewajiban pemerintah untuk menjelaskannya. Sebab kalau hendak jujur berkata, kecuali arah tujuannya, hal-hal menyangkut cara dan prioritas pekerjaan yang harus dilakukan belum banyak kita dengar. Atau kalau pun sudah pernah disampaikan, sangat boleh jadi harus terus diulang-ulang, karena dalam kondisi kita sekarang, mata-hati-telinga rakyat terlalu banyak dijejali persoalan.

Tajuk Rencana

Kita Kembangkan Hubungan Baik dengan RRC demi Kemaslahatan Bersama

SELAMA tiga hari mulai Rabu (1/12) Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengadakan kunjungan kenegaraan resmi ke RRC. Selama lima pekan menjabat presiden, Gus Dur sudah mengunjungi 13 negara, tetapi baru kali ini kunjungan bersifat resmi kenegaraan. Melihat kenyataan itu, mitranya, tuan rumah Presiden Jiang Zemin menyatakan penghargayannya. Hal itu, menurut pemimpin RRC, memperlihatkan bagaimana Indonesia menilai penting hubungannya dengan RRC.

Kenyataannya, bahkan negara-negara besar, hingga AS pun, tak bisa lain selain memberi perhatian khusus terhadap RRC. Sosok negara di Asia Timur ini memang unik. Dengan penduduk 1,2 milyar jiwa atau seperlima penduduk dunia, dengan pertumbuhan sempat mencapai 10 persen per tahun, RRC adalah potensi yang menggemparkan.

Baru saja memperingati setengah abad keahirannya Oktober silam, RRC tahun ini mencatat sejumlah perkembangan penting. Beberapa pekan silam mereka telah mencapai persetujuan dengan AS berkaitan dengan lamarannya menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lalu dua pekan lalu, untuk pertama kalinya mereka berhasil meluncurkan wahana antariksa tak berawak sebagai tahapan untuk meluncurkan antariksawan yang pertama. Lalu pada bulan ini juga akan menerima penyerahan kembali Macau dari Portugal.

Dengan pencapaian yang diraihinya selama beberapa tahun terakhir, RRC memang makin percaya diri dalam kancah pergaulan internasional. Bila 10 tahun silam citranya anjlok akibat aksi penumpasan gerakan pro-demokrasi di Lapangan Tiananmen, kini—meski tuduhan pelanggaran hak asasi manusia masih acap dilontarkan terhadap dirinya—RRC makin mampu berdiri gagah tidak saja di kawasan Asia, bahkan ketika berhadapan dengan adidaya AS sekalipun.

RRC seperti itulah yang secara geopolitik dan geostrategi harus dihadapi oleh negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

SEJAUH menyangkut hubungan RI-RRC, sejarah mencatat periode naik-turunnya hubungan itu. Di masa periode paruh pertama 1960-an kedua negara sempat demikian dekat, sampai muncul istilah Poros Jakarta-Peking. Periode ini berakhir menyusul terjadinya Peristiwa G30S/PKI, dimana RRC dituduh terlibat. Meski RRC membantah hal itu, hubungan kedua negara pun putus tahun 1967.

Putusnya hubungan ini selama masa Orde Baru telah menjungkir-balikkan paradigma tentang RRC. Negara Tirai Bambu ini bahkan sempat dianggap lebih berbahaya dibandingkan Vietnam selama konflik Kamboja di dekade 1980-an. Karena RRC masih tetap menganut sistem komunis, dan selama Orde Baru komunis dianggap sebagai satu hal yang secara politis paling dinistakan, maka upaya memperbaiki hubungan kedua negara pun sulit dibuka kembali.

Akan tetapi, di RRC sendiri lalu muncul figur pembaharu, dalam hal ini Deng Xiaoping yang pada tahun 1979 melancarkan program modernisasi Cina. Semenjak itu RRC seperti ditransformasi secara radikal. Meski secara politik ideologi yang dianut masih komunis, tetapi dalam hal ekonomi kapitalisme yang dipraktikkan. Hal ini melahirkan pengaruh yang besar dalam perkembangan sosial kemasyarakatan di RRC.

Lalu ada pula figur seperti Qian Qichen yang dianggap sebagai arsitek bagi pulihnya hubungan RI-RRC. Akhirnya pada tahun 1990 hubungan yang beku selama 23 tahun itu pun dipulihkan.

NAMUN pulihnya hubungan tersebut, tidak serta-merta disertai dengan

meningkatnya keakraban. Aksara Cina tetap dilarang, sebutan "Cina" masih resmi meski banyak orang Cina keberatan dengan sebutan itu. Apa yang terjadi di dalam negeri Indonesia sendiri tidak mendukung bagi berkembangnya hubungan tulus kedua negara.

Alasannya macam-macam. Misalnya, etnik Tionghoa yang jumlahnya sekitar tiga persen dari total penduduk Indonesia ternyata menguasai sebagian besar aset ekonomi nasional. Masyarakat Indonesia melihat dengan geram bagaimana pengusaha Tionghoa berkolusi dengan pejabat pemerintah Orde Baru tanpa bisa protes apa-apa. Sering dengan itu, yang terlihat adalah sebagian besar warga etnik Tionghoa hidup berkelimpahan, sementara warga asli secara umum tertinggal.

Sementara pengusaha Tionghoa banyak dijadikan sapi perah penguasa Orde Baru, rezim ini juga menerapkan diskriminasi nyata. Etnik Tionghoa tak diberi peluang berkarier di lingkungan birokrasi, mereka dipersulit dalam pengurusan identitas kewarganegaraan.

Semua itu menghasilkan hubungan yang tak merasuk ke hati. Suasana tak harmonis terus berkembang. Lalu ketika Indonesia dilanda krisis, persemaian benih kebencian pun meledak dalam kerusuhan Mei 1998 yang di antaranya dilampiaskan terhadap etnik Tionghoa.

ITULAH sekilas apa yang terjadi di hari kemarin. Rabu lalu Gus Dur disambut dengan karpet merah dan dentuman meriam. RI dan RRC sepakat menyongsong era baru dalam hubungan bilateralnya.

Seperti kita baca kemarin, kedua negara sepakat agar hubungan kedua negara tidak boleh dirusakkan oleh sentimen etnik. Gus Dur meyakinkan pada tuan rumah bahwa mungkin ada saja di antara masyarakat Indonesia yang memendam sentimen semacam itu, tetapi hal itu bukan merupakan sikap mayoritas rakyat Indonesia dan pemerintah sendiri tidak menjalankan kebijakan seperti itu. Jadi Presiden RI mengharapkan, jangan sampai hubungan rusak karena di RRC ada persepsi Indonesia menerapkan diskriminasi terhadap etnik Tionghoa.

Kita pun sepakat bahwa hubungan dengan RRC bersifat strategis. Dengan memiliki hubungan tulus dengan RRC, RI tentu bisa menjadi mitra yang dipercaya, misalnya dalam upaya menengahi tumpang tindih klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Selain itu, walaupun di antara kedua negara ada masalah garis batas teritorial di sekitar Natuna, hal ini akan lebih mudah dibicarakan.

Khususnya ketika Indonesia tengah berkutat mengatasi krisis ekonomi, adanya hubungan baik dengan RRC kiranya bisa mempermudah usaha menumbuhkan kepercayaan di kalangan pengusaha etnik Tionghoa yang tersebar di wilayah Asia maupun dunia lain untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

Lalu sebagai sesama negara yang dalam banyak hal juga masih tergolong berkembang, masih banyak yang bisa dijadikan bahan kerja sama dengan prinsip saling tukar-menukar pengalaman, misalnya dalam pengembangan iptek, atau dalam industri kecil dan menengah.

Jangan pula diupakan, ketika RI dilanda berbagai aktivitas bersifat disintegrasi, adanya dukungan RRC bagi RI untuk terus bisa mempertahankan integritas wilayahnya merupakan kontribusi penting.

KITA yakin, dalam kerangka kerja itulah Presiden Gus Dur mengadakan kunjungan kenegaraan pertamanya ke RRC. Dengan prinsip saling menghormati, RI-RRC dapat mengembangkan hubungan baik demi kemaslahatan bersama.

Tajuk Rencana

Persoalan Aceh adalah Persoalan Bangsa dan Negara Indonesia

HARI ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka diperingati hari ini, 4 Desember. Tibanya hari itu tidak lagi disembunyikan atau ditutup-tutupi. Tanggal 4 Desember justru diantisipasi. Akan terjadi apa pada hari itu? Semua pihak mengharapkan dan mengupayakan, hari itu berlangsung secara damai, meskipun para pengungsi berbondong-bondong meninggalkan Aceh.

Masuk akal, sepatutnya dan adil, apabila rakyat Aceh terus-menerus mempersoalkan, menggugat dan minta keadilan terhadap penderitaan dan ketidakadilan dalam berbagai bentuk yang dialaminya selama tahun amat panjang di masa lalu. Tuntutan itu ber klimaks pada tuntutan referendum.

Akan tetapi, berguna pula kiranya, jika rakyat Aceh dan kita yang mendukung tuntutan itu bisa juga melihat perubahan besar yang sedang terjadi. Tanpa perubahan besar yang berarah demokrasi, penkemanusiaan, hak-hak asasi dan keadilan, mana mungkin hari ulang tahun GAM diperingati secara terbuka.

Tidak akan mungkin pula gerakan yang ber klimaks pada tuntutan referendum dilakukan secara terbuka dan damai, jika perubahan ke arah koreksi dan perbaikan tidak sedang berlangsung secara sungguh-sungguh.

BERKAT sedang dan telah terjadinya perubahan besar itu, bentuk dan praktik-praktik kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa rakyat Aceh di masa lampau dan selama itu bisa ditutup-tutupi, kini dapat diungkapkan secara faktual dan terbuka.

Berbagai misi pencari fakta melakukan penyelidikan di lokasi-lokasi. Pencarian fakta dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, juga oleh lembaga hak-hak asasi manusia. Lapornya diproses dan diumumkan secara terbuka.

Hasil dan laporan penelitian berbagai lembaga dan organisasi kemasyarakatan itu memperkuat bukti perihal benarnya gugatan dan tuntutan rakyat Aceh mengenai penderitaannya yang berkepanjangan di masa lampau.

Tuntutan untuk melakukan referendum mempunyai justifikasi. Demikian pula tuntutan tentang diadilinya para pelaku represi, tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Tuntutan lain seperti perimbangan keuangan dan lain-lain semakin mendesak untuk dilaksanakan.

TANGGAPAN masyarakat dan rakyat Indonesia di luar Aceh positif. Di samping responsif, positif dan mendukung, semakin kuatlah kesadaran dan pemahaman, bahwa persoalan rakyat Aceh adalah persoalan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia.

Kesadaran dan pemahaman itu diperkuat oleh terjadi dan terungkapnya pengalaman yang sama di berbagai daerah lain. Penderitaan di masa lalu oleh rezim lama kini terungkap secara terbuka. Tuntutan dan gerakan protes akan koreksi dan tindakan secara adil berkat perubahan, sebut saja, reformasi, dilakukan secara terbuka. Ibaratnya seperti sedang terjadi titik balik. Secara terbuka, rakyat dan gerakannya yang aktif, aparat cenderung mengambil sikap tahu diri.

PERSEPSI dan rasa-perasaan bangsa Indonesia bahwa persoalan Aceh adalah persoalan seluruh bangsa, dan negara, membenarkan du-

kungan kuat bagi tuntutan rakyat Aceh. Persepsi dan rasa-perasaan itu juga membawa implikasi dan konsekuensi.

Misalnya, apa yang terjadi di Aceh dan segalauntutannya kait-mengkait dan berpengaruh terhadap keadaan seluruh bangsa dan negara. Karena itu baik oleh rasa senasib sepenanggungan maupun oleh pengaruh dan akibatnya yang kait-mengkait, jalan dan cara untuk memenuhi tuntutan rakyat Aceh perlu juga dibicarakan bersama.

Apakah ilustrasi dari implikasi tuntutan rakyat Aceh yang akan mempengaruhi nasib seluruh bangsa dan negara Indonesia? Jika misalnya Aceh merdeka memisahkan diri dari bangsa dan negara Republik Indonesia, seberapa jauh hal itu tidak akan berefek domino terhadap daerah-daerah lain seperti Irian Jaya, Maluku, Riau.

Sekali efek domino itu terjadi, apakah masih ada bangsa dan negara Indonesia. Bukan itu saja. Belajar dan pengalaman negara-negara Balkan dan Uni Soviet, alangkah berkepanjangan remuk redam desintegrasi bangsa dan negara itu, sehingga bisa-bisa akhirnya semua surut.

Lingkungan geopolitik dan lingkungan global seberapa jauh akan memberi tempat kepada proses desintegrasi bangsa dan negara besar lagi berkepulauan dan berselat banyak seperti Indonesia?

APAKAH gambaran itu cukup kuat sebagai argumen, bahwa masalah Aceh ialah masalah seluruh bangsa dan negara Indonesia. Bahwa masalah Aceh karena itu perlu kita carikan pemecahan bersama.

Ada tambahan argumen yang sangat substansial. Seperti kita kemukakan di atas, kita sebagai bangsa dan negara sedang mengalami perubahan besar. Kita sebagai bangsa dan negara menghendaki perubahan besar itu. Dari penderitaan, represi, ketidakadilan dan kegagalan-kegagalan di masa lalu, kita melakukan koreksi, kita banting setir.

Perubahan itu bukan asal perubahan. Perubahan itu disertai referensi dan pembentukan paradigma dan tatanan baru yang pro-penkemanusiaan dan hak-hak asasi, yang pro-aspirasi dan ekspresi rakyat, seluruh rakyat, rakyat di daerah-daerah.

Sedang dikoreksi dan sedang kita bangun bersama pada kerangka dasar serta pada nilai-nilai dasar apakah, bangsa dan negara Indonesia akan kita tagakkan dari puing-puing krisis dan pengalaman masa lampau. Arah kuat misalnya memberikan hak dan tempat yang seluas-luasnya kepada rakyat di daerah dalam tatanan politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain.

Dalam upaya itu, sejarah dan karakteristik masing-masing daerah, masuk akal, jika akan ikut memberikan watak serta sosok kepada Indonesia baru itu.

Dalam gelombang perubahan yang maju itu, tidakkah betapa pun sahnya tuntutan rakyat Aceh, masyarakat Aceh juga akan ikut memberikan kontribusi kepada pemecahan masalah dan pembangunan format baru bangsa dan negara Indonesia. Perkembangan keadaan adalah sedemikian rupa, sehingga tidak ada tempat untuk sekadar dalih basabasi.

PENDAPAT yang kita kemukakan karena itu bukanlah dalih basabasi, tetapi keluar dari itikad dan komitmen bersama bagaimana menjawab permasalahan, tantangan dan tuntutan zaman bagi rakyat Aceh, sekaligus bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.

Tajuk Rencana

Kita Bertanya, Komitmen Memberantas dan Menindak KKN Dilanjutkan atau Tidak!

KASUS Bank Bali menggemparkan. Kini, kasus pemberian kredit hampir Rp 10 triliun kepada perusahaan Texmaco, lebih seru. Masih akan menyusul kasus-kasus lain.

Kasus Bank Bali melibatkan uang negara (baca: uang rakyat) hampir Rp 1 triliun. Kasus kredit Texmaco mengulurkan kredit hampir Rp 10 triliun. Kasus Bank Bali gempar karena dilakukan dalam pemerintahan reformasi.

Memberantas dan menindak KKN termasuk agenda pokok reformasi. Mantan Presiden Soeharto surut karena KKN. Amatlah ironis, bahwa pemerintahan reformasi mengulangi lagi praktik KKN. Kapan kita belajar. Kapan kita jera.

Kasus Texmaco terjadi dalam pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Kredit mengucur ketika Indonesia sudah dilanda krisis ekonomi. Kasus Texmaco riu rendah karena jumlahnya yang besar, hampir Rp 10 triliun. Juga karena pemberian kredit oleh Bank Indonesia disertai disposisi Presiden Soeharto.

SUDAH sejak kasus Bank Bali, sejak berbagai isu KKN lain dan kini dengan terkuaknya kasus kredit besar kepada Texmaco, muncul pertanyaan dan keraguan pada banyak kalangan, yakni pemberantasan dan penindakan terhadap KKN akan dilanjutkan atau pudar dan surut di tengah jalan.

Beberapa faktor menjadi penyebab timbulnya keraguan dan pertanyaan itu. Yang satu belum selesai ditangani sudah tampil kasus lain. Proses hukum makan waktu, padahal seperti halnya dalam kasus politik, masyarakat tidak sabar.

Keraguan dan pertanyaan bukan hanya disebabkan oleh jumlah dan skala kasus KKN yang harus dihadapi oleh pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Keraguan dan pertanyaan, lebih-lebih lagi muncul karena semua mulai tampak lagi penyakit kita selama ini.

Sejauh KKN merupakan perjuangan secara umum dan abstrak, oke-oke saja. Semua kita setuju. Begitu KKN menjadi kasus-kasus nyata, terbuka, dan diproses secara hukum, pendapat dan sikap terbelah.

Orang akan lihat-lihat dulu siapa yang disangka melakukan dan siapa-siapa yang kiranya akan terlibat? Terhadap kasus-kasus KKN secara konkret, komitmen reformasi tidak lagi seia sekata.

Sudah mulai kita dengar berbagai tanggapan seperti: ah itu bermotif politik di belakangnya. Sengaja akan mengnabisi. Ada konspirasi di belakangnya. Bahkan tokoh-tokoh yang vokal terhadap reformasi anti-KKN, bila dihadapkan pada kasus-kasus konkret, berubah nada suaranya.

Perkembangan semacam itu bisa saja ditafsirkan sebagai wajar. Tetapi betapapun masuk akal, cainya komitmen terhadap pergulatan memberantas dan menindak KKN, merupakan perkembangan yang mencemaskan. Dari pengalaman masa lampau, sikap subyektif dan pilih-pilih bulu itu merupakan salah satu sebab suburnya praktik KKN.

Pertimbangan-pertimbangan politik seperti yang sudah mulai terdengar sekarang ini juga menjadi salah satu sebab, mengapa praktik KKN, salah guna kekuasaan, wewenang dan kesempatan begitu meluas dan mendalam di negeri kita.

PEMBERANTASAN dan penindakan secara hukum terhadap KKN sudah menjadi komitmen kita, terutama komitmen gerakan reformasi serta para eksponennya. Segala sesuatu dicatat, dirékam, didokumentasikan. Segala sesuatu terbuka.

Ya, keterbukaan atau transparansi, itulah faktor lain yang begitu sentral dan berdampak besar, dan karena itu, janganlah kita alpaikan. Dalam pemerintahan masa lalu, segala sesuatu secara relatif efektif dapat diatur dan dikendalikan publisitasnya.

Kini, berkat reformasi prodemokrasi dan proketerbukaan serta kemerdekaan informasi, segala sesuatu menjadi terbuka. Dulu kasus seperti Bank Bali dapat ditutupi. Bahkan kasus Texmaco baru sekarang terungkap. Belum terungkap misalnya dalam pemerintahan Presiden Habibie.

Memang orang sudah dengar dan melihat tanda dan isyaratnya, tetapi kondisi keterbukaan dan demokrasi prokemerdakaan informasi belum-lah sedemikian rupa, sehingga orang tidak memaparkannya secara terbuka.

Apa efek dari keterbukaan dan publikasi itu? Mau tidak mau memunculkan dorongan untuk menindaklanjuti secara hukum kasus yang terbuka. Jika tidak ada tindak lanjut secara adil dan benar sesuai asas dan proses hukum, kekecewaan masyarakat akan kembali merajalela. Krisis kepercayaan dan wibawa akan terulang lagi.

BENAR, adakalanya kita mendua. Taruhlah kasus Texmaco itu. Sosok perusahaannya begitu impresif, tumbuh dari kecil. Pimpinannya bijak dan luas komunikasinya. Belum lagi nilai asetnya, nilai ekspornya, jumlah karyawan.

Bukan hanya Texmaco yang bersosok perusahaan dan manajemen seperti itu. Beberapa bahkan lebih banyak lagi, sosok perusahaan semacam itu. Itu barulah sisi sebelah wajahnya.

Ada sisi lain. Secara ekstrem dan secara dramatis sisi wajah yang lain itu adalah bagaimana perusahaan-perusahaan itu, termasuk bank-banknya justru dinilai ikut menyebabkan timbulnya krisis ekonomi Indonesia.

Gradasinya macam-macam. Ada yang mungkin lebih menjadi korban situasi. Ada yang karena melakukan praktik KKN ikut menjadi pemicu krisis. Utang luar negeri dan dalam negeri berlebihan.

Untuk menyelamatkan perusahaannya, menempuh atau merasa terpaksa menempuh praktik KKN dalam skala besar-besaran. Praktik KKN berimplikasi semakin merusak mental pejabat, semakin mengangakan kesenjangan dan ketidakadilan sosial.

Dan jika perusahaannya *toh* tutup juga, berarti menimbulkan pengangguran. Belum lagi data yang kita peroleh, betapa krisis ekonomi yang antara lain bersumber pokok pada KKN, membuat penghasilan rakyat turun, penduduk miskin melonjak lagi dan anak-anak terancam menjadi *generasi hilang*.

SEKURANG-kurangnya sekadar sebagai bahan perbandingan dan bahan mempertanyakan dan menggugat, acapkali kita bertanya, praktik KKN yang melibatkan pejabat dan pengusaha, tidakkah akhirnya juga melanggar perkemusiaan dan hak-hak asasi manusia?

Ternyata refleksi diri itu sejalan dengan pendapat diskusi tentang Hak Hak Asasi kemarin ini. Diskusi itu sampai pada kesimpulan, bukan hanya tindakan politik dan tindakan kekerasan yang melanggar HAM. Tindakan ekonomi, tindakan sosial dan lain-lain, juga dapat melanggar Hak Asasi Manusia.

MAKA, janganlah kendur komitmen kita memberantas dan menindak KKN. Komitmen barulah menjadi komitmen yang terlaksana secara efektif, jika komitmen disertai konsistensi. Bukan komitmen namanya, jika tanpa konsistensi.

Tajuk Rencana

Kini Tiba Saatnya Pemerintahan Gus Dur Menangani Aceh dan Maluku

BELUM selesai melaporkan peringatan ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka, yang damai tetapi *toh* disertai dua korban tertembak dan satu tewas, kita dihadapkan pada pertikaian di Maluku. Bom meledak lagi di Kota Ambon, Sabtu malam. Bentrokan bermuatan agama di Seram minta korban 42 orang tewas.

Konflik di Ambon hampir setahun. Korban tewas 657, luka-berat-ringan 1.593, aparat yang tewas 14, luka berat-ringan 82. Pelajar-mahasiswa mengeluh karena terganggu dan terputus sekolah dan kuliahnya. Setiap kali reda, setiap kali meledak lagi konflik di daerah Maluku. Lokasinya semakin meluas. Konflik itu berlangsung hampir setahun.

Kita mengecam, menyelesaikan bahkan minta pertanggungjawaban hukum atas korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi di masa lampau. Kita tidak bisa lain kecuali juga amat sangat prihatin dan menyelesaikan terus-menerus jatuhnya korban di Ambon dan di Aceh.

Betapapun eforia demokrasi membawa kita ke kondisi riuh rendah serba bersuara dan berteriak, jatuhnya korban di Ambon dan di tempat lain tidak boleh dan tidak bisa kita anggap sebagai peristiwa rutin.

Apalagi ini menjelang ibadah Puasa, Idul Fitri dan Natal, marilah kita hentakkan kesadaran, setia kawan serta kemauan kita untuk menangani dan menyelesaikan konflik-konflik itu.

DARI mana mulai, menghadapi konflik di Maluku yang semakin bermuatan SARA dan kini bukan lagi antar-etnis, tetapi antar-agama? Sungguh pekerjaan sangat muskil. Beberapa sumber yang mempunyai pemahaman cukup mendalam tentang masyarakat Maluku, mulai geleng-geleng kepala, bagaimana tindak kekerasan antarkelompok agama itu bisa berlangsung. Sepertinya tidak lagi bisa mendengar suara dan ajakan akal sehat, suara hati hening dari pihak mana pun.

Kita, masyarakat, para pemuka masyarakat dan agama, pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, tidak boleh tinggal diam dan menyerah. Kita mulai dengan tidak saling menyalahkan dan melemparkan tanggung jawab. Saling pengertian dan kebersamaan semua pihak, jelas merupakan modal dan syarat untuk mengatasi konflik.

Pendekatannya serentak dan simultan. Diupayakan secara maksimal, pendekatan damai, persuasi, akal sehat dan suara hati. Mobilisasi siapa pun yang kiranya masih mempunyai kewibawaan dan kredibilitas terhadap penduduk dan komunitas yang berseteru.

Jika untuk sementara diperlukan separasi secara fisik, apa boleh buat, barangkali harus dilakukan. Jika akhirnya kehadiran aparat keamanan dapat membantu dan menengahi konflik kekerasan secara fisik, langkah itu juga harus diambil.

Kasus Maluku berbeda dengan persoalan Aceh. Persamaannya ada pula. Kedua kasus merupakan resultat dari akumulasi permasalahan yang berlangsung lama dan tidak terjaring oleh sistem politik dan pemerintahan kita di masa lalu.

Sering kita dengar, adanya pihak atau orang yang *main* atau memancing di air keruh Maluku. Isu-isu seperti itu, mengapa tidak dapat dibuat jelas secara faktual atau indikator-indikator lain oleh perangkat dan aparat keamanan kita?

KECUALI dari segi akumulasi, kasus Ambon dan Aceh menunjukkan persamaan, bahwa keduanya meledak karena atau bersamaan dengan terjadinya perubahan besar di Indonesia.

Perubahan besar itu digerakkan oleh reformasi prodemokrasi, pro-hak asasi, pro-ekspresi dan aspirasi rakyat di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah. Sedang digugat oleh perubahan itu sentralisasi pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Oleh Sidang Umum MPR bulan Oktober yang lalu, diambil keputusan dan ketetapan yang mengoreksi ketidakseimbangan dan ketidakadilan sistem lama, misalnya menjadi otonomi luas yang menghormati kekhasan daerah-daerah, di samping mengoreksi imbang pembagian penghasilan.

Perubahan yang sedang kita lakukan adalah sedemikian rupa, sehingga peringatan ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka, dihadiri oleh ratusan wartawan dalam dan luar negeri serta disiarkan secara bebas dan terbuka.

BERULANGKALI, konteks perubahan besar itu kita kemukakan. Sebab, bukankah akan membantu usaha kita menghadapi serta memecahkan kasus-kasus Aceh, Ambon, Irian Jaya dan daerah-daerah lain itu, apabila semua pihak menyadari dan memahami konteks perubahan besar itu.

Perubahan besar itu prodemokrasi, artinya pro-aspirasi dan partisipasi rakyat. Perubahan besar itu pro-otonomi luas, bahkan tidak lagi tabu berwacana tentang kemungkinan bentuk negara federal.

Perubahan besar itu menghasilkan pemerintahan nasional yang dipilih secara demokratis dan kebetulan juga merupakan figur yang memahami aspirasi daerah dan memahami perubahan besar yang sedang terjadi di negeri kita.

Karena itu, mengapa aspirasi, gerakan dan tuntutan daerah-daerah itu tidak pula memberi peluang bagi penyelesaian masalah kita bersama dalam konteks perubahan besar, arah, semangat, serta prinsip-prinsip yang kita kembangkan bersama.

MAU tidak mau, adalah Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Wapres Megawati Soekarnoputri yang harus mengambil prakarsa. Tokoh-tokoh yang ikut terlibat dalam penyusunan Kabinet duduk serta bersama-sama. Tokoh-tokoh itu juga Ketua lembaga negara, MPR, DPR, dan perlu diajak serta pimpinan TNI.

Kasus Aceh, kasus Ambon, kasus Irian Jaya, dan daerah-daerah lain merupakan persoalan yang berdimensi ganda: ia kasus daerah, sekaligus ia kasus seluruh bangsa dan negara Indonesia, persoalan-persoalan daerah itu sekaligus juga persoalan nasional.

Muhibah Gus Dur ke manca negara, Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Serikat, dan RRC, menghasilkan pengertian, itikad baik bahkan dukungan terhadap proses demokratisasi serta keutuhan teritorial negara Republik Indonesia.

Kini tibalah saat yang mendesak untuk mengkonsentrasikan seluruh pemikiran, pendekatan dan usaha untuk menangani serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa dan negara. Tidak bisa lain, kecuali dengan semangat serta kerangka acuan yang sesuai dengan tuntutan reformasi.

PEMERINTAH bertugas mengambil prakarsa. Tetapi, persoalan-persoalan itu adalah persoalan kita bersama. Kita terlibat untuk memberikan kontribusi dan partisipasi secara kritis-korektif.

Tajuk Rencana

Akhirnya Jaksa Agung Mencabut SP3 Mantan Presiden Soeharto

JAKSA Agung Marzuki Darusman mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara mantan Presiden Soeharto. Dalam surat keputusannya, Jaksa Agung menerangkan, pencabutan SP3 dilakukan karena ada hal-hal baru, yang menyebabkan perkara mantan Presiden harus dibuka lagi.

Hal-hal baru yang disebutkan ialah penerbitan sejumlah Surat Keputusan Presiden dan sejumlah Peraturan Pemerintah yang mengindikasikan adanya kaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

BAGAIMANA kiranya tanggapan orang terhadap keputusan Jaksa Agung itu? Tanggapan itu, barangkali campur. Kita berpendapat, apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung merupakan hal yang sudah seharusnya jika dipakai ukuran keadilan.

Sebaliknya, mungkin juga ada yang berpandangan, kenapa Jaksa Agung memperpanjang masalah. Pejabat sebelumnya telah menerbitkan SP3 terhadap mantan Presiden Soeharto.

Memang SP3 yang diambil secara buru-buru untuk mengejar pemilihan presiden pada bulan Oktober lalu, banyak diprotes karena dinilai tidak adil. Tetapi bukankah protes itu lambat laun reda atau akan reda. Dengan demikian, masalah besar yang rumit itu, selesai dan surut di makan waktu.

Kini, mau tidak mau, persoalan serba rumit yang menyangkut indikasi dan sangkaan terhadap mantan Presiden, dibuka lagi. Bukankah dengan keputusan itu, pemerintah Presiden KH Abdurrahman Wahid, ibarat menambah pekerjaan rumah yang sudah begitu menggunggung?

PADA kita, kecenderungan untuk berpendapat seperti di atas, ada pula. Tetapi, kita tidak berhenti di situ. Kita berpikir, berdialog dan beradu argumen lebih lanjut dan lebih serius.

Benar, kasus KKN yang disangkakan terhadap mantan Presiden Soeharto sejak semula merupakan persoalan pelik. Itulah sebabnya pemerintahan Presiden Habibie menunda dan mengulur waktu sampai akhirnya ia *toh* harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR dan kasus pelik itu diputus dengan menerbitkan SP3.

Benar pula, kasus mantan Presiden bukan hanya rumit, tetapi juga serius dan menjadi salah satu agenda sentral tuntutan reformasi. Kasus itu demikian serius dan sentralnya, sehingga dicantumkan dalam Ketetapan MPR untuk ditindaklanjuti.

Substansi persoalannya juga sentral karena menyangkut substansi keadilan dan kebenaran yang merupakan substansi asas hukum. Omong kosong asas dan supremasi hukum, jika hanya menyentuh kulitnya, yakni prosedur serta teknisitasnya, tanpa memegang substansinya yakni kebenaran dan keadilan.

OLEH sidang MPR bulan Oktober 1999, secara implisit SP3 tentang mantan Presiden Soeharto ditolak, yakni ketika MPR dengan suara mayoritas tidak bisa menerima pertanggungjawaban Presiden Habibie.

Dari ekspresi aspirasi dan tuntutan yang setiap kali, terus-menerus, dikumandangkan oleh aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, kita memperoleh kesimpulan, SP3 itu dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

Dan jika kita mencoba mendengarkan pertimbangan akal sehat serta suara hati kita, kita pun kiranya juga sampai pada kesimpulan yang sama. Sulit untuk mengatakan, mantan Presiden Soeharto tidak terlibat KKN.

Memang persoalannya tidak sederhana. Kita hidup dalam kultur kekuasaan dan dalam hubungan rakyat-penguasa yang sulit menerima konsekuensi secara konsisten dari prinsip semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

Mantan Presiden Soeharto, kecuali kesalahan dan kealpaan, juga berbuat prestasi untuk bangsa dan negara. Meskipun dengan parahnya serba krisis yang diwariskan kepada kita, kita semakin menggugat, bagaimana proporsi antara keberhasilan dan kegagalan itu.

Rumitnya persoalan ditambah lagi oleh lamanya persoalan itu tidak ditangani secara semestinya.

ADIL dan patutkah, hal ihwal yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, dan kesempatan dituntut pertanggungjawabannya secara hukum, jika hal serupa tidak dikenakan terhadap mantan Presiden? Inilah persoalan berat yang kita hadapi sebagai bangsa.

Setiap kali, suatu kasus besar seperti misalnya kasus Texmaco terkuak, langsung atau tidak langsung, ada keterlibatan mantan Presiden. Inilah pertimbangan lain yang menempatkan bangsa kita pada posisi dilematis.

Tidaklah mungkin—bahkan dalam revolusi pun tidak—pergantian sistem pemerintahan dan kepemimpinan bebas tanpa *carry-over* dari masa lalu, betapa pun masa lalu itu dicerca, dikoreksi, ditumbangkan.

Akan tetapi, masuk akal dan patut kiranya, warisan masa lampau yang sentral dan negatif ditanggalkan sebersih mungkin. Apalagi jika kita pahami, tanpa penanggalan, pembersihan, dan pertanggungjawaban hukum, warisan negatif itu akan berpengaruh buruk terhadap masa depan yang sedang dibangun.

Dengan catatan-catatan itu dan dengan kesadaran bahwa pekerjaan pemerintah tidak bertambah ringan, keputusan Jaksa Agung membatalkan SP3 terhadap mantan Presiden Soeharto, harus diambil. Memang serba berat dan serba repot, tetapi janganlah menyalahkan Jaksa Agung. Warisan itu dan pembuat warisan itu yang harus pertama-tama bertanggung jawab.

Seerti berulang kali disampaikan Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah kelak akan memberikan pengampunan kepada mantan presiden. Namun semua itu akan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukannya proses peradilan, sehingga prinsip semua orang sama di depan hukum benar-benar dijalankan. Itulah semangat yang memang ingin kita bangun bersama di masa mendatang.

Tajuk Rencana

Ramadhan Tiba, Kita Arahkan Jiwa untuk Ibadah dan Kehidupan Hati Bersih

MENGIKUTI perjalanan bangsa Indonesia selama setahun terakhir, orang bisa sangat terpana. Alangkah hiruk-pikuknya kehidupan itu. Di sana-sini memang ada wacana tentang upaya pemulihan kehidupan dari krisis ekonomi yang melilit, namun yang mendominasi tetaplah pertarungan politik.

Meski kita acap mengaku bukan penganut paham Machiavellian, tujuan menghalalkan cara, tak sedikit praktik semacam itu muncul gamblang di depan kita. Dalam pertarungan semacam itu, terjadinya kekerasan seperti konsekuensi alamiah yang tak bisa digugat lagi.

Syukurlah, berbagai potensi lebih serius yang mengancam sendi-sendi keutuhan bangsa, oleh kearifan dan kenegarawanan para pemimpin kemudian dapat diredakan. Lalu menyusul Sidang Umum MPR Oktober silam, negara kita kini memiliki kepemimpinan yang menurut bahasa orang banyak punya legitimasi dan kredibel.

Hal itu telah membantu meredakan suasana panas yang selama setahun sebelumnya mendera bangsa. Tetapi juga kita sadar bersama bahwa ide seperti "Akhir Riwayat"—meminjam *The End of History* Francis Fukuyama—juga ilusi bagi bangsa Indonesia. Selain "pertarungan politik" di Jakarta masih terus berlangsung, betapa pun hal itu dilakukan dalam nuansa lebih subtil, di wilayah lain—Maluku, Aceh dan Irian Jaya—agresivitas kasat mata masih saja berlangsung.

DALAM kaitan inilah kita melihat relevansi apa yang Rabu (8/12) kemarin dengan gamblang diuraikan oleh Dr Jalaludin Rakhmat di harian ini. Antara lain di sana disebutkan bahwa dalam diri setiap orang selain terdapat jiwa kanak-kanak, juga ada jiwa binatang buas. Inilah yang mengubah masyarakat menjadi pertarungan tanpa henti antara sesama serigala. "Tidak jadi soal, apakah Anda militer, politisi sipil, atau sekadar pejabat daerah, dengan jiwa ini Anda akan berusaha untuk menang at any cost," tulis Dr Jalaludin.

Anda tak peduli lagi dengan jumlah korban dan besarnya kerusakan, tambah intelektual Islam yang kini menjadi Direktur Pusat Kajian Tasawuf Tazkiya Sejati di Jakarta tersebut. Sambil meminjam Lunatsarsky, juga dikemukakan bahwa dalam filsafat binatang buas "cinta harus dibuang jauh-jauh, karena yang dibutuhkan adalah kebencian."

Politik dalam makna aslinya adalah satu hal yang luhur, karena tujuannya menciptakan kemaslahatan bagi orang banyak. Tetapi dalam praktik, politik justru sering dilaksanakan dengan mengorbankan orang banyak yang diatasmakan dalam perjuangannya.

Satu unsur penting lagi yang disinggung dalam renungan hikmah Ramadhan kemarin adalah elemen kejiwaan lain yang ada pada manusia, yakni watak *homo economicus*. Berkembang di ranah yang salah, unsur ini akan mengubah manusia menjadi makhluk yang rakus, bathil, tidak peduli dengan penderitaan orang lain.

Kita mungkin segera menemukan aktualitas pelukisan di atas dalam penderitaan bangsa Indonesia yang disebabkan oleh krisis ekonomi, dan

krisis ini disebabkan oleh praktik sejumlah orang yang memenuhi kriteria di atas. Isi berita surat kabar dan televisi hari-hari ini pun masih secara tandas melukiskan kenistaan itu, yang membuat pembaca dan pemirsanya tertikam oleh kegetiran dan kegeraman yang sulit dicari bandingannya.

DIANDAikan sebagai bangsa yang belajar, bangsa Indonesia tentu ingin lepas dari belenggu perpolitikan yang membawa nuansa karakter seperti dilukiskan oleh Dr Jalaludin Rakhmat.

Ramadhan adalah bulan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Kalaupun di hari kemarin kita sendiri tidak melakukan keburukan yang menyebabkan penderitaan orang lain, mungkin kita—terhadap diri sendiri pun—telah bersikap keliru. Dalam arti, kita terlalu banyak mencukupi kebutuhan badani tetapi kurang memenuhi kebutuhan rohani.

Bila hal itu berkelanjutan, padahal—sebagaimana diibaratkan oleh Rumi—tubuh hanyalah kuda dan dunia adalah kandangnya. Maka, kecilah peluang bagi kita untuk pindah ke istana raja tempat hati bertakhta. Orang lalu lebih diperintah oleh tubuh, karena tubuהל yang berkuasa.

Melalui berpuasa di bulan Ramadhan inilah kita ingin bertatih mengubah paradigma hidup. Kita ingin lebih banyak menyuapi ruh kita, karena itulah jalan yang akan membawa kita ke haribaan-Nya.

Perjuangan menuju haribaan-Nya itu kita sadari bukan jalan mudah, lebih-lebih mengingat bakat alamiah manusia—seperti telah diuraikan di atas—tersusun dari kebaikan dan keburukan, insan bahimi dan insan malakuti, Jekyll dan Hyde, yang terus bertarung. Namun Allah memberi manusia waktu dan kesempatan. Setiap tahun, dalam kurun 355 hari, kepada kita dihadirkan bulan suci untuk kita sambut dan pergunakan dalam upaya menuju kehidupan hati bersih.

Hari Kamis ini, sesuai dengan hasil Sidang Istbat Departemen Agama, kita memasuki 1 Ramadhan 1420 Hijriah. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh insan bertakwa, dan menjadi momentum bagi siapa pun yang mendambakan kehidupan lebih tinggi dan berkualitas. Tuhan telah membuka jamuan, dan sebagai hamba Allah kewajiban kitalah untuk menjadikannya tamu-Nya.

CUKUP kiranya hiruk-pikuk politik, dan cukup pula kiranya hawa nafsu pertikaian antarwarga bangsa. Marilah kita songsong bulan suci dan jalani ibadah puasa yang ditetapkan dengan penuh keikhlasan. Seiring dengan itu, sesuai dengan nasihat Nabi Muhammad SAW, kita pinggirkan pola hubungan yang didasarkan pada kebencian dan permusuhan, dan kita dekatkan pola ketuhanan yang didasarkan pada cinta dan silaturahmi.

Marilah dalam bulan yang berbahagia ini kita dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan seraya meningkatkan ibadah kita perbanyak santunan kepada saudara-saudara kita yang masih hidup berkesusahan.

Selamat menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan 1420 H, semoga Allah SWT memberkahi kita semua. *

Tajuk Rencana

Masalah Kredit Macet, Ya Masalah Kredit Macet, Bukan Politik

KITA tak lagi kaget mendengar sudah sedemikian parahnya kondisi bank-bank kita, perekonomian kita, dan dunia usaha kita, seperti dipaparkan oleh Menteri Negara Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Kwik Kian Gie dalam rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR, Rabu (8/12).

Kita juga tak lagi terheran-heran ketika Menko Kwik Kian Gie membuka fakta, bahwa begitu dahsyatnya ulah segelintir warga negara yang berstatus pengusaha besar dalam mengeruk uang rakyat. Pada mereka itulah, uang bank-bank BUMN sebesar Rp 600 triliun macet, sehingga secara teknis semua bank BUMN boleh dikatakan sudah bangkrut.

Masalah-masalah seperti itu sudah lama kita ketahui. Selain karena kita telah mengalami sendiri susahnya, persoalan-persoalan tersebut juga telah lama akrab di telinga rakyat, antara lain sebagai hasil dari teriakan nyaring tak kenal lelah Kwik Kian Gie selama bertahun-tahun saat masih berstatus orang swasta.

LANTAS, mengapa masalah tersebut harus dipaparkan kembali oleh Menko Ekuin pada pimpinan DPR, kita menangkap pesannya. Yang paling nyata dua hal.

Pertama, untuk menegaskan bahwa kondisi hancur-hancuran yang terjadi saat ini merupakan akibat dari perbuatan masa lalu. Hal ini penting, agar Dewan (baca: rakyat) tahu dari mana sebenarnya titik berangkat pemerintahan baru.

Kedua, untuk mengungkapkan bahwa pemerintahan baru memiliki kemampuan kuat untuk mengatasi masalah yang ditimbulkannya. Akan tetapi kendalanya luar biasa besar, dan karena itu memerlukan dukungan yang besar pula dari Dewan.

KITA anggap tepat waktu hal itu diungkapkan sekarang. Yakni, pada saat di benak kita mulai muncul keraguan, jangan-jangan upaya kita untuk bersih-bersih diri, kembali terseret mundur. Keyakinan kita terhadap keseriusan tekad pemerintahan baru dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, hari-hari ini benar-benar terasa tengah diuji oleh ruparupa kejadian yang berlangsung di masyarakat.

Sejak awal kita menyadari, tindakan "cuci piring" yang harus dilakukan pemerintahan baru, bukan pekerjaan mudah. Sikap tidak kooperatif pengusaha dan tidak penuhnya dukungan dari aparat birokrasi—karena sebagian besar sudah terjangkiti wabah korupsi—seperti dikemukakan Menko Kwik Kian Gie, kita tahu dan yakini benar adanya.

Lebih dari itu, belakangan tampak pula potensi hambatan yang tak kalah hebat, yakni hal-hal yang memiliki kaitan atau dikait-kaitkan dengan praktik perpolitikan.

Meskipun kadarnya bisa jadi hanya memanfaatkan kelemahan dari kondisi obyektif perpolitikan yang berkembang, mengikuti perdebatan di sekitar kasus kredit macet perusahaan tertentu, kita mencium upaya poli-

tisasi persoalan secara sangat kental.

KITA kembali ke akar persoalan: kredit macet Rp 600 triliun. Itu berarti sama dengan 60 persen Produk Domestik Bruto dan tiga kali anggaran negara. Gara-gara kredit macet yang begitu besar, secara teknis bank-bank BUMN sudah bangkrut. Pada sisi sebaliknya, terdapat ribuan perusahaan yang dibiayai oleh kredit tersebut dan terdapat belasan perusahaan peminjam berskala sangat besar.

Dengan demikian terdapat tiga hal yang memerlukan perhatian segera: mencegah kebangkrutan bank; menyelamatkan perusahaan; dan meminta pertanggungjawaban pengusaha yang telah memacetkan kredit, sekaligus pimpinan bank yang dananya macet. Penyelesaian atas ketiga masalah tersebut, ditinjau dari konteks upaya pemulihan ekonomi, merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi.

Penyehatan bank mutlak, karena tanpa sehatnya bank-bank—apalagi bank pemerintah yang masih menjadi "pemimpin" pasar—maka fungsi mediasi bank dalam perekonomian takkan bisa berjalan baik.

Begitu pula penyelamatan ribuan perusahaan bermasalah. Apa pun yang terjadi, itu adalah aset nasional yang bisa memberi manfaat bagi masa depan perekonomian apabila dapat dikelola dengan baik. Sementara langkah meminta pertanggungjawaban pengusaha dan bankir yang kreditnya macet, selain penting bagi upaya pemenuhan rasa keadilan rakyat, tetapi juga untuk membangkitkan kepercayaan pada perekonomian di masa depan.

Kalaupun demikian, antara satu masalah dengan masalah lain tidak harus dicampur-baurkan, sehingga tidak muncul persepsi salah seperti yang berkembang akhir-akhir ini. Bahwa bila pemilik usaha dihukum, pabrik akan hancur, puluhan ribu karyawan akan terlunta-lunta; padahal sepanjang kita tahu, antara perusahaan dan orang adalah dua institusi yang terpisah.

KITA tahu, sudah sejak awal krisis ekonomi usaha menyelesaikan masalah-masalah tersebut diupayakan pemerintah. Tetapi memang jalannya begitu lambat dan tersendat-sendat, sebagian karena kurang tegasnya kemauan politik pemerintahan lalu, sebagian lagi akibat dari tidak ringannya bobot persoalan yang dihadapi.

Kini, setelah pemerintahan baru berkuasa membawa komitmen yang baru pula, ternyata tantangannya malah menguat. Terasa benar, makin kuat tekanan, makin kuat pula perlawanan.

Dalam kondisi seperti ini, pilihan benar-benar berada di tangan kita. Apakah kita akan surut, mengalah pada tekanan, atau sebaliknya memperkuat barisan untuk melangkah lebih maju lagi, terserah kita. Hanya saja yang ingin kita urun rembuk, langkah surut berarti pengkhianatan terhadap Gerakan Reformasi yang didukung penuh rakyat. Langkah surut, juga tidak akan memberi manfaat baik pada perekonomian.

Tajuk Rencana

Angin Segar Penegakan Hukum, Perlu Terjadi dalam Kasus Narkoba

TEGAKNYA supremasi hukum, kita simpulkan sebagai salah satu tekad pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekamoputri. Tekad itu terungkap dalam pidato-pidato awal mereka, dan tampaknya akan dilakukan serius, berkesinambungan. Dasarnya, bukan karena "ancaman 100 hari", bukan juga demi memperoleh kepercayaan luar negeri, melainkan oleh alasan yang mendasar. Yakni, kebenaran adagium umum, bahwa lentunya penegakan hukum adalah awal dari pemerintahan yang korup.

Proses peradilan terhadap mantan Presiden Soeharto dan kroninya, masih menimbulkan berbagai penilaian, terutama menyangkut cara. Di cabutnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Soeharto merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah. Proses pemeriksaan mereka yang terlibat dalam kasus "besar" dan "memalukan" Bank Bali, lantas bertali-temali dengan trilyunan kredit macet yang diduga akibat praktik KKN era orde *kemarin*, kita sebut sebagai bukti seriusnya pemerintahan Gus Dur.

Dari sisi itu, panggung peradilan kita memang menjanjikan. Kita merasa ada angin segar yang prospektif bagi terealisirnya tekad. Apa yang dilakukan Kejaksaan Agung, kepolisian dan keterlibatan lembaga-lembaga advokasi dalam kasus-kasus besar di atas, disiarkan secara luas. Masyarakat tahu, mengikuti, terlibat secara emosi, serta memberi dukungan. Pemuatan lengkap kinerja perusahaan yang terlibat kredit macet, membuat emosi masyarakat terbangun.

Apa yang dikerjakan pemerintah berikut aparatnya menjadi isu nasional, menjadi bahan pembicaraan masyarakat, menciptakan dukungan moral yang produktif. Sehingga, yang mereka tempuh tidak hanya ditopang secara yuridis formal, tetapi juga emosi masyarakat. Kasus-kasus itu menjadi isu nasional. Apalagi memang dari hakikat masalahnya sudah jadi sebagai kasus-kasus besar.

APAKAH permasalahan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) bisa dikategorikan isu nasional? Bisa ya, bisa tidak. Ya, karena jadi bahan pembicaraan umum, setidaknya bersama-sama mengingatkan bahaya besar bila persoalan ini kita anggap sepele. Ukuran besarnya soal, bisa juga kita takar dari seriusnya aparat keamanan dan masyarakat memberantas penyalahgunaan narkoba.

Sebaliknya, kita katakan tidak, sebab masalahnya tidak langsung menyangkut persoalan-persoalan besar, pragmatis, politis dan menentukan; misalnya, persoalan utang trilyunan rupiah pihak swasta yang macet, kasus-kasus konflik dan kekerasan seperti di Ambon dan Aceh, juga kasus-kasus pelanggaran HAM.

Akan tetapi, kalau ditakar dari akibat yang ditimbulkan (generasi masa depan), dari besarnya uang yang terlibat dalam peredaran dan pemakaiannya, kasus-kasus narkoba termasuk sebagai persoalan besar yang potensial jadi isu nasional. Masa depan bangsa dan negara dipertaruhkan. Timbul pula dugaan, generasi masa depan kita dirusak dan rusak oleh penyalahgunaan narkoba. Lantas, bukan lagi soal ekonomi, tetapi juga politis dan budaya.

Lebih serius lagi—tentu bobotnya sebagai isu nasional jadi lebih besar—tatkala ditemukan bukti, sejumlah aparat keamanan—TNI maupun kepolisian—juga berfungsi sebagai pengedar. Hati kecil kita bertanya, mengapa jumlah tentara dan polisi penyalahguna narkoba semakin ba-

nyak yang terungkap ke permukaan?

Setelah Prajurit Satu Sofyan—anggota Pusat Polisi Militer TNI tertangkap sebagai pemilik 22 paket heroin, menyusul yang selama ini sudah tertangkap tangan—kita pastikan bukan yang terakhir.

APAKAH ada yang kurang dalam upaya penanganan masalah narkoba? Kita tidak ragu-ragu pada keseriusan polisi. Kasus Zarina yang sempat membingungkan kita, semakin menguatkan apa yang terjadi. Kebebasan bersyaratnya ditanggguhkan. Polda Metro Jaya membentuk satuan tugas antinarkotika, secara serius, teratur, berkesinambungan melakukan operasi-operasi.

Seolah-olah mendadak sontak, kita disuguhi seriusnya pemerintah menangani narkoba. Di setiap lorong terpanjang spanduk semboyan antinarkoba. Masyarakat terlibat langsung, secara emosional sangat dimungkinkan, sebab sudah sampai tingkat: "hari ini anak tetangga, esok anak saya". Setiap kali media massa memuat dan mengumumkan hasil operasi.

Kita bertepuk tangan, memuji kesigapan polisi. Sebaliknya kita bertanya, ke mana barang bukti disimpan? Apakah pelakunya (pemakai dan pengedar) disidangkan ke pengadilan?

Pada saat yang sama kita sedih. Pasal undang-undang kasus penyalahgunaan narkoba jarang diambil putusan absolutnya. Banyak kasus dibiarkan menggantung atau dibiarkan menguap. Singapura dan Malaysia yang sering dikemukakan sebagai contoh dua negara yang tegas dalam soal narkoba, ditolak tidak sesuai kelaziman kita.

Seolah-olah kita putus asa. Puas dengan berita dan pengumuman keberhasilan polisi di lapangan, sebaliknya maklum dengan lentunya penegakan hukum soal narkoba. Sampai kemudian kita menyimpulkan, lentunya kita menangani secara hukum kasus-kasus narkoba adalah awal sekaligus cermin dari penegakan hukum di negeri ini.

OLEH karena itu, ketika ada pernyataan "geram" dari Kepala Negara—Presiden Abdurrahman Wahid—soal narkoba, sepantasnya "kegeraman" itu kita sambut gembira. Pernyataan itu kita dukung, sekalian membuktikan bahwa kasus-kasus penyalahgunaan narkoba pantas digolongkan sebagai isu nasional.

Menurut Presiden Gus Dur, dalam RUU antinarkoba yang sedang dipersiapkan, pengedar diancam hukuman penjara 12-20 tahun. Bahkan disebutkan ada kemungkinan pemberlakuan hukuman mati bagi pengedar seperti yang terjadi di Malaysia dan Singapura.

Saatnya sekarang bukan lagi semboyan dan jargon—seperti pernah kita kemukakan di ruangan ini—tetapi tindakan tegas: penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan perasaan *ewuh-pakewuh*. Angin segar dalam upaya penegakan hukum dalam kasus-kasus KKN, sebaiknya juga terjadi pada kasus-kasus kejahatan narkoba.

Tanpa menggecilkan arti kegiatan lembaga-lembaga rehabilitasi, tindakan preventif (pemberantasan) sudah saatnya didahulukan. Sambil menunggu keluarnya amandemen RUU antinarkoba, putusan-putusan absolut sudah bisa dijatuhkan. Persoalannya, masih adakah kehendak baik, yang tidak selesai dengan menangkap pemakai dan pengedar narkoba berikut barang haram itu?

Tajuk Rencana

Memang Benar, Pemerintah Harus Konsisten dan Juga Harus Kompak

APA yang dikemukakan oleh Dewan Ekonomi Nasional sesuai dengan apa yang dirasakan dan diharapkan oleh kalangan masyarakat, ialah: agar pemerintah konsisten dalam kebijakan dan keputusan ekonominya. Lebih dari itu, kita mengharapkan agar pemerintah kompak. Sebab, hanya pemerintah yang kompak dapat konsisten melaksanakan kebijakan dan keputusannya.

Pendapat Dewan Ekonomi Nasional disampaikan oleh Ketua DEN Prof Emil Salim dan Sekretaris Dewan Dr Sri Mulyani Indrawati, yang disertai beberapa anggota Dewan. Opini itu dipaparkan kepada media, setelah mereka diterima oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid dan beberapa menteri di Bina Graha.

Dewan Ekonomi Nasional mengingatkan, pemerintah harus konsisten dalam mengeluarkan kebijakan makro di bidang ekonomi, keuangan dan industri maupun di bidang pembangunan antardaerah. Langkah itu penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

APA yang dimaksudkan oleh Dewan Ekonomi Nasional lebih jelas, ketika Prof Emil Salim memberi ilustrasi: jangan ada yang bicara begini, yang begitu, sehingga dampaknya menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Diingatkan baik oleh Ketua maupun oleh Sekretaris DEN, dalam ekonomi ada interdependensi, saling keterkaitan dan ketergantungan. Misalnya, jika gaji pegawai naik 100 persen, terserah saja, asal sekaligus dipahami, akibat kenaikan sebesar itu, inflasi akan naik 500 persen.

Diingatkan pula, jika sekarang masyarakat merasa stabilitas ekonomi dalam bentuk kursnya relatif stabil, pertumbuhan menunjukkan tanda-tanda positif, itu semua bukan jatuh dari langit, tetapi hasil kebijakan yang didesain untuk itu.

Tentang Bank Bali, Texmaco, BPPN, Ketua Dewan Prof Emil Salim menegaskan, jalan terus. Sekali kaki diayunkan, jalan terus, jangan maju-mundur, maju-mundur.

Mengenai BPPN, Ketua dan Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional menyatakan, agar badan itu dapat bekerja efektif dan tidak maju-mundur, sangat diperlukan dukungan moral dan politik pemerintah.

Sebagai contoh dikemukakan, aset yang dikuasai BPPN, menurut nilai buku, 600 triliun rupiah. Nilai itu jangan-jangan hasil *mark up*, menaikkan harga secara rekayasa. Jangan-jangan nilai riilnya misalnya 200 triliun saja.

Diingatkan pula, banyaknya intervensi politik dalam menangani kasus seperti kasus Bank Bali. Kasus-kasus lain menunjukkan tanda-tanda serupa.

KITA mulai dengan menunjukkan simpati kepada Gus Dur yang dalam memasuki bulan Puasa, mohon doa restu. Begitu banyak pekerjaan yang harus ia tangani. Kita hargai sikapnya yang apa adanya.

Justru karena begitu banyak pekerjaan serba mendesak yang harus ditanganinya bersama seluruh anggota Kabinet dan pemerintahannya, kita garis bawah pendapat dan saran Dewan Ekonomi Nasional.

Arah dan kepemimpinan harus tetap diberikan oleh Presiden, bahkan perlu ditingkatkan efektivitasnya. Komitmen pemerintah hanya bermakna jika direalisasikan secara konsisten, secara terus-menerus.

Masyarakat juga mengamati dan merasakan, betapa Kabinet ini tidak kompak. Antara satu menteri dengan menteri lain, menyatakan perbedaan pendapatnya secara terbuka. Bingunglah masyarakat dan kalangan yang bersangkutan.

Perbedaan pendapat itu ada yang berdasarkan pertimbangan obyektif dan tanpa pamrih, tetapi ada juga yang menyiratkan pertimbangan subyektif dan pamrih. Dalam hal itu, masyarakat bertambah kecewa.

Bukan saja koordinasi yang diperlukan oleh Kabinet, tetapi juga arah dan kepemimpinan yang konsisten dan efektif. Hal itu diperlukan karena beberapa faktor.

Kabinet ini kabinet koalisi partai-partai, berbeda misalnya dengan Kabinet Presiden Soeharto dulu. Koalisi berarti, koalisi pandangan, kepentingan dan pendekatan. Karena itu, lebih-lebih lagi diperlukan koordinasi, arah yang konsisten dan kepemimpinan yang efektif.

PEMERINTAHAN Gus Dur narus berbenah banyak. Sudah lama kita tahu, keroposnya banyak usaha besar. Kita tahu kredit macet dan praktik bisnis yang ber-KKN. Ketika terjadi krisis ekonomi, semakin tampak jelas sosok bisnis dan praktik bisnis yang KKN.

Keadaan itu semakin terbuka ketika reformasi prodemokrasi mau tidak mau menghadirkan transparansi. Hampir tidak ada lagi yang dapat ditutup-tutupi. Lembaga seperti BPPN mengumumkan perusahaan-perusahaan besar yang kreditnya macet. Sejumlah besar perusahaan yang kreditnya macet, cara memperoleh kreditnya pun tidak wajar, melanggar ketentuan, menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak adil.

Semua pihak pendukung reformasi menaikkan bendera anti-KKN. Tetapi ketika KKN dijabarkan menjadi kasus-kasus seperti Bank Bali, Texmaco dan lain-lain, surutlah komitmen anti-KKN. Bahkan tampak adanya perbedaan pendapat, penilaian, dan kepentingan.

Memang luar biasa daya dan pengaruh uang pada kita semua. Inilah tantangan besar yang kita hadapi. Masalahnya sendiri memang kompleks dan seperti serba-salah. Pikiran dan penilaian menjadi lebih tidak jernih dan tidak jujur, ketika uang ikut bermain.

Persoalan itu juga yang mau tidak mau juga dihadapi oleh pemerintah Gus Dur dan Megawati. Pemerintah ini beritikad baik, jujur, dan lurus komitmennya. Pemerintah ini juga belum berpengalaman.

Kita dengar bagaimana *lobi* gencar dilakukan. Bisa kita bayangkan, apa saja dan siapa saja yang menyampaikan bisikan atau membawa orang pada Gus Dur dan Megawati. Bagaimana menyeleksi, sementara ini kita hidup dalam alam demokrasi dan sosok kepemimpinan Gus Dur pun bersosok demokratis dan terbuka.

KEADAAN itulah yang kiranya menjadi latar belakang penegasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Prof Dr Emil Salim: "Jadi kalau sekali melangkah di Bank Bali, jalan terus, Texmaco jalan terus. Mega kredit jalan terus dan segala macam. Supaya ada sinyal pada masyarakat, bahwa pemerintah ini serius untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Kita sependapat dengan pengamatan Dewan Ekonomi Nasional, pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan ekonomi, keuangan, industri, dan pembangunannya. Kita tambahkan, agar dapat konsisten dan pemerintahannya efektif, pemerintah juga harus kompak!

(Kompas, 13 Desember 1999, halaman 4)

Tajuk Rencana

Soros Memang Bisa Merugikan, tetapi Justru Kita Perlu Banyak "Soros"

KALAU bukan Soros yang membeli 15 persen saham perusahaan lokal, Bentoel, tentu tidak akan sangat menarik perhatian. Jual-beli saham jelas merupakan peristiwa lumrah. Apalagi bagi perusahaan dalam penguasaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), karena memang ribuan perusahaan di sana statusnya siap jual untuk menompoki uang bank yang kandas dalam kredit macet.

Akan tetapi karena Soros, pemilik Quantum Fund, *fund manager* terkemuka dari Amerika Serikat, ceritanya menjadi lain. Bahkan ketika saat-saat lalu baru menyatakan berminat melakukan investasi saja—jadi belum melakukan investasi—itu pun sudah cukup menjadi bahan berita.

Jangan pula lupa, Soros yang segera terlibat di sini merupakan hasil bertakuan istimewa. Ibaratnya tamu undangan khusus, diundang secara khusus, agar tamu-tamu lain mau datang. Agar para investor asing segera kembali masuk ke sini, maka perlulah Soros. Sehingga, Soros adalah salah satu dari sedikit orang yang ditemui Menteri Luar Negeri Alwi Shihab ketika berkunjung ke AS bersama Presiden KH Abdurrahman Wahid beberapa waktu lalu.

AKAN tetapi, mengapa Soros? Bukankah George Soros, warga utama bangsa Yahudi itu pula yang telah dituduh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, sebagai biang keladi dari terjadinya krisis moneter di Asia Tenggara?

Dalam skenario yang lain, Soros bersama para *fund manager* terkemuka dunia lain adalah kaki tangan, sekaligus kekuatan utama kapitalisme. Mereka siap melakukan apa pun bagi tegaknya kapitalisme dan menangnya kaum kapitalis. Merekalah wajah riil dari imperialisme Barat yang baru, imperialisme ekonomi.

Dan, pada kenyataannya memang sesudah uang berkembang menjadi komoditas—bukan lagi sekadar sebagai alat tukar—mereka, para pemilik lembaga pembiayaan itu, telah tumbuh menjadi kekuatan luar biasa dalam tata perekonomian—bahkan peta politik—global.

Trilyunan dollar AS dana global berada dalam kendali mereka. Dari hari ke hari, uang-uang itulah yang mereka mainkan di pusat-pusat keuangan dunia, mulai dari Jakarta hingga New York, dari Tokyo hingga Sydney.

DIHADAPKAN pada dua wajah Soros, juga "Soros-soros" yang lain, sah-sah saja kalau ada yang menjadi kecil hati menerimanya. Sebab, lepas dari ia seorang Yahudi atau bagian dari imperialisme Barat, melalui kekuatan uangnya *toh* ia bisa melakukan apa pun pada kita.

Akan tetapi, bukankah pada sisi lain, adalah juga telah menjadi realitas bahwa kita menganut paham ekonomi terbuka? Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga bangsa, dalam rangka membangun negara, kita menyatakan siap berinteraksi secara terbuka dengan warga seluruh dunia?

Dalam kondisi seperti itu, diundang atau tidak, disuruh pergi atau tidak, orang-orang Quantum Fund, Merrill Lynch, Goldman Sachs, dan lain-lain, akan bebas keluar-masuk. Di mana ada potensi memperoleh untung, di situ mereka ada. Sebaliknya, ketika investasi yang mereka geluti cenderung menimbulkan kerugian, mereka tinggalkan.

Maka, bila masalahnya ditempatkan dalam konteks itu, "undangan" pada Soros tidaklah bermakna lebih, kecuali mempersilakan segera masuk—tak perlu mengintip-intip dahulu karena informasinya kita berikan—

dengan harapan segera diikuti investor lain. Pendekatan bersifat personal kepada investor memang menjadi sangat diperlukan. Mengingat apa yang kita alami kemarin dulu adalah krisis kepercayaan.

SELAMA tiga dekade membangun ekonomi, terutama pada satu-dua dekade terakhir, kita merasakan manfaat dari keterlibatan modal asing dalam pembangunan. Secara umum mereka telah memberikan andil bagi kemajuan ekonomi kita. Sebaliknya bagi mereka, kita adalah sumber daya ekonomi tanpa batas. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, juga berpotensi menjadi pasar sangat besar.

Akan tetapi, berkali-kali pula kita merasa diganggu keberadaan modal asing. Berkali-kali guncangan di pasar uang dan pasar modal, pada titik tertentu telah mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam hal ini, gangguan puncaknya adalah ketika para investor lari akibat tak lagi mempercayai kita, dan kita yang ditinggalkan harus menerima keadaan terpuruk ke kondisi serba krisis.

Bercermin pada pengalaman-pengalaman tersebut, kesimpulannya tidak lalu membuat kita harus menutup diri. Kita tetap pada jalan ekonomi terbuka, sebab kesusahan yang sempat menimpa kita hari-hari ini, ternyata sebagian besar akibat kekeliruan kita dan bukan oleh sistem terbukanya itu. Bahwa kita telah membangun dengan melampaui kemampuan sendiri, membangun dengan menggerogotinya sendiri, itulah yang telah menjerumuskan kita pada kesusahan.

Maka, sejak kondisi multikrisis terjadi, usaha terbesar yang kita lakukan adalah mengembalikan kepercayaan dunia internasional, terutama kepercayaan investor. Mengapa pekerjaan pertama Presiden Gus Dur berkeliling ke sejumlah negara, kiranya demikianlah antara lain rasionalitasnya.

PADA saat ini kita merasakan kepercayaan investor—dalam maupun luar negeri—mulai beranjak ke arah yang baik. Relatif tenangnya pasar uang dan pasar saham, bahkan ketenangan itu disertai dengan tendensi penguatan, menunjukkan paling tidak pasar sudah lebih bisa menyesuaikan diri dengan keadaan baru, mulai memiliki harapan baru.

Kondisi ini, bila terus didukung situasi tenang-aman-stabil, dipercaya akan segera melahirkan investasi-investasi baru. Dalam jangka pendek, tugas kita adalah mengarahkan investasi itu ke sektor produktif, sektor riil, yang selain bermanfaat bagi pengadaan lapangan kerja, juga tidak mudah dilarikan manakala terjadi kondisi yang dirasakan mengganggu. Jadi, investasi tidak sekadar mampir dalam porto-folio, seperti lembar-lembar saham dan surat berharga lainnya, yang setiap saat bisa berpindah tempat.

Dalam jangka panjang, agar kita benar-benar diterima sebagai bagian dari warga dunia, maka tugas kita adalah menyelaraskan tata aturan dan gerak langkah kita dengan aturan atau kelaziman-kelaziman di alam global.

Dalam konteks ini misalnya, kita tidak mungkin lagi mengatakan, inilah tafsir kami tentang HAM dan persetan dengan tafsir kalian. Ketika ekonomi makin terintegrasi, dunia makin mengglobal, hal-hal seperti itu akan ikut menentukan bagi tumbuhnya iklim investasi yang kondusif di suatu negara.

Dan, bila kita konsisten dengan apa yang tengah kita lakukan sekarang, yakni melakukan reformasi total; kita percaya suatu saat kita akan menjadi bagian terhormat dari warga bangsa-bangsa.

Tajuk Rencana

Beda Pendapat Soal Harga BBM Jangan Mengorbankan Kepentingan Lain

HAL inilah antara lain yang sejak awal kita sadari, bahwa siapa pun yang memerintah sekarang pasti tidak mudah. Yakni, secara ekonomi bangsa kita sudah bangkrut, padahal pada sisi lain, tuntutan pembiayaan desak-mendesak meminta prioritas.

Kebangkrutan terlihat misalnya, pada begitu besarnya angka defisit anggaran belanja negara pada dua tahun terakhir, yang seluruhnya ditutup oleh pinjaman luar negeri.

Padahal secara teknis pada tahun-tahun itu, dalam anggaran sudah tidak lagi ada apa yang disebut anggaran pembangunan. Secara relatif sudah tidak ada lagi pembuatan waduk, jalan-jalan, jembatan, atau gedung-gedung kantor pemerintah.

Anggaran negara hanya berisi pembiayaan rutin, seperti membayar gaji pegawai negeri dan utang, di samping program khusus dalam rangka membantu kelompok masyarakat yang paling menderita akibat krisis ekonomi.

KONDISI seperti itu masih harus terjadi pada tahun anggaran mendatang, tahun 2000/2001, yang rancangannya sedang disiapkan oleh pemerintah untuk dibawa ke DPR awal Januari mendatang. Bahkan bisa jadi, kondisinya akan lebih berat dari tahun sebelumnya, sebagai dampak dari akumulasi persoalan masa lalu.

Mengapa bisa lebih berat, sebab kemampuan untuk mengakumulasi dana belum membaik, uang pajak tetap belum bisa ditarik, padahal tuntutan pembiayaan dipastikan terus meningkat.

Perbaikan gaji pegawai negeri tidak mungkin lagi ditunda. Sebab selain karena gajinya sudah sangat tidak realistis, juga kita ingin saat-saat sekarang dijadikan momentum untuk mulai mengarahkan jalan menuju penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kita juga mutlak harus memberikan prioritas pada kaum miskin dan kaum pengangguran yang jumlahnya berlipat dua pada tahun-tahun terakhir ini. Dan di luar semua itu, kita harus memberikan perhatian pada upaya merehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi yang porak-poranda oleh krisis *kemarin*.

DALAM konteks itulah kita menangkap wajar peristiwa tarik-menarik antara Dana Moneter Internasional (IMF), pemerintah, dan DPR di sekitar rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik pada tahun anggaran mendatang.

Dari sisi IMF benar, bahwa subsidi BBM dan tarif listrik yang sangat besar dalam APBN, telah sangat memberatkan APBN. Akibat dana terse-dot untuk subsidi, banyak program lain tak bisa dibiayai atau dikurangi biayanya.

Akan tetapi subsidi BBM yang pada tahun anggaran ini mencapai Rp 28 triliun dan subsidi listrik tahun anggaran mendatang diperkirakan Rp 17 triliun, bila dibiarkan juga akan membuat ekonomi berkembang ke arah tidak sehat. Lebih dari itu dalam logika IMF, bukankah tidak *fair* pada para pelaku ekonomi negara lain, bila dana pinjamannya pada kita dipakai untuk mensubsidi secara tidak langsung pelaku ekonominya melalui pemakaian BBM dan listrik bersubsidi.

SEBALIKNYA kita juga sangat memahami suara keberatan dari DPR—dan kiranya itulah pula suara hati dan perasaan kita—atas keharusan menaikkan harga dua komoditas itu pada tahun anggaran mendatang.

Mengapa? Karena kita sangat tahu bagaimana beratnya beban hidup sebagian terbesar rakyat. Menjadi pertanyaan, apakah rakyat mam-

pu menampung kenaikan harga BBM dan listrik, padahal akibat dari kenaikan harga keduanya, akan memberikan dampak naik pula pada harga hampir seluruh barang dan jasa.

Dalam hal ini kita juga belum lupa apa yang terjadi pada awal Mei tahun lalu, ketika pemerintahan Orde Baru—juga atas saran IMF—"ngotot" menaikkan harga BBM. Aksi unjuk rasa dan pemogokan angkutan umum, baru mereda setelah pemerintah menurunkan kembali harga.

Bukan hendak menakut-nakuti bila hal terakhir itu diungkapkan. Meskipun tahun lalu aksi penentangan menjadi sangat marak karena juga dipicu gerakan menurunkan Presiden (waktu itu) Soeharto, tetapi di tengah ketertekanan ekonomi sekarang, bukan tak mungkin kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif listrik akan menimbulkan guncangan.

MEMANG kata pepatah, ibarat buah simalakama. Tetapi masalahnya, jalan keluar harus ada, dan lebih dari itu, tanpa harus mengorbankan kepentingan-kepentingan lain.

Perbedaan pendapat antara kita dengan IMF misalnya, tak harus sampai membuat proses negosiasi antara kita dengan IMF berlarut-larut. Sebab faktanya, program restrukturisasi dan rehabilitasi ekonomi takkan bergulir kembali bila kesepakatan baru belum ada.

Apa yang diungkapkan Mentamben Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini, bahwa pemerintah akan menaikkan tarif listrik 35 persen dan harga BBM 20 persen pada tahun anggaran mendatang, mungkin merupakan jalan tengah.

Dengan usulan itu memang belum akan menghapus seluruh subsidi BBM dan listrik. Tetapi kenaikan yang lebih besar dari itu, apalagi sampai 68 persen untuk bisa menghapus subsidi listrik misalnya, akan sangat menohok daya beli rakyat.

DAN kalaupun kita sepakat untuk mencari jalan tengah di antara dua ekstrem pendapat dan keinginan yang berkembang, beberapa catatan dan penggarisan tetap layak disertakan.

Hal pertama-tama yang selalu ingin dikemukakan terhadap setiap akan munculnya kebijakan pemerintah adalah terjaganya rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks kenaikan harga BBM dan tarif listrik, hal itu tidak hanya diekspresikan dalam pembebanan kenaikan untuk masing-masing kelompok konsumen, tetapi jelas jauh lebih dari itu.

Kita tahu, di balik begitu besarnya subsidi BBM, masih sangat besar pula inefisiensi yang terjadi di Pertamina. Begitu pula di balik tingginya subsidi untuk PT PLN, rakyat sudah sangat tahu, betapa besar kerugian PLN untuk "membayari" listrik yang diproduksi para pengusaha kelas kakap.

Tanpa perbaikan efisiensi pada seluruh lini usaha BBM dan listrik, kita sangat percaya, apa pun argumen yang dilontarkan oleh pemerintah untuk menaikkan harga, akan sangat sulit dapat diterima dengan baik oleh rakyat. Jangan lupa pula, esok-lusa rakyat akan makin pandai, akan makin berani meminta hak-haknya.

CATATAN tambahannya, selain jangan sampai menaikkan harga—apalagi harga BBM—tanpa proses sosialisasi yang memadai, kita tahu dampak ekonomi dari kebijakan menaikkan harga BBM dan listrik sungguh sangat besar dan luas.

Oleh karena itu, kapan pun hal itu dilakukan, pemerintah sudah harus menyiapkan daftar harga baru bagi barang dan jasa yang dikuasainya—kecuali bila akan dipertahankan pada harga lama—seperti harga beras dan tarif transportasi, sehingga tidak terjadi spekulasi di pasar.

Tajuk Rencana

Mencoba Memahami dan Menanggapi Gejala Main Hakim Sendiri

KASUS narkoba begitu merajalela, sehingga orang terhenyak dan takut. Korban kecanduan obat terlarang berlipat jumlahnya, disebut mencapai 2 juta untuk Jakarta saja. Peredarannya meluas ke daerah-daerah. Operasi oleh Polri berhasil menangkap sekaligus menunjukkan benyara nyata dan dramatisnya peredaran obat terlarang. Betapa pedihnya orang-orang yang menjadi korban, apalagi kebanyakan korban itu anak-anak muda.

Adalah sehat dan masuk akal, masyarakat bangkit mengambil inisiatifnya sendiri. Di berbagai tempat seperti Jakarta, masyarakat bertindak sendiri menangkap, mengusir, dan merusak tempat serta rumah-rumah yang dipakai untuk jual beli dan memakai narkoba.

Tindakan masyarakat menjadi main hakim sendiri. Ketika misalnya, sasaran main hakim sendiri itu semakin marak dan timbul eksekusi-eksekusi, kita berpikir ulang. Bangkit melawan narkoba baik dan kita dukung, bagaimana dengan cara main hakim sendiri?

Sasaran main hakim sendiri disinyalir sebagai bertambah luas dan beragam. Sasarannya bermacam-macam seperti tempat maksiat, judi, prostitusi. Juga di sini, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat itu positif dan sehat. Masyarakat mengambil operasinya di tangan sendiri, yakni nasib lingkungan hidup yang sehat, sejahtera, berkeadilan.

Akan tetapi juga dalam hal ini, kita mempertanyakan dan menggugat diri apakah benar main hakim sendiri? Kita mendua, kesadaran, keadilan dan tanggung jawab masyarakat terhadap wabah sosial itu sudah pada tempatnya dan karena itu positif dan terpuji.

Perihal tindakannya yakni main hakim sendiri, kita cenderung untuk mengatakan, jangan. Tindakan main hakim sendiri membawa konsekuensi dan implikasi yang juga meresahkan masyarakat serta mengancam kepastian dan wibawa hukum. Sekalipun sikap kita tidak membenarkan bahkan mengancam main hakim sendiri, hal itu tidak berarti saja.

Sikap menolak dan mencemaskan main hakim sendiri disertai penalaran sebab dan latar belakang, mengapa masyarakat main hakim sendiri? Mengapa main hakim sendiri cenderung meluas dan sering?

DARI para pakar di berbagai bidang dan lingkungan kemasyarakatan, kita sudah mendengar sebab-musababnya. Ada gunanya kita pertimbangkan benar pendapat para pakar itu. Kita uji dengan pengamatan dan pengamatan kita masing-masing.

Keadaan buruk dibiarkan lama berlarut-larut. Keluhan dan protes masyarakat lingkungan dan masyarakat umum, tidak dihiraukan. Tidak terjadi dialog dan komunikasi, bagaimanakah sebaiknya menghadapi persoalan itu serta bagaimana sebaiknya memecahkan persoalan itu.

Persoalannya secara obyektif acapkali tidak sederhana. Ambillah sebagai contoh prostitusi. Prostitusi tidak baik. Prostitusi ada, segala upaya ditempuh, namun pelacuran tetap ada.

Kecuali terus-menerus memberikan informasi, persuasi dan penindakan, muncullah opsi: prostitusi dilokalisir atau dibiarkan liar. Perjudian menunjukkan dilema serupa: dilokalisir atau dibiarkan liar.

Sepanjang dalam masyarakat tidak terjadi perubahan, pilihan-pilihan alternatif bisa diberlakukan. Begitu terjadi perubahan, timbul gugatan baru. Perubahan itu bisa disebabkan oleh marak dan liarnya prostitusi dan judi, sehingga batas-batas yang membuat hal itu selama ditenggang, goyah dan tidak berlaku.

Perubahan dapat disebabkan oleh persepsi masyarakat yang berubah secara wajar maupun secara tidak wajar—sebutlah rekayasa—terhadap penyakit-penyakit sosial itu.

Kita pun tahu, persoalan yang mengandung unsur dilematis dan serba mendua semacam itu, peka terhadap berbagai kemungkinan rekayasa.

Di mana aparat dan perangkat masyarakat yakni aparat dan perangkat pemerintahan terlibat? Jika aparat dan perangkat pemerintahan entah oleh faktor-faktor apa saja, menjadi kurang peka, menjadi masa bodoh. Semakin parah, jika kemerosotan sikap aparat dan perangkat juga disebabkan oleh faktor uang, sebutlah kolusi.

ITULAH sebabnya, upaya mencegah maraknya main hakim sendiri, dikaitkan langsung dengan penegakkan dan penguatan kembali integritas, kompetensi profesional dan disiplin aparat dan perangkat. Tetapi faktor itu pun tidak bisa kita lepas begitu saja.

Kita semua, masyarakat, pemerintah, dan aparatnya, sedang berada dalam perubahan dan pancaroba. Amatlah kompleks dan tali temali kondisi dan sosok perubahan dan pancaroba itu.

Terlalu lama kemerdekaan dan keleluasaan masyarakat dikekang dan ditekan. Perangkat dan aparat yang menjadi instrumen pengekang dan penekan karena terlalu lama cenderung merajalela, tidak bersih, menyalahgunakan wewenang dan kesempatan. Terjadilah bukan saja penekanan, tetapi juga rasa tidak adil.

Ketika reformasi prokemerdakaan dan kebebasan tiba, terbukalah semua klep-klep penutup selama ini. Menurut karakter dan pembawaannya, ekonomi pasar dan demokrasi melepaskan semua kekuatan yang selama ini terhambat.

Pada masyarakat Indonesia yang lama merasakan tekanan, keangkuhan, dan hambatan itu, berlangsung proses akumulasi. Ketika bendungan jebol, meluaplah air ibarat air bah. Perubahan menjadi kata kunci, apa pun artinya, arahnya dan ikutan-ikutannya.

Sekaligus kita dihadapkan pada arah dilematis yang dibawa oleh kenyataan bahwa kita masuk dalam jaringan global. Masing-masing kita, anggota masyarakat dunia, sekaligus anggota masyarakat lokal. Semakin kental kita terseret menjadi anggota masyarakat global, semakin intensif perasaan dan *sentimen* kita sebagai anggota masyarakat lokal. Muncullah fenomena ketegangan.

Pada masyarakat majemuk seperti masyarakat bangsa kita, beban dan intensitas arah serba dilematis itu semakin rumit, jauh lebih rumit dari masyarakat yang homogen. Kenyataan itulah yang sedang kita alami, bahkan di alam dalam tingkat intensitas yang tinggi, tegang dan berkonflik.

KITA bisa lebih panjang membahasnya. Cukup kiranya dikemukakan, kecuali menyampaikan saran seperti penegakkan dan penguatan integritas serta kompetensi profesional aparat, disiplin dan komitmennya, perlu dipertimbangkan dimensi lain.

Dimensi lain itu, akhirnya tiba pada kenyataan bahwa kita sedang menghadapi perubahan dan pancaroba oleh karena itu kita juga harus dapat menghadapi dan menangani perubahan dan pancaroba itu.

Kita juga disadarkan, perubahan dan pancaroba itu harus kita hadapi dalam peralihan dari otokrasi ke demokrasi, dari serba tertutup ke serba terbuka, dari pengekangan ke kebebasan. Luar biasa rumitnya. Luar biasa luas tantangan dan kesempatan yang ditawarkan.

Mau tidak mau, kita harus senantiasa menghentakkan kesadaran kita dan secara kritis mencoba memahami permasalahan yang kita hadapi. Bangsa merdeka ialah bangsa yang sadar. Warga merdeka adalah juga warga yang sadar dan terus-menerus berefleksi serta berlaku secara kritis.

Tajuk Rencana

Tentang Persoalan HAM di Timor Timur, Janganlah Kita Ribut Sendiri!

DEWASA ini, kita semakin ribut sendiri tentang tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur yang dianggap melibatkan beberapa perwira tinggi TNI. Perkembangan itu harus kita pandang wajar atau sebaliknya mengherankan dan sebaiknya membangkitkan perhatian kita secara kritis.

Kita cenderung untuk berpendapat mengherankan dan sebaiknya kita beri perhatian secara kritis.

Keributan itu tampak dari terjadinya polemik secara terbuka yang cukup seru antara Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur dengan Tim Advokasi HAM TNI.

Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur, setelah melakukan penyelidikan di berbagai lokasi di Timtim dan juga di Kupang, mengumumkan penemuannya secara terbuka.

Langkah itu digugat dan disalahkan oleh Tim Advokasi HAM TNI. Tim Advokasi berpendapat, seharusnya hasil penyelidikan itu dilaporkan kepada Komnas HAM seraya terus dilengkapi, termasuk dari sumber-sumber yang berlawanan, misalnya sumber TNI.

Komisi Penyelidik, KPP HAM, berpandangan, disiar-kannya temuan KPP HAM bukan untuk mempengaruhi atau mendiskreditkan pihak tertentu, misalnya beberapa jenderal yang disebut-sebut. Pengumuman lebih lanjut segera menunjukkan Komisi itu bekerja secara serius dan jujur.

Langkah publikasi itu dinilai penting oleh Komisi karena yang dihadapi bukan hanya khalayak dalam negeri, tetapi terutama publik internasional.

Setiap kali diingatkan, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur, di antaranya dengan pertimbangan pokok, agar persoalan itu tetap secara kredibel ditangani dan diserahkan kepada penyelidikan serta — jika diperlukan — pengadilan Indonesia, bukan tribunal internasional.

JIKA bertitik tolak dari pertimbangan itu, bukankah sebenarnya ada titik singgung antara Komisi Penyelidik KPP HAM dengan Tim Advokasi HAM TNI. Titik singgung itu ialah agar penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM dilakukan oleh tim Indonesia dan bahwa cara bekerja dan hasil tim Indonesia itu kredibel dan karena itu diakui dan diterima oleh Komisi HAM PBB.

Ada baiknya, semua pihak, baik KPP HAM maupun Tim Advokasi mempertimbangkan aspek internasional itu. Masuk akal, jika kita tidak berurusan dengan aspek itu. Namun itulah kenyataan konkret yang kita hadapi dan itulah kenyataan yang dihasilkan oleh perubahan, terutama perubahan teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi belumlah secanggih sekarang, ketika tuduhan pelanggaran HAM terjadi di Aceh, Irian Jaya dan daerah lain. Teknologi informasi yang menjadi faktor bangkit dan meluasnya kejadiannya dan kepekaan tentang HAM telah marak ketika berlangsung proses penentuan pendapat serta epilognya di Timor Timur.

Teknologi informasi dan meluasnya kesetaraan dan kepekaan soal HAM itulah membuat apa yang terjadi pada periode pascapenentuan pendapat bukan saja berkepanjangan, tetapi serentak menjadi perhatian dan kepedulian dunia. Komisi Hak Asasi Manusia PBB turun tangan.

Dalam konteks itu, tidakkah bijak untuk mempertimbangkan agar semua pihak, khususnya KPP HAM dan Tim Advokasi bekerja sama dengan saling mengisi untuk menjaga dan memperkokoh kredibilitas penyelidikan oleh tim Indonesia sendiri dan dengan demikian menjauhkan usaha inter-

nasional untuk bukan saja menyelidiki tetapi juga mengadili.

SILAKAN kedua usaha itu, KPP HAM dan Tim Advokasi bekerja keras dan serius mengumpulkan bahan dari sumber-sumber di lapangan. Usaha itu harus berpedoman kepada komitmen menemukan dan menegakkan substansi kebenaran dan keadilan.

Akan ditemukan fakta-fakta. Masuk akal sekiranya ditemukan indikator pelanggaran-pelanggaran. Siapa pun, kabarnya, begitu menyaksikan puing-puing perusakan bangunan dan prasarana di berbagai lokasi di Timtim akan tersentak dan terbawa untuk membayangkan berbagai kengerian yang diasosiasikan dengan pelanggaran HAM.

Tidaklah dapat kita benarkan setiap bentuk dan praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tidak pula orang dapat menutupi dan menyembunyikannya dalam zaman teknologi informasi dan komunikasi super canggih dewasa ini.

Akan tetapi, jika misalnya fakta-fakta itu akan ditempatkan sebagai upaya menemukan proporsi kebenaran dan keadilan, dapatkah fakta-fakta itu ditanggalkan begitu saja dari konteksnya. Bukanlah distorsi yang kita cari atau kita upayakan, tetapi proporsi.

MESKIPUN kini telah menjadi sejarah, tetapi justru sejarah itu tetap masih memberikan pengalaman dan pelajarannya. Kita tahu sejarah Timor Timur yang kontroversial sejak semula dan yang sekaligus menjadi bagian yang sekurang-kurangnya berkoin-sidensi dengan perang dingin.

Masuk akal dan *fair* jika misalnya ikut menjadi pertimbangan bagaimana peranan TNI dalam sistem politik dan pemerintahan lama. Kita menangkap keberatan bahkan oposisi diam-diam terhadap keputusan pemerintah memberikan opsi otonomi luas dan opsi merdeka kepada rakyat Timor Timur.

Kita mencium betapa kegetiran menjadi lebih pahit, ketika pendapat yang anti keputusan pemerintah itu, terutama dari kalangan TNI, ditempatkan pada posisi tak berdaya karena terjepit antara loyalitas dan suara hati.

Tampak benar, hasil referendum membangkitkan suatu perasaan kecewa secara mendalam dan frustrasi karena dirasakan identik dengan kapitulasi. Kapitulasi setelah menjalankan kebijaksanaan dan keputusan pemerintah bertahun-tahun dan bukannya tanpa pengorbanan.

Faktor-faktor semacam itu bisa kita tambahkan misalnya situasi serba tidak menentu dan mencari-cari dengan maksud baik posisi dan peranan TNI sebagai bagian dan akibat dari reformasi prodemokrasi dan prosupremasi otoritas sipil.

UNTUK apa hal-hal itu kita kemukakan? Untuk menemukan proporsi kebenaran dan keadilan. Yang ternyata dan terbukti salah harus disalahkan, bahkan dihukum menurut ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, jika baik proses maupun hasilnya akan seoptimal, mungkin *fair*, konteks seperti kita paparkan di atas tidakkah sepatutnya menjadi bahan pertimbangan dan referensi?

Kemauan mempertimbangkan proporsi dan konteks itu juga kita maksudkan agar dalam usaha penyelidikan terhadap tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur, kita tidak ribut sendiri, bersitegang sendiri, *berperang* sendiri.

Pertimbangan itu tidak mengurangi kejujuran dan keseriusan menemukan kebenaran dan keadilan. Pertimbangan itu barangkali justru memperkuat *fairness* dan kredibilitas.

Tajuk Rencana

Menjelang Hari-hari Keagamaan, Mari Kita Ciptakan Kedamaian

SUNGGUH simpatik imbauan Menteri Agama Tolchah Hasan. ruh umat beragama diimbau mewujudkan kegembiraan hari raya keagamaan masing-masing tanpa menimbulkan salah paham umat yang

Imbauan itu simpatik, karena menjelang dua hari raya besar Kristen Islam—Natal dan Idul Fitri—kondisi kontekstual kita saat ini jauh dari mana menggembirakan. Kekerasan dan konflik masih terjadi di berbagai tempat; di berbagai tempat lainnya menyimpan potensi konflik yang siap meledak setiap saat.

Di Ambon—salah satu lokasi konflik yang berbau agama—dua kemarin diberitakan tenang. Berita yang sama sudah sering kita dengar dan lihat, tetapi dua hari kemudian terjadi aksi kekerasan. Sekali kita berharap, berita itu sebagai kenyataan yang berumur panjang; ternyata ibarat api dalam sekam, yang bisa membara setiap ada peluang.

Kita sebut Ambon, tidak menyebut Aceh, Riau, Irian Jaya, daerah-daerah genting lainnya, sebab menurut perasaan kita itulah konflik yang berbau konflik antaragama. Walaupun sebaliknya, akibat dan arogansi ditimbulkan tetap sama, yakni konflik dan kekerasan dengan harta benda dan jiwa manusia.

KASUS-kasus main hakim sendiri yang merebak dalam masyarakat belakangan ini, ibarat limpasan limbah air bah kegembiraan, setelah setahun merasa tersekat. Sebaliknya dalam suasana serba sedang atau kembali, dalam suasana serba anomi, limpasan air bah itu gampang dimanfaatkan, dibelokkan, dan diarahkan untuk kepentingan politrentu.

Psikologi sosial di atas kurang lebih bisa kita pakai untuk melihat kasus main hakim sendiri. Latar belakang dan dimensinya bertali-tali, juga dalam kasus Doulos di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 2) malam. Apalagi sampai jatuh korban jiwa manusia, masyarakat tahu duduk soal yang sebenarnya. Tujuannya solusi yang diberikan, dan tidak terjadi pengkambinghitaman.

Dalam konflik-konflik berlabel agama, misalnya kasus Ambon, nisbertentangan dengan nilai-nilai dasar agama masing-masing. b, ajaran hakiki semua agama adalah perdamaian, bukan peruan. Agama itu membebaskan dari keinginan sebagai yang paling r dan paling berhak.

Oleh karena itu, dalam kasus-kasus konflik berbau agama, bahkan yang bertahun-tahun terjadi seperti Inggris dan Irlandia, selalu sul pertanyaan, mengapa terjadi? Bukankah ketakwaan agama justru dari pembebasan diri semacam itu?

Hari raya Natal bagi umat Kristen dan hari Idul Fitri bagi umat Islam—dua hari besar keagamaan yang akan dirayakan—niscaya dari aroma kekerasan dan konflik. Yang dirayakan adalah peraian, horizontal (antarsesama) dan vertikal (manusia dan ipt). Perdamaian tidak dicapai dengan kekerasan dan pemaksaan, melainkan dengan pengakuan atas keberagaman umat ciptaan.

Agama-agama itu mempersatukan, membebaskan, dan bukan membuat sekat-sekat perbedaan.

PENGALAMAN kita mengajarkan, agama sering dan gampang dipakai sebagai pemacu kerusuhan. Kasus Ambon yang hampir setahun sebagai kasus berlatar belakang agama. Agama bahkan menjadi sarana untuk mensahkan perbedaan dan pemisahan warga masyarakat.

Belajar dari sana, pernyataan Menteri Tolchah Hasan, mengingatkan bahwa untuk mengeliminasi kemungkinan itu, dibutuhkan peran tokoh agama. Peranan itu terutama dibutuhkan guna menjerahkan permasalahan dan meyakinkan umatnya agar tidak mudah terpancing. Pengetahuan yang benar dan ketakwaan beragama akan membuat penganutnya merunduk; dan tidak gampang dibelokkan untuk kepentingan tertentu, termasuk tidak terpengaruh oleh provokator.

(Kita ingat kembali kasus-kasus Rengasdengklok, Tasikmalaya, Ketapang, Kupang, Banyuwangi, Situbondo, dan lain-lain.)

Apa yang terjadi dalam peristiwa Doulos, Rabu malam, hendaknya tidak jadi pemacu atau alasan balas dendam. Melihat besarnya reaksi masyarakat, memang sepatutnya diusut tuntas, dijelaskan latar belakang dan duduk soalnya. Dengan kejelasan dan penegakan hukum atas pelaku-pelakunya, diharapkan kasus serupa tidak terjadi di tempat lain atau dikembangkan untuk kepentingan politik tertentu.

SELAMA ini realitas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dipahami sebagai kenyataan yang merugikan. Pengalaman selama 32 tahun, di mana SARA ditempatkan sebagai alat, menjadikan perbedaan sebagai kambing hitam. Oleh karena itu harus dihindari, ditabukan, bahkan hanya di tingkat wacana.

Sudah saatnya realitas SARA dipahami sebagai anugerah. Kita syukuri itu sebagai kekayaan kultural, seperti yang digagas dan dibangun para Bapak Bangsa. Memang, mengubahnya butuh proses panjang dan lama, bahkan perlu jatuh bangun. Semua agama—salah satu unsur SARA—berhak hidup dan berkembang; dan itu justru kebesaran sebagai bangsa Indonesia.

Imbauan simpatik Menteri Agama niscaya kita tangkap dalam semangat di atas. Bahwa, intensitas ritual persiapan menyongsong hari-hari besar keagamaan—di antaranya bulan suci Ramadhan bagi umat Islam dan masa Adven bagi umat Kristen Katolik—justru menempatkan kita sebagai bagian dari sebuah bangsa besar dan majemuk, bernama Indonesia ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Salah satu tolok ukurnya, menjelang hari-hari raya keagamaan ini, mari kita ciptakan perdamaian atau rekonsiliasi untuk berbagai persoalan; mulai persoalan-persoalan pelik politik hingga gampang-gampang-sulit semacam penghargaan atas realitas keberagaman agama.

Tajuk Rencana

Satu per Satu Marilah Kita Urai Warisan Benang Kusut Masai Itu!

ONDISI serba amburadul itulah warisan yang diterima oleh peme-
ran Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wapres Me-
Soekamoputri. Dengan sendirinya juga menjadi warisan kita be-
sebagai bangsa.

ondisi kusut masai itu harus kita urai satu per satu. Dan ketika ki-
gurainya, sekaligus diingatkan, jangan sampai kita membuat ke-
in baru. Alangkah muskil dan rumitnya pekerjaan itu. Dan memang
pekerjaan menentukan yang kita hadapi.

EMIKIRAN itu muncul lagi tatkala kita mengikuti sambutan Presi-
ada pelantikan Dewan Pengembangan Usaha Nasional. Di antara-
saranakan oleh Ketua DPUN Sofjan Wanandi, agar usaha-usaha
erlibat atau mempunyai kredit bermasalah, tetap bisa bekerja.
emikiran itu terlontar dengan disertai argumen bersemangat oleh
an grup Texmaco. Pengusutan secara hukum terhadap kredit grup
ut, silahkan berjalan sewajarnya. Akan tetapi biarkanlah kegiatan
grup itu berjalan normal, sehingga produksi, pemasaran, dan
van tidak terganggu.

erutama pada zaman reformasi prodemokrasi, hukum untuk kebe-
dan keadilan, pilihan tidaklah sederhana. Kita bisa merasakan
betapa tuntutan terhadap keadilan, termasuk keadilan sosial eko-
legitu kuat dan menjadi salah satu tuntutan utama reformasi.

apa pun yang mau membuka hati tidak dapat mengingkari atau
cilikan adil dan patutnya tuntutan itu. Sebab memang luar biasa
ilasi praktik-praktik pemberian fasilitas kredit di masa lalu kepada
bengusaha besar. Praktik itu, menurut kenyataannya, secara
, disertai KKN, korupsi, kolusi, nepotisme dengan format dan ber-
ragam.

risis ekonomi yang menimpa Indonesia dan memuncak dalam
1997, bukan hanya karena faktor kredit KKN. Ada faktor obyektif
bersifat regional dan berdampak domino. Akan tetapi tidak dapat
an, praktik kredit KKN menjadi salah satu faktor pokok terjadinya
dan terhambatnya proses keluar dari krisis.

ita tahu akibat krisis itu dalam angka-angka bertambahnya kem-
mlah penduduk miskin, dalam bertipatgandanya pemutusan hu-
in kerja dan pengangguran, dalam munculnya generasi yang hi-
anak-anak yang mati atau tumbuh menjadi bodoh karena keku-
n gizi.

agaimana umumnya nasib mereka yang terlibat kredit macet dan
osiasi atau berkonotasi KKN? Usahanya diambil oper pemerintah
liarkan tutup. Sekali-sekali mereka dipanggil ke polisi atau ke ke-
an untuk diperiksa. Beberapa orang dicekal ke luar negeri.

ecara fisik, umumnya mereka tetap hidup leluasa, bahkan kata
, sebagian asetnya aman di luar negeri. Amatlah berbeda dengan
; krisis yang menimpa masyarakat luas.

ementara itu, proses seleksi, restrukturisasi maupun hukum di be-
lembaga yang menangani, seperti BPPN, BUMN, dan lembaga pe-
saan, tuntutan dan pengadilan, berlangsung amat lamban.
gian karena rumitnya keadaan. Sebagian karena tali-temali kepen-
i. Sebagian karena faktor perpolitikan.

KEADAAN itu berlangsung sampai kini dan keadaan itulah yang di-
oleh pemerintahan Gus Dur. Ada perbedaan besar. Masyarakat
dan luar menaruh harapan dan kepercayaan besar terhadap pe-
tahan baru.

Sejak pemerintah Presiden Habibie, berlangsung proses demokra-
si yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Keterbukaan
yang salah satu perangkatnya adalah kemerdekaan pers (media massa)
semakin nyata. Hampir tidak mungkin lagi usaha menutup-nutupinya. As-
pek inilah yang orang masih sering melupakannya.

Sebaliknya dengan komitmen yang konsisten terhadap reformasi
prohukum dan keadilan, koreksi secara kebijakan maupun koreksi dan
penindakan secara hukum, makan waktu. Justru inilah dilema atau ironi
yang lain bahwa *due process of law* bahwa penerapan dan penindakan
menurut hukum, makan waktu.

Sementara itu kepada kita ditunjukkan sisi yang lain dari persoalan
besar yang menyangkut kredit macet ber-KKN atau tidak ber-KKN. Ialah
bagaimana dengan usaha mereka, pabrik mereka, industri mereka.
Ditutup, dibiarkan ditutup menjadi besi tua, menelantarkan produksi, pe-
masaran, serta memutuskan hubungan kerja?

Atau seperti diusulkan oleh pimpinan Dewan Pengembangan Usa-
ha Nasional, usaha dari para pengusaha bermasalah kredit macet KKN
atau non-KKN itu, biarlah terus berjalan. Tentang bagaimana pemilikan-
nya kemudian, biarlah diputuskan secara benar dan adil sesuai proses
hukum.

Dapatkah pemikiran itu diterima? Kita mendua, di satu pihak, saran
itu masuk akal. Di lain pihak, ada kecemasan, jangan-jangan itu opsi itu
membuka peluang untuk kembalinya praktik bisnis lama ialah kem-
balinya posisi kuat dan dari posisi itu mengulangi praktik-praktik lama.

Dengan sikap mendua itu, kita berpendapat: kita coba saja saran itu
dengan disertai komitmen reformasi yang konsisten terhadap tindakan
koreksi dan hukum serta terhadap penyeleenggaraan usaha bisnis yang
wajar sesuai aturan dan perilaku bisnis semestinya. Jangan mengulangi
praktik KKN yang tidak adil, mengangakan kesenjangan serta merusak
mental pejabat dan birokrasi.

KITA bahkan bertanya diri, apakah cara itu merupakan langkah dari
pola yang kita tawarkan di atas: warisan benang kusut masai, kita urai
satu persatu dengan komitmen yang konsisten terhadap hukum untuk
keadilan dan pertimbangan fisibilitas.

Dalam lingkungan lain, termasuk lingkungan sosial politik, keaman-
an dan hak-hak asasi manusia pun, warisan benang kusut masa itu
ditinggalkan pula kepada pemerintahan Gus Dur dan Megawati.

Warisan kusut masai itu juga harus diurai satu per satu. Prinsip dan
komitmennya sesuai dengan tuntutan reformasi adalah demokrasi,
hukum, hak asasi, kebenaran, dan keadilan. Sebaliknya kita tahu apa ar-
ti mengurai benang kusut?

Mau tidak mau harus juga terpaksa mempertimbangkan fisibilitas,
proporsi, konteks, dengan tetap berpegang jangan ada *impunity*, semua
tindakan dipertanggungjawabkan dan ditindak sesuai dengan pertang-
gungjawabannya.

Dan, jika akhirmya semua komitmen yang konsisten itu *toh* perlu
waktu dan proses, sesungguhnya, itulah implikasi dari reformasi yang bu-
kan revolusi, bukan pula evolusi.

APA perangkat yang diperlukan agar reformasi yang makan proses
dan waktu, berlangsung konsisten dan dalam tempo yang masuk akal?
Transparansi, keterbukaan, serta kontrol. Kontrol oleh lembaga seperti
DPR. Kontrol oleh lembaga seperti media massa. Kontrol oleh partai-par-
tai politik, LSM serta masyarakat.

Tajuk Rencana

npa Kemerdekaan Pasti Buruk; dengan Kemerdekaan, Bisa Buruk, Bisa Baik

BERTURUT-turut kantor redaksi surat kabar dan majalah didatangi oleh kelompok masyarakat. Mereka memprotes berita pers atau atau komentarnya atau karikaturnya. Kelompok-kelompok masyarakat itu adakalanya bisa menerima penjelasan, adakalanya menuntut surat kabar atau majalah minta maaf secara terbuka. Beberapa waktu yang lalu, beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam mendengar pendapat dengan Komisi I DPR. Beberapa orang semacam menyampaikan keluhan dan protes terhadap perlakuan kelompok masyarakat terhadap pers. Perlakuan itu dinilai mengancam. Beberapa anggota DPR Komisi I menanggapi, tidak dengan membela pers tetapi ikut menyalahkan pers yang suka *memlintir* berencemarkan nama baik, berprasangka dan melakukan *trial by the press* pengadilan oleh pers.

BAGAIMANA kita harus menempatkan dukunya perkara. Sekiranya pers dan media massa menerima dan menyerah begitu saja, bagaimana komitmen kita melaksanakan reformasi yang prodemokrasi karena itu juga prokemerdekaan pers. Mengambil sikap bersitegang dan mau benar sendiri, tidak pula selengan kenyataannya. Harus diakui, pers tidak senantiasa akurat, proporsional liputan pemberitaannya dan belum selalu saksama lengkap dalam melakukan cek dan cek ulang. Karena itu, perlu ditemukan dan ditumbuhkan saling pengertian antara pers dan masyarakat dalam melaksanakan kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers menajatkan kita bersama. Sebab, kemerdekaan pers merupakan perwujudan hak asasi sebagai ekstensi dari kemerdekaan berpikir dan beropini secara lisan atau secara tertulis. Kemerdekaan pers juga karena itu merupakan pilar demokrasi. Tiap-tiap mungkin demokrasi berfungsi apalagi tumbuh subur dan kokoh tanahnya kemerdekaan pers. Demokrasi menopang pemerintahan dan proses pemerintahan secara terbuka, sehingga dapat dikontrol. Media massa menarungkat bagi keterbukaan proses kekuasaan.

KITA bahkan baru saja mengalami bersama, apa akibat buruk dari pemerintahan demokratis dan tiadanya pers yang bebas. Wajar-wajar akumulatif dan negatif dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, hukum dan hak-hak asasi manusia dewasa ini, ikut disebabkan tiadanya demokrasi dan tiadanya kemerdekaan pers. Benar kata Albert Camus, Thomas Jefferson dan lain-lain: kemerdekaan pers bisa baik, bisa buruk. Tetapi tanpa kemerdekaan pers, yang adalah keburukan. Demokrasi bukan yang terbaik. Demokrasi bahkan yang menyebutnya sebagai *the second worst*. Apa yang *the first*? Otokrasi yang mengingkari demokrasi dan mengingkari kemerdekaan pers.

Bukanlah *apologia* atau pembelaan diri yang diutarakan di sini, justru menyajikan *truisme* seperti apa adanya. Opsi menjadi jelas. Dengan demokrasi dan dengan kemerdekaan pers, tidak dengan sendirinya seberjalan baik dan berhasil baik.

Opsi itu lebih menegaskan, dengan demokrasi dan dengan kemerdekaan pers, bisa baik, bisa buruk. Tanpa demokrasi dan tanpa kemerdekaan pers, hanya bisa buruk. Kini, apalagi di masa lalu, kita dari negara yang berkembang apalagi yang sangat majemuk masyarakatnya, akan begitu saja percaya kepada pendapat itu.

Akan tetapi, sekarang, ketika kita sedang mengalami warisan rezim otoriter tanpa kemerdekaan pers (yang *genuine*) yang amburadul di lingkungan kita sulit untuk tidak menunjang pendapat pertama. Apalagi kita hidup dalam zaman perubahan besar secara global, peralihan dari otokrasi ke demokrasi.

KINI, di kalangan masyarakat pers yang tahu diri, sering timbul gugup diri, andaikata dulu pers bisa dan berani mengungkap praktik-praktik pemberian kredit dan KKN secara terbuka dan efektif, kebobrokan ekonomi dan mental kita barangkali tidak separah sekarang!

Benar, kemerdekaan pers dimulai dengan mencari, meliput dan menyajikan secara terbuka dan secara faktual apa adanya. Tidak ditutup-tutupi. Justru di situlah letak fungsi dan efektivitas pers, yakni terbuka secara faktual, secara benar.

Pemerintahan Presiden Habibie merintis kemerdekaan pers dan keterbukaan. Karena pemerintahannya transisional, keterbukaan masih terbatas. Banyak hal masih tertutup. Sekarang dalam pemerintahan baru hasil pemilihan umum yang demokratis, keterbukaan lebih berkembang.

Keterbukaan demokrasi lebih optimal. Demikian pula keterbukaan proses kekuasaan dan pemerintahan. Pers mengikuti serta mengambil peranan pro-aktif. Keterbukaan, *openbaarheid*, *publisitas* menjadi esensi pekerjaan media.

KETERBUKAAN itu saja, betapa pun kita secara kritis menyadari dan menerima kehadirannya sebagai substansi dan atribut demokrasi, bukannya tanpa efek-efek *shock* atau kejutan, ketika terlaksana.

Seorang menteri, kabarnya, sebelum membuka suatu kasus besar, minta persetujuan anggota DPR dulu, dibuka atau tidak dibuka. DPR setuju dibuka. Ketika kasusnya dibuka dengan disertai fakta dan data, kabarnya, anggota DPR tertegun. Dalam perkembangannya kemudian, ada anggota DPR yang memprotes dibukanya kasus, yang ia ikut menyetujuinya.

Keterbukaan yang merupakan implikasi dan konsekuensi demokrasi serta kemerdekaan pers, memang bisa memberikan dampak menjjutkan. Dan melalui reaksi serta ekspresi yang berbeda-beda, hal itulah yang kini sedang terjadi. Orang terperanjat karena keterbukaan atau karena dibukanya hal-hal yang selama ini ditutupi atau berhasil ditutupi.

KETERBUKAAN itu mau tidak mau berarah menyeluruh. Membuka dan mengungkap kasus, seperti berbagai kasus kredit macet itu. Membuka kekuasaan dan prosesnya lewat kritik dan koreksi. Membuka cakrawala baru dan memperluas batas-batas kesantunan yang dihubungkan dengan kekuasaan serta simbol-simbol kekuasaan.

Pangkal tolak ini dulu, marilah kita pahami dan setiap kali kita bicarakan akan diteruskan atau tidak. Artinya kemerdekaan pers itu akan dilanjutkan atau tidak. Keterbukaan yang dalam dirinya bisa membawa dampak kejutan-kejutan itu akan kita lanjutkan atau tidak.

Setelah menyepakati titik tolak itu, segera kita buka wacana: tetapi bukankah keterbukaan pers itu haruslah faktual, proporsional, *cover both sides*, meliput kedua pihak, saksama, cek dan cek ulang serta memperhatikan rasa perasaan kesantunan masyarakat!

Jawaban terhadap gugatan wacana itu, ya, positif ya. Keterbukaan atau kemerdekaan pers haruslah faktual, saksama, cek dan cek ulang, meliput dua pihak, menghindari *trial by the press*. Tetapi, misalnya soal pengadilan oleh pers itu! Dulu serba tertutup, kini serba terbuka. Terbukanya atau dibukanya kasus-kasus itu saja, jangan-jangan sudah membangkitkan perasaan dan anggapan diadili oleh pers.

KITA terima kritik dan kontrol berbagai kelompok masyarakat terhadap pers, terhadap kelemahan pers. Kelemahan dan kesalahan pers bisa berupa fakta tidak lengkap dan tidak saksama, kurang cek dan cek ulang, kurang proporsional, *sebrono* kurang disertai rasa tanggung jawab dan lain-lain.

Silahkan kontrol dan koreksi, tetapi dapatkah kita sepakat, bersama dengan usaha terus-menerus memperbaiki kelemahan kemerdekaan pers, bentuk kontrol kritik dan koreksi terhadap pers janganlah yang berdampak menyurutkan api kemerdekaan pers.

Pendapat Albert Camus dan lain-lain agar senantiasa mengingatkan masyarakat pers. Kemerdekaan pers bisa buruk, bisa baik. Tanpa kemerdekaan pers, hanya satu opsi, pasti buruk.

Ungkapan itu juga berarti, kemerdekaan pers seperti halnya demokrasi tidak dengan sendirinya baik. Agar baik harus dibuat baik, diupayakan baik. Kita bekerja sama saling mengingatkan agar opsi baik itulah yang terwujud.

Tajuk Rencana

Indurnya Dua Direktur, Memperjelas Soal Betapa Berat Masalah PLN

INDURNYA dua pimpinan teras PT PLN, yakni Direktur Utama Jatriya dan Direktur Perencanaan/Ketua Tim Renegosiasi Kontrak Swasta Hardiv H Situmeang, memperjelas persoalan, bahwa PLN jauh untuk bisa lolos dari masalah besar yang melilitnya.

Menyebutkan alasan bahwa mereka berbeda pendapat secara umum dengan pemerintah dalam menangani penyelesaian kontrak pembelian listrik (*Power Purchase Agreement/PPA*) swasta, ke belakang mundur dari jabatannya sejak Selasa (21/12).

Dalam hal apakah perbedaan pendapat itu? Sejauh yang dapat kita lihat, yakni sekitar ketidaksetujuan pemerintah atas penyelesaian kontrak secara paralel antara pendekatan bisnis dan hukum yang diterapkan PLN. Pemerintah ingin, penyelesaian tetap dilakukan di luar pengadilan. Hanya itulah persoalannya, kita tak tahu.

Sebelumnya, PLN memang tengah menggugat kontraktor listrik PT Paiton Energy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tindakan itu merupakan upaya lanjutan dari proses negosiasi bisnis selama beberapa bulan tanpa hasil, atas proyek yang sangat diduga berbau kolusi, dan nepotisme (KKN) tersebut.

Setelah dibawa ke pengadilan itulah PT Paiton baru mau menyetujui harga jual listriknya ke PLN, dari 8,5 sen dollar AS per kilowatt hour (kwh), menjadi 3,3 sen dollar AS per kwh.

ASALAHNYA, bila benar perpaduan antara pendekatan komersial dan pendekatan hukum itu telah terbukti efektif, lantas mengapa pemerintah tidak menyetujuinya. Dan, seperti dikatakan Menko Ekuin Kwik Kuncoro, pemerintah memang akan mencabut semua urusan di pengadilan agar proses renegosiasi bisa terselenggara.

Untuk apa yang akan melakukan renegosiasi, pemerintah juga sudah membentuk tim atas dasar Keppres No 166/1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT PLN tanggal 18 Desember 1999. Dalam tim pimpinan PLN tidak termasuk dalam "tim inti" yang diketuai Menko dan hanya beranggotakan para menteri.

Menjawab pertanyaan di atas, yang berkembang barulah dugaan-dugaan. Antara lain, bahwa Pemerintah Indonesia telah mendapat tekanan pemerintah Amerika Serikat yang merasa para pengusahanya telah dirugikan oleh cara-cara pemaksaan Indonesia dalam mengubah kontrak. Apakah dugaan itu benar, belum ada konfirmasi, kecuali dari pimpinan PLN yang mengundurkan diri. Akan tetapi mengacu pada pengalaman kita pada praktik perdagangan dan investasi global, sangat wajar hal itu terjadi, dan sangat lazim pula AS melakukannya. Termasuk kepada kita pada tahun lalu, ketika AS mendesak kita untuk memenangkan pejuangannya yang terlibat dalam tender di PT Telkom.

SEBAGAI BUMN pemegang oligopoli pengadaan listrik, PT PLN yang tengah sakit keras karena dilanda kanker ganas. Selain harus menanggung beban-beban investasi yang dilakukannya sendiri, perusahaan tersebut juga harus memikul akibat kebijakan program swastanisasi yang salah kaprah.

Ditambah kekangan kebijakan harga jual listrik di dalam negeri, dengan misalnya, PLN harus disubsidi hingga Rp 17 triliun. Subsidi yang bisa dihilangkan dengan cara menaikkan tarif seperti diusulkan pemerintah PLN selama ini. Akan tetapi, selain terbentur pada kondisi keuangan rakyat, sekadar menaikkan tarif juga dinilai tidak adil buat konsumen selama PLN tak mampu bebahan diri.

Persoalan terbesar yang harus segera diatasi untuk mencegah PLN

bangkrut adalah masalah pembelian listrik swasta. Akibat kesalahan masa lalu, PLN yang kini sudah kelebihan daya, masih diharuskan membeli listrik swasta dengan harga jauh lebih mahal—bisa dua kali lipat lebih—dari harga jual PLN pada konsumennya.

MENGAPA bisa begitu, antara lain, karena rata-rata investasinya di *mark up* sangat tinggi, karena melibatkan kroni-kroni penguasa waktu itu, karena dulu perjanjiannya dibuat sangat menguntungkan pihak swasta dengan tanpa mempedulikan kepentingan PLN dan rakyat konsumen listrik.

Semua itu terjadi tidak begitu saja. Sebab pada waktu itu pun, berbagai pihak—pengamat ekonomi, anggota DPR, bahkan lembaga serta negara donor—sudah memperingatkan kemungkinan yang bakal terjadi di masa depan atas bisnis berskala milyaran dollar per proyek tersebut.

Pada sisi lain, kemudahan dan privilese itulah yang justru dijual para "mitra domestik" kepada pemodal mancanegara untuk ikut dalam program swastanisasi listrik yang baru dimulai awal tahun 90-an, yakni beberapa saat setelah terjadi krisis pasokan listrik.

Kenyataannya, semua kontrak PPA yang melibatkan begitu banyak perusahaan besar dari dalam dan luar negeri, dinilai perlu dinegosiasikan kembali. Pada saat terakhir, PLN sendiri tengah melakukan negosiasi ulang dengan 27 produsen listrik swasta.

SESUINGGUHNYA apa yang terjadi di PLN, dengan sedikit perbedaan bobot dan ragamnya, terjadi pula di berbagai unit usaha BUMN lain. Di berbagai tempat itu pun upaya renegosiasi kontrak dengan berbagai pihak dilakukan.

Sehingga, wajar apabila proses renegosiasasi pada kontrak-kontrak yang kini dianggap bermasalah, cukup mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, di dalam dan luar negeri. Sebab, selain begitu banyak pihak yang akan terlibat dan dilibatkan, yang akan merugi atau dirugikan, juga pada kasus PLN, melibatkan nilai investasi yang begitu besar.

Karena itu tidak heran bila berbagai kalangan memperingatkan, bahwa menangani masalah tersebut harus sangat hati-hati, sebab taruhannya kredibilitas bangsa di mata investor internasional. Kalau itu terjadi kita akan rugi besar, sebab sekarang kita tengah memacu diri untuk memulihkan kepercayaan mereka dalam rangka menggerakkan kembali roda perekonomian.

Jangan lupa pula, apa dan siapa pun mereka. Faktanya mereka sudah terlibat dalam proyek investasi berjangka panjang di sini, dan bukan sekadar investor *hit and run*. Mereka berlaku demikian, bukan pula mumi kemauannya sendiri, melainkan juga karena kita.

Akan tetapi, bukankah lembaga peradilan adalah institusi paling baik untuk menyelesaikan masalah? Bisa ya, bisa tidak, karena semua akan sangat tergantung pada konteks latar belakang masalah dan tujuan akhir yang hendak dicapai.

OLEH sebab masalahnya juga bisa bertali-temali dengan berbagai urusan lain, maka bisa jadi tidaklah mudah untuk menyelesaikan masalah PLN. Ibaratnya ketika harus berjalan serempak, padahal semua dalam kondisi tertatih-tatih, bukankah kita masih harus menengok ke kiri dan ke kanan agar tidak ada yang tertinggal?

Dalam kondisi demikian, pada akhirnya kearifan yang benar-benar diperlukan. Soal mau memilih jalan apa, silakan!

Tajuk Rencana

Kita Beri Ruang Bernapas pada Rakyat dengan Menjaga Inflasi Rendah

SETELAH dua pekan Puasa dijalani, dua hari lagi perayaan Natal, kurang dari dua pekan Tahun Baru, secara umum kita masih dapat menyaksikan suasana pasar yang relatif tenang.

Tak ada teriakan barang hilang dari pasar, seperti terjadi pada komo-s minyak goreng selama berbulan-bulan pada tahun lalu. Tak tertang-pula keluhan luas akibat melonjaknya harga barang-barang tertentu g dinilai sudah di luar batas wajar.

Bahwa dari pemantauan di beberapa pasar tercatat kenaikan harga mlah bahan pokok dalam hari-hari terakhir ini, itu pun tampaknya ma-dalam "batas maklum" pasar. Maklum bulan Puasa, maklum mau Na-maklum mau Tahun Baru.

Selain karena pasar memang mengenal maklum, bersamaan de-n itu secara relatif juga muncul faktor kompensasi atas kenaikan har-barang tertentu. Yakni, terjadinya tendensi penurunan harga pada ba-barang lain, terutama produk pertanian.

Maka, bila kondisi umum kehidupan pasar seperti itu bertahan, at boleh jadi estimasi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sugito, bah-angka inflasi tahun 1999 diperkirakan masih berada di bawah dua sen, akan menjadi kenyataan. Artinya, meskipun inflasi bulan Desem- ini akan jauh lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, tetapi masih isar pada angka satu persen.

WAJAH pasar domestik pada tahun ini memang jauh berbeda dari n sebelumnya, tahun ketika puncak krisis ekonomi berlangsung. Dari pasokan, tak terjadi lagi kelangkaan barang untuk hampir seluruh utuhan utama rakyat. Dari sisi harga, yang terjadi malah deflasi, sei-ai ekspresi dari penurunan harga secara relatif.

Kita kemukakan angka-angkanya. Untuk tahun kalender 1999, se-a Januari-November total inflasi 0,27 persen (bandingkan dengan pe-e sama tahun lalu yang mencapai 75,25 persen atau tahun 1997 yang persen!). Sementara untuk tahun anggaran (April-November 1999), deflasi 3,68 persen.

Sepanjang tahun ini inflasi juga baru muncul sejak Oktober (0,06 sen), yang berlanjut pada November (0,25 persen), dan hampir di-tikan naik lagi pada Desember ini. Sedangkan pada bulan-bulan se-mumnya yang terjadi deflasi.

PASAR yang "keterlaluan" tenangnya itu, pada satu sisi memang bi- memberikan gambaran menggembirakan atas hasil dari macam-ma- kerja kita untuk dapat menguasai keadaan krisis.

Dalam konteks ini, deflasi bukan sekadar hasil dari bekerjanya fak-koreksi di pasar—dan oleh pasar itu sendiri—atas kenaikan harga g berlangsung secara tak terkira tahun lalu, tetapi juga karena kita su- lebih mampu mengendalikan berbagai faktor yang pernah membuat ar panik.

Apakah faktor-faktor yang telah mampu kita kendalikan itu? Misal- tsaja, pasokan barang dan jasa, keamanan jalur distribusi, secara re-pulihnya kembali rasa aman-tenang-stabil, hingga tingkat gejala

harga rupiah yang tak lagi sehebat tahun lalu.

AKAN tetapi pada sisi lain, di balik pasar yang demikian itu juga ter-simpan realitas yang menyedihkan dari rakyat selaku pelaku ekonomi, selaku partisipan pasar.

Hancurnya daya beli rakyat oleh sebab tekanan inflasi amat tinggi di tengah merosotnya kegiatan ekonomi secara dramatis—tahun 1998 ekonomi minus hampir 14 persen—menyebabkan bagian terbesar rak-yat tidak berdaya untuk ikut akses ke pasar. Jadi, pasar yang begitu te-nang, juga merupakan refleksi dari rendahnya partisipasi belanja rakyat di pasar.

Soal inilah terutama yang selayaknya kita beri perhatian berkaitan dengan momentum Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Kita ingin agar pa-da momen-momen tersebut, rakyat yang mungkin sudah mengais ke sa-na ke mari untuk sekadar bisa berbelanja, tak perlu harus kecewa lagi karena harga barang yang dimau tiba-tiba melonjak tinggi dan tak lagi dapat ia jangkau.

Kita sangat berharap semua pihak terkait memberikan perhatian le-bih pada soal ini, termasuk dari para pedagang yang lazimnya pada pun-cak-puncak belanja seperti ini memakai jurus "aji mumpung".

Bagi pemerintah dan aparat kepolisian, merupakan tantangan bes-ar, bagaimana mengamankan jalur distribusi barang pada saat arus mudik mulai meningkat akhir-akhir ini.

SELAIN untuk sedikit memberikan ruang dan kesempatan bergem-bira bagi rakyat saat ber-Hari Raya, usaha keras menjaga agar inflasi tak bergerak di luar perkiraan, juga untuk kepentingan masa depan.

Masa depan yang kita maksud, pertama-tama tentu, dalam rangka stabilisasi perekonomian. Tetapi, menjaga inflasi hari ini juga menjadi kian penting, karena kita tahu pada beberapa bulan mendatang inflasi akan makin sulit dihindari.

Dari berbagai keterangan pemerintah kita ketahui bahwa pada tahun anggaran mendatang harga BBM dan tarif listrik akan sulit untuk bisa dipertahankan pada level sekarang. Pada satu sisi, karena beban subsidi sudah terlalu memberatkan; pada sisi lain, karena pemerin-tah harus membiayai banyak hal padahal uangnya amat terbatas.

Tanpa tahu bagaimana hitung-hitungannya pun, kita sudah sangat memahami, terutama kenaikan harga BBM akan memberikan pengaruh yang luar biasa luas pada struktur harga barang dan jasa lain. Inflasi de-ngan sendirinya akan terdorong naik, yang artinya lagi-lagi, beban hidup rakyat akan bertambah susah, lebih-lebih karena pada saat yang sama, kinerja ekonomi belum akan memberikan nilai lebih pada rakyat.

DALAM konteks itu, keberhasilan kita menjaga stabilitas harga barang dan jasa sekarang hingga saatnya kenaikan harga BBM, akan ikut memberikan ruang bempas pada rakyat. Ruang sesempit apa pun yang mampu membenkan rasa lega pada rakyat, akan sangat berman-faat bagi upaya penciptaan rasa aman-stabil-tenang.

Tajuk Rencana

Hari Natal dan Kisah Pengungsian Manusia Secara Terpaksa

BAGI umat Kristen, perayaan Natal merupakan perayaan yang samenggembirakan. Jauh sebelumnya perayaan Natal sudah diperingati. Di mana-mana masyarakat sibuk berbelanja, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Sementara itu, di banyak gereja, umat juga lebih tekun beribadat dan menaikkan doa dan mohon pengampunan. Namun, hanya itulah yang dilakukan selama perayaan Natal? Adakah sesuatu yang lebih mendalam yang dilakukan umat Kristen seluruh dunia memperingati kelahiran Yesus di Kota Betlehem itu?

Pada awalnya, kisah Natal bukanlah kisah yang menggembirakan. Ini adalah sebuah kisah mengenai keluarga dan masyarakat kecil yang terpaksa untuk pindah meninggalkan tempat kerjanya demi menuruti kehendak penguasa.

Waktu itu, sekitar tahun 4 sebelum Tarikh Masehi, pasangan Yusuf dan Maria, yang berdiam di Kota Nazareth (Israel Utara)—bersama dengan ribuan rakyat lainnya—diharuskan kembali ke kota kelahiran mereka masing-masing untuk didaftar ulang. Penguasa Romawi ingin mengetahui berapa jumlah rakyat jajahan yang harus dikenai wajib pajak.

Demi menuruti kehendak penguasa itu, maka Yusuf dan Maria terpaksa menempuh perjalanan kaki sejauh 128 km ke selatan menuju Kota Betlehem, yang terletak sekitar 10 km selatan Yerusalem. Betlehem adalah kota asal usul nenek moyang dari Yusuf. Dan, di kota itulah, di seekandang hewan—karena tidak ada lagi tempat bagi keluarga itu di kota penginapan—Yesus dilahirkan.

KEMISKINAN dan pengungsian memang merupakan warna dan ciri di awal kehidupan Yesus. Orang Kristen percaya, awal kehidupan Yesus juga seperti itu. Sekurang-kurangnya ada kesadaran bahwa kelaparan hidup manusia itu sering merupakan sebuah perjalanan keterpaksaan. Dalam keterpaksaan itulah manusia harus bersikap. Melawan atau menolaknya, atau sebaliknya, menerimanya sambil memaknainya.

Pada zaman kekuasaan Romawi, cacah jiwa atau pendataan ulang penduduk, khususnya di wilayah Palestina, lebih sering menimbulkan gelombang pemberontakan ketimbang situasi yang aman. Ini wajar karena para penguasa itu cacah jiwa selalu diidentikkan dengan upaya penguasa untuk merelokasi penduduk dan mengobrok-abrik kemapanan.

Cacah jiwa di Palestina, yang dilakukan oleh Gubernur Suriah, Sulpicius Quirinus, pada tahun 6-7 Masehi misalnya, telah mengobarkan pemberontakan orang-orang Yahudi di bawah pimpinan Yudas dari Galilea. Tradisi pertawanan terhadap upaya relokasi penduduk memang sudah menjadi salah satu ciri dari Yudaisme. Konflik Israel-Palestina yang tak kunjung selesai, misalnya, bisa dipandang dari sisi ini.

SAAT ini di dunia, relokasi penduduk juga banyak terjadi di mana-

mana. Hampir semuanya karena terpaksa atau dipaksa.

Di Venezuela, akibat bencana alam yang telah menewaskan lebih dari 50.000 orang, sekitar 200.000 penduduk terpaksa diungsikan. Di Chechnya, lebih dari 5.000 penduduk harus meninggalkan tempat tinggal mereka karena serangan tentara Rusia. Sementara ratusan ribu pengungsi Kosovo dan Serbia masih harus bertahan kedinginan menunggu pemukiman yang lebih layak.

Di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia sama saja. Menurut laporan badan PBB urusan pengungsi, saat ini saja terdapat sekitar satu juta warga Afrika yang berstatus sebagai pengungsi. Sementara di Kolombia, lebih dari 200 keluarga terpaksa mengungsi guna menghindari konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan para gerilyawan. Dan di Indonesia, saat ini tercatat sekitar 700.000 pengungsi asal Timor Timur, Temate, Ambon, dan Aceh, yang masih harus hidup di berbagai tempat penampungan tak-layak-huni.

Mengapa masalah pengungsi dan relokasi penduduk ini diangkat dalam pembicaraan mengenai Hari Natal? Adakah relevansi yang mendesak untuk itu?

KISAH Natal juga memiliki nuansa politik. Ia merupakan sebuah kisah mengenai rakyat jelata yang direlokasi, yang dipaksa untuk pindah, yang diharuskan untuk mengungsi, hanya demi memenuhi kebijakan sepihak dari penguasa.

Hampir semua peristiwa pengungsian penduduk dunia yang terjadi di tahun 1999 ini, merupakan keputusan sepihak dari mereka yang sedang berkuasa. Kekerasan dan kekejaman memang pada akhirnya selalu menyertai keputusan tersebut. Rakyat biasa memang tidak sanggup untuk melawannya.

Dari sisi struktural, fakta pengungsian paksa menunjukkan bahwa ternyata rakyat hanya sekadar menjadi obyek permainan politik. Mereka bukanlah pemilik kedaulatan. Ini sangat menyedihkan, karena bila pada sebuah bangsa, kedaulatan rakyat sudah dimatikan, sesungguhnya peradaban bangsa itu sudah punah. Sudah sejauh inikah situasi kemanusiaan dunia menjelang tahun 2000? Tentu, harapannya tidaklah demikian.

Kisah Natal mencoba memperlihatkan bahwa dalam situasi pengungsian paksa itu masih ada harapan untuk memunculkan sebuah paradigma baru.

Secara fisik, manusia memang bisa ditentukan oleh berbagai struktur atau sistem. Namun, secara rohani, manusia tetaplah makhluk yang bebas, yang hanya boleh bergantung pada Penciptanya saja. Napas kebebasan eksistensial semacam inilah yang ingin diembuskan oleh Kisah Natal. Melalui napas tersebut, tulang-tulang yang sudah mati pun bisa dihidupkan. Dari kolam bertumpuk, bunga teratai pun bisa menghasilkan bunga yang indah. Selamat Hari Natal.

Tajuk Rencana

Pertemuan KPP HAM dengan Mantan Panglima TNI Menjernihkan Suasana

INILAH keterangan mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto setelah bertemu dan memberi keterangan kepada Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM, "Di sini belum ada tuduhan. Temuan juga belum ada. Tetapi P HAM) mencoba menanyakan kepada kami apa betul perbuatan itu dilakukan oleh TNI, jawabannya tidak".

Maksudnya, "TNI tidak pernah memberikan perintah apalagi mengizinkan untuk membakar kota-kota, membunuh orang banyak, mencong terjadi pengungsian, justru sebaliknya".

Beberapa perwira tinggi, perwira menengah, dan berbagai pihak lain akan diminta keterangannya oleh KPP HAM. Bahan itu untuk melengkapi hasil pengumpulan keterangannya ke Timor Timur.

Sementara itu, Tim Advokasi HAM TNI, bahkan Prof Muladi sebagai pimpinan Tim bidang nonlitigasi, juga akan mengumpulkan keterangan Timor Timur. Ia dan rekan-rekannya dari Tim Advokasi sudah memperoleh izin dari Administrasi Transisi Timtim untuk masuk ke Dili.

PENGUMPULAN bahan dan keterangan oleh kedua Tim, yakni KPP HAM dan Tim Advokasi masih harus dilanjutkan. Namun pertemuan antara KPP HAM dengan mantan Panglima TNI hari Jumat lalu, telah membuahkan hasil. Ialah munculnya rasa lega pada kedua pihak dan jtnya rasa curiga dan saling tak percaya.

Buah pertemuan itu kita sambut positif. Prasangka dan saling curi-curi kecuali salah tempat juga merugikan dan menimbulkan ketegangan. Akibat yang tidak menjernihkan suasana. Proses pengumpulan bahan dan keterangan harus kita terima sebagai apa adanya, suatu proses yang ternyata harus kita jalani.

Prasangka dan saling curiga di antara kita merupakan buah dari masa lampau yang serba tertutup, serba menduga, serba memberi kesan rekayasa dan intrik. Kini, dalam era reformasi prodemokrasi, asas umum dan kemerdekaan berpikir dan berpendapat, segala sesuatu tera, transparan, dikontrol, dan diuji.

Hasil yang mungkin tak terduga dari pertemuan KPP HAM dengan mantan Panglima TNI ialah surutnya prasangka dan saling curiga yang sempat muncul dan marak. Selanjutnya, biarlah dalam suasana dan semangat apa adanya dan proporsional itulah, pengumpulan bahan dan keterangan dilanjutkan.

KITA garis bawah, buah pertemuan di atas, karena semangat dan prestasinya berlaku untuk sikap dan cara kita menghadapi persoalan perubahan lainnya, baik yang menyangkut TNI maupun lembaga lain. Kita menyebutkan semangat dan referensi itu adalah reformasi!

Kecuali persoalan HAM yang dialamatkan pertanggungjawabannya pada TNI seperti di Timor Timur, di Aceh dan di beberapa tempat serta adian lainnya, TNI sebagai institusi juga telah dan sedang menjalani reformasi.

Perubahan yang dibawa reformasi menerpa dan menggugat lembaga lain, seperti partai politik, media massa, birokrasi, institusi dan praktisi ekonomi. Kenapa TNI ditempatkan secara sentral dalam perubahan ini reformasi?

Karena dalam sistem dan pemerintahan lama, TNI diposisikan sebagai pilar sentral bersama Birokrasi, Golkar dan Usaha Ekonomi. Posisi dan peranan TNI sentral dalam pertahanan/keamanan, sekaligus dalam

sosial politik. Versi dan pelaksanaan dwifungsi bereskalasi sejalan dengan proses sentralisme dan represi dari sistem dan pemerintahan lama.

SISTEM dan pemerintahan lama itu otokrasi. Sistem itu oleh reformasi diubah menjadi demokrasi. Dalam sistem demokrasi dan pemerintahan demokrasi, bagaimana posisi dan peranan TNI. Inilah persoalan besar yang seara pro-aktif ditangkap dan ditanggapi oleh TNI dari dalam dan mau tidak mau juga dari luar, dari masyarakat.

Mengapa tanggapan terhadap perubahan TNI juga ditanggapi dari luar, oleh masyarakat dan berbagai lembaga serta perwakilannya? Karena TNI berasal dari rakyat dan karena itu merupakan anak rakyat. Juga karena TNI secara faktual empiris besar bahkan menentukan posisi dan peranannya dalam sistem dan pemerintahan lama.

Juga karena tidak senantiasa berlangsung sewajarnya apa yang dilakukan oleh TNI di masa lalu dalam memberikan makna dan melaksanakan tugasnya baik oleh institusi maupun oleh anggota-anggotanya. Sebutlah maraknya tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Tuntutan perubahan dan pertanggungjawaban tidak terbatas pada TNI. Tetapi karena posisi dan peranan TNI sentral dalam sistem dan pemerintahan lama, TNI ditempatkan dan disorot pada titik fokus.

SEPERTI dapat kita ikuti, tuntutan dan tanggapan terhadap perubahan reformasi itu di dalam TNI maupun di luar TNI menimbulkan perbedaan. Terbawa oleh kondisi umum yang sarat emosi, prasangka, salah-menyalahkan, perbedaan itu acapkali disertai emosi, ledakan emosional dan tanggapan emosional.

Hal itu masuk akal dan wajar. Begitu lama kita tertekan, sehingga hanya bisa menyimpan pikiran, perasaan bahkan tekanan. Begitu lama proses saling curiga antarkita berkecamuk. Ketika reformasi membuka katup dan tekanan, meledakkan energi keluar.

Celakanya, meledaknya energi keluar tidak serta-merta dan barangkali juga memang tidak tidak mungkin disertai penyelesaian dan penanganan atas segalanya. Dalam kondisi serba berkepanjangan dan kompleks itulah, kini kita berada.

SEKALI lagi kita ingatkan, bukan hanya TNI yang menjalani tuntutan perubahan prodemokrasi, prosupremasi hukum, prohak asasi manusia, prokeadilan baik keadilan politik, sosial maupun ekonomi. Semua lembaga mengalaminya.

Lembaga-lembaga itu tidak kurang pentingnya, seperti lembaga birokrasi pemerintahan, lembaga hukum, lembaga perwakilan. Kesadaran dan pemahaman itu penting dan berguna untuk menetralkan perasaan ditekan atau dihujat sendiri.

Kesadaran dan pemahaman perihal sedang berlangsungnya reformasi terhadap institusi-institusi sentral dan strategis bisa memperkuat saling pengertian dan toleransi positif di antara institusi-institusi dan di antara sesama kita.

Pemahaman yang benar serta sikap yang wajar diperlukan karena proses reformasi itu harus kita lanjutkan. Reformasi telah menjadi komitmen bersama. Komitmen barulah berarti, jika dilaksanakan secara konsisten. Kita terima secara kritis dan bijak proses reformasi itu. Namun proses itu haruslah konsisten.

Tajuk Rencana

Mudik Bagian Peredaan Ketegangan, Berikan Rasa Aman dan Beban Wajar

PAPAT dipastikan gelombang arus mudik akan meninggi pekan ini. penghuni Jakarta dan sekitarnya, mulai memadati aneka sarana an: bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara, maupun kendaraanaraan pribadi.

telah tahun lalu "tradisi" mudik cenderung agak sepi, tahun ini diembali marak. Selain karena berdekatnya saat perayaan Natal, baru, dan Lebaran, juga karena mulai leganya rongga dada warlah hampir dua tahun ditekan kondisi krisis.

emang pasti urusan kantung belum pulih, sebab krisis ekonomi malilit. Namun saat kondisi aman-stabil-tenang mulai terjadi, ketika hahawa hari esok sudah akan lebih baik dari hari ini sudah tumbuh, pun lantas akan berani berspekulasi. Termasuk, bila perlu menjual adangan atau pinjam sana-sini, yang penting bisa mudik.

an tetapi, bukankah pula sebenarnya sebagian roda ekonomi dup, bahkan ketika puncak krisis ekonomi terjadi? Ekonomi rakaha kecil-kecil, sektor informal yang tak mengenal valuta asing. tau penyertaan modal pemerintah, tetap bertahan meskipun pas-sebaik keadaan normal.

TA pun sudah mendengar, bahwa instansi terkait telah mencoba kan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi masa-masa t. Penambahan armada angkutan—laut, udara, darat, dan peangan—konon telah disiapkan. Bahkan dari Jakarta, mobil-mobil licadangkan, untuk mengantisipasi luapan penumpang.

tuk melindungi keselamatan, berlatar belakang buruknya kualitas an umum pasca-krisis ekonomi, Departemen Perhubungan akan kan uji kelayakan di setiap terminal keberangkatan bus. Sementara pengatasi masalah keamanan, Polda Metro Jaya mengaku telah pkan 21.000 personel, termasuk para petugas yang akan diterdi pusat-pusat konsentrasi para pemudik.

angkah-langkah antisipasi tersebut bukan hanya dilakukan oleh di pusat, di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah, terutama daeig banyak dilintasi para pemudik. Sebagai sebuah peristiwa rutin, ng setiap tahun, pada dasarnya para aparat kita dari pusat hingga t, sudah sangat tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan pasasa-masa tersebut.

KAN tetapi, bukankah di balik kerutinan itu kita juga kerap kali terkeingat memberikan toleransi terhadap macam-macam praktik me n yang rutin terjadi. Katakanlah, akibat saking rutinnnya, kita sudah pat lagi melihat bahwa ini salah dan itu salah.

ari-hari ini misalnya kita cukup mendapat bukti, bahwa tiket kere sudah banyak yang jatuh ke tangan calo, yang untuk menebusnya ngan mereka, konsumen harus mengeluarkan uang dua atau n tiga kali lipat dari harga resmi.

an ketika hal seperti itu kita ketengahkan, jawaban kita pun rutin Kalau ketahuan akan kami tindak", atau "Kami akan menindak tpa pun pelakunya."

ahwa setelah pernyataan seperti itu calo tetap berkeliaran, masya tetap dipersulit untuk memperoleh tiket kereta api, itu soal lain lagi. memang menjadi wajar apabila misalnya orang sampai pada kean, "jangan-jangan pelaku percaloan itu memang kita-kita juga".

KASUS tiket kereta api yang diborong calo sekadar contoh, bahwa di balik rutinitas pekerjaan kita masih terdapat hal yang harus kita benahi, kita waspadai, kita kendalikan.

Oleh sebab itu memang sebaiknya, meskipun kita tengah melaku kan pekerjaan rutin, kita tidak menghadapinya dengan sikap rutin. Kare na pada dasarnya, tantangan dan permasalahan baru akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zamannya.

Berkaitan dengan masalah angkutan Lebaran, tantangan terbesar adalah menyediakan sarana transportasi dalam jumlah yang cukup dan sekaligus aman, dengan harga relatif wajar.

Kita tekankan faktor aman, sebab telah menjadi pengetahuan umum, bahwa akibat tekanan resesi ekonomi, kualitas keamanan dan keselamatan angkutan umum sudah merosot drastis.

Ban-ban gundul, suku cadang hasil kanibal dari kendaraan lain, su dah sangat biasa kita temukan. Oleh sebab itu misalnya, kita pandang strategis keputusan pemerintah untuk menerapkan uji kelayakan pada se tiap terminal keberangkatan bus umum.

Persoalannya, akankah kebijakan itu efektif atau bemasib sama de ngan macam-macam kebijakan lain yang cuma baik di kertas. Patut kita dengar misalnya tanggapan sinis, "Ah paling minta duit, *wong* uji kelayakan yang rutin saja cuma uji-ujian, yang penting bayar".

MENURUT laporan wartawan harian ini beberapa waktu lalu, secara umum kondisi jalan lintas Jawa—lintas mudik terpadat—lumayan baik. Namun kondisi musim penghujan sekarang, tetap menuntut kewaspadaan baik dari para pemudik maupun para petugas angkutan Lebaran. Selain karena di beberapa wilayah dikenal rawan banjir, kondisi jalan licin juga memerlukan perhatian lebih dari aparat.

Di luar masalah-masalah "rutin", sejak tahun lalu muncul soal baru yang perlu mendapat perhatian lebih dari pihak aparat keamanan. Yakni, meningkatnya intensitas gangguan keamanan, seperti perampokan dan pmerasan, di beberapa lintas Jawa dan Sumatera.

Fenomena ini sudah amat menggelisahkan dalam setahun terakhir. Bukan saja bagi para sopir truk dan pemilik barang yang sering jadi sa-saran pembajakan, tetapi juga bagi para penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi. Cerita di sekitar kasus-kasus pembajakan bus umum dan penghadangan mobil pribadi, sudah mengundang kengerian tersendiri bagi para calon pemudik.

KITA ketengahkan berbagai hal tersebut sekadar mengingatkan ki-ta bersama, bahwa menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan ke-sempatan kepada masyarakat agar paling tidak dapat mudik secara aman, selamat, dan pembebanan yang wajar.

Soal-soal kenyamanan tetap layak diusahakan, meskipun sesuai dengan kondisinya sekarang ini, kita sadari bukanlah hal yang harus dan bisa diberi prioritas.

Kita percaya apabila tiga hal itu saja—aman, selamat, dan pem-bebanan yang wajar—bisa dipenuhi, kita sudah ikut memberi ruang bernapas pada masyarakat, setelah selama dua tahun mereka ber-ada dalam ketegangan. Kita pandang mudik sebagai bagian dari upa-ya peredaan ketegangan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan saat ini.

Tajuk Rencana

100 Hari Pemerintahan Gus Dur-Megawati Jatuh pada 5 Februari 2000

DAK juga bisa dikatakan konsensus atau kesepakatan. Namun dijadikan tonggak, bahwa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman dan Wapres Megawati Soekamoputri akan dinilai setelah 100 hari. 100 hari pemerintahan Gus Dur jatuh pada tanggal 5 Februari 2000. Semula sudah berbagai pendapat dan penilaian kritis terhadap Kabinet Persatuan Nasional. Pendapat dan penilaian kritis itu masuk akal. Inilah pemerintahan dalam sistem demokrasi yang setelah 44 tahun. Mau tidak mau terbuka untuk masukan penilaian, koreksi. Harapan masyarakat dan semua pihak sangatlah besar terhadap pemerintah yang dipilih oleh wakil rakyat secara demokratis.

PERHANTUAN pemerintahan Gus Dur-Megawati dinilai kurang tegas dan efektif serta kebijakannya dalam bidang ekonomi. Dalam menangani perselisihan dan konflik bermuatan separatisme, SARA maupun kerusuhan, tidak jelas. Kurang *greget* adalah salah satu ungkapan yang dipengamat.

alam persoalan KKN, yang melibatkan tindak penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan kesempatan yang menyangkut para pengusaha, sikap dan tindakan pemerintah juga dinilai serba mentula-mula main gebrak, kemudian surut.

Perihal tuduhan KKN terhadap mantan Presiden Soeharto, keluar para kroninya, pemerintah baru juga tidak beranjak banyak. Tidak mau belum ada tindak lanjut setelah SP3 terhadap mantan presiden itu.

Ada rasa tidak puas dan penilaian kritis terhadap cara dan irama dalam menangani persoalan Aceh, Ambon, pelanggaran Hak Asasi Manusia.

TERHADAP isyarat tumbuhnya lingkaran-lingkaran kekuasaan baru, baik terdengar penilaian dan pendapat kritis. Jika tidak disadari dan dihindari, orang khawatir akan berkembangnya nepotisme baru dan praktik korupsi, kolusi.

Kabinet koalisi dinilai tidak menunjukkan kekompakan dan koordinasi yang efektif dan berkinerja nyata. Kekompakan dinilai tidak ada. Secara karakter Kabinet Koalisi justru muncul jelas ialah cenderung berseparah-sendiri.

Kelemahan Kabinet ditambah lagi oleh faktor yang dulu tidak ada, bagaimana menggerakkan Birokrasi agar mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi, terutama KKN.

Menunjukkan sekjen dan eselon satu pada beberapa Birokrasi meletakkan keruwetan. Sepanjang bisa kita ikuti, sumber keonaran itu ada. Pertama, pengangkatan dan penunjukan pejabat birokrasi itu secara obyektif jelas sesuai ketentuan dan kewajaran.

Faktor lain adalah kemungkinan hadimya perlawanan birokrasi berupaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Dicemas perencana yang menyertai pengangkatan pejabat-pejabat kunci itu berlanjut.

AGAIMANAKAH kita menempatkan serta menilai berbagai evaluasi serta pendapat yang semakin kritis itu? Lebih dulu kita akan meyakinkan atau menegaskan hadimya beberapa faktor obyektif dan keadilan juga hadimya berbagai faktor subyektif.

Faktor obyektif yang sentral dan besar pengaruh serta akibat-akibat adalah sosok kondisi krisis yang diwarisi oleh Pemerintah Gus Dur-wati dan kita warisi bersama pula.

Kondisi krisis di lingkungan sosial politik, keamanan, ekonomi, humoral dan moralitas adalah sedemikian rupa akumulatif, tali-temali parah, sehingga memerlukan cara penanganan khusus.

Tidaklah mungkin hanya pemerintah yang menangani tanpa dukungan dan partisipasi yang konsisten dari semua pihak, elite politik, eksistensi dan pemimpin masyarakat, berbagai lembaga masyarakat.

Kondisi krisis yang kita warisi adalah sedemikian parah dan berkornya, sehingga dapatkah persoalan dan kasus-kasusnya hanya dipecahkan secara hukum. Ambil contoh kasus mantan Presiden Soeharto sebagai ilustrasi. Berulang kali dicoba penyelesaian secara hukum pengadilan, setiap kali maju-mundur.

CONTOH di bidang ekonomi *seabreg-abreg*. Yang terakhir, misal-

nya, pendapat bahwa jika hasil pemeriksaan BPK terhadap Bank Indonesia diumumkan, ibaratnya bumi Indonesia akan *gonjang-ganjing*. Lantas bagaimana? Diumumkan atau tidak.

Contoh lain, kasus Bank Bali, kasus Texmaco, kasus grup-grup ekonomi besar lainnya. Masalah dan kasus mulai diumumkan. Beberapa digebrak dibawa ke Kejaksaan Agung. Media dan pengamat ramai berkomentar dan adu pendapat. Lambat laun redalah segala sesuatunya.

Marilah kita akui secara jujur. Siapa yang kendur, surut pendapat, adu argumen pro-kontra. Melakukan pendekatan dan lobi tingkat tinggi? Bukan hanya lingkungan pemerintah dan pejabat. Hampir-hampir semua pihak, termasuk pengamat, pakar, anggota DPR, media, elite politik, pemimpin politik.

Contoh dan ilustrasi itu dapat dilanjutkan ke bidang represi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Polanya serupa. Terjadi polemik, lobi, presisi, adu argumen berkepanjangan.

Itulah kondisi obyektif dari sosok persoalan yang kita hadapi sebagai warisan masa lampau. Sosok persoalan itu secara obyektif sedemikian besar, rumit, terpuruk dan parahnya, sehingga gamang dan mana akan ditangani, bagaimana cara penanganannya dan oleh siapa?

TENTU saja, penanganan oleh pemerintah. Pemerintahan Gus Dur dan Megawati tinggi kredibilitas dan legitimasinya. Kredibilitas dan legitimasi yang mereka miliki tidak terbatas pada urusan ekonomi. Tinggi pula kredibilitas dan legitimasi pemerintah dalam bidang sosial politik, termasuk yang menyangkut visi dan sendi-sendi eksistensi dan persaudaraan bangsa Indonesia.

Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gus Dur dan Megawati tidak mempunyai latar belakang yang disiapkan matang, tidak pula mempunyai pengalaman. Komitmen persatuan dan rekonsiliasi ikut menyebabkan para menteri yang dipilih pun, miskin pengalaman dalam pemerintahan.

Harus juga menjadi pertimbangan, pemerintah sekarang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem demokrasi. Serba harus terbuka. Serba dikontrol dan dikritik. Serba bebas berpendapat. Bagaimana menemukan keseimbangan yang fisibel antara demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. Bagaimana membenarkan tempat kepada hadimya *strong and effective government* dalam sistem demokrasi?

Tidak pula dapat kita abaikan catatan yang sudah kita kemukakan di atas. Bahwa elite politik, pemimpin politik, tokoh-tokoh politik, pakar, pengamat, media, terbawa hanyut oleh beragam pandangan dan kepentingan jika dihadapkan pada kasus-kasus besar.

AKHIRNYA, apakah kesimpulan kita? Pemerintahan Gus Dur-Megawati termasuk Kabinetnya lemah, terutama dalam koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakannya. Sejumlah menteri belum 'bunyi'. Sebaliknya usia pemerintah yang baru dua bulan atau bahkan tiga bulan, belum cukup untuk menilai secara proporsional.

Pemerintah baru bukan pemerintah otokrasi, melainkan pemerintah demokrasi. Kita masih berada dalam peralihan dari otokrasi ke demokrasi. Kita terbiasa dengan pemerintah yang kuat, efektif, otoriter.

Perlu dipertimbangkan, ada perbedaan visi, kepribadian dan kepemimpinan antara pemerintah lama dan kepemimpinan baru. Kemarin figur militer dan teknokrat. Kini figur ulama, cendekiawan, budayawan, humanis.

Kemarin segala sesuatu justru oleh pemerintah. Kini sejauh mungkin justru oleh masyarakat. Tetapi karena masyarakat masih dalam kondisi *linglung*, gejala serba kurang menentu seperti sekarang inilah yang kita alami.

Apakah dengan demikian pemerintah boleh *cuek* terhadap pendapat dan penilaian kritis itu? Pemerintah wajib memperhatikannya benar-benar. Pemerintah agar peka terhadap kecemasan akan munculnya nepotisme dan KK baru, korupsi-kolusi. Perlu diperbaiki kekompakan, koordinasi dan efektivitas Kabinet.

Dalam usaha menangani masalah-masalah besar dalam ekonomi, politik, keamanan, hak-hak asasi, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus terus-menerus mengajak dan melibatkan semua pihak seluas mungkin dan serepresentatif mungkin.

(Kompas, 29 Desember 1999, halaman 4)

Tajuk Rencana

Demokrasi Barulah Sisi Sebelah Demokrasi; Sisi Lainnya, Kita, Masyarakat!

INGKAPAN berkata, pemerintah datang dan pergi, rakyat tetap. ah karena ungkapan itu, maka yang diberi batas waktu dan dinilai anya adalah pemerintah, sementara rakyat tidak, masyarakat tidak. i, bagaimana kita harus menafsirkan, demokrasi mempunyai dua emerintah dan masyarakat.

ersoalan itu menjadi lebih aktual ketika faham kita tentang sistem emerintahan demokrasi adalah sistem politik dan pemerintahan bertumpu pada *civil society*, masyarakat madani.

tidak hanya sampai di situ. Dalam komitmen kita membangun desi, masyarakat madani kita sepakati untuk menjadi batu sendinya. lah mungkin demokrasi dan pemerintah demokrasi hidup dan be-tanpa kehadiran serta partisipasi masyarakat madani.

SEJARAH banyak negara menunjukkan berbagai jalan yang ditem-alam membangun masyarakat madani dan demokrasi. Negara-ne-dustri Barat lebih mengacu ke proses dikembangkannya lebih du-syarakat madani, barulah kemudian demokrasi mengikuti sebagai r dan infrastrukturnya.

faham, prinsip dan ide demokrasi tumbuh dalam masyarakat. Ter-k lapisan terdidik, tercerahkan dan lapisan menengah yang cukup Dibangun dan dikembangkan hadimya masyarakat terbuka, yang akui dan menghargai persamaan atas dasar kesamaan martabat sia dan kesamaan di depan hukum.

Masyarakat madani menjadi ekspresi kesadaran atas hak dan ke-annya sebagai warga secara individual dan secara bersama-sama. arakat madani menjadi memberikan kecerdasan dan tanggung) kepada Kedaulatan Rakyat.

Ekspresi dan saluran masyarakat madani seribu macam. Ada per-an masyarakat. Ada organisasi kemasyarakatan. Ada lembaga aya masyarakat. Ada beragam organisasi kepentingan dan profe-la cendekiawan dan budayawan. Ada komunitas bisnis. Ada partai-i politik.

Forum masyarakat madani juga aneka macam, formal, seperti lem-banga perwakilan; dan nonformal seperti wacana, komunikasi, a massa, pernyataan pendapat, unjuk rasa.

DALAM sistem dan pemerintah demokrasi, posisi, serta peranan i-partai politik amat sentral. Hal itu baru saja kita saksikan. Wakil-l partai politiklah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam ilihan Umum tanggal 7 Januari 1999.

Mereka terpilih duduk dalam lembaga perwakilan, MPR, DPR, iD. Para wakil partai (golongan, utusan daerah, TNI/Polri) memilih iden dan wakil presiden. Mereka juga menyusun GBHN, betapa pun kat dan padatnya. Mereka membuat beberapa keputusan dan kete-n.

Presiden dan wakil presiden menyusun Kabinet. Penyusunannya di-kan dengan bukan saja mengajak bicara tokoh-tokoh pemimpin par-termasuk TNI/Polri, tetapi menunjuk orang-orang mereka sebagai iteri anggota Kabinet.

Selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan proses demokrasi, pe-intah yakni menteri bahkan presiden berapat kerja, dengar penda-serta berkonsultasi dengan DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat, juga partai-partai serta banyak pihak memberi masukan, melakukan kontrol, memberikan isyarat per-tan, melakukan koreksi. Pemerintah dan pemerintahan yang demo-

kratis sedang berjalan sesuai dengan aturan, mekanisme serta komit-men kita bersama.

Pengamat, pakar, cendekiawan, budayawan yang mula-mula ramai dan vokal, kemudian surut, barangkali mengendapkan pikiran dan hati, ki-ni mulai lagi memperdengarkan masukan, pandangan serta penilaiannya.

SEDANG terjadi apa yang memang seharusnya berlangsung, yakni bahwa proses pemerintahan dalam sistem demokrasi merupakan inter-aksi yang terus-menerus antara pemerintah dan masyarakat lewat berbagai perwakilan, forum, dan organisasi.

Jelas harus tetap ada pembagian pekerjaan. Pemerintah menye-lenggarakan pemerintahan, eksekutif. Masyarakat melalui berbagai for-um, saluran, dan lembaganya memberikan masukan, kontrol, kritik, dan koreksi. Masyarakat berpartisipasi aktif sehingga pemerintah harus senantiasa aspiratif, artinya menampung dan mempertimbangkan serius aspirasi masyarakat.

Jika kedua spektrum atau dua sisi dari satu mata uang itu, sebutlah mata uang demokrasi, kita cermati, apa yang tampak? Kedua sisi sama-sama bekerja serius sesuai dengan pembagian kerja. Kedua sisi, seka-ligus sedang sama-sama menjalankan tugasnya lewat proses *error and trial*, bekerja sepenuh hati, tetapi juga seraya belajar.

Bukan hanya pemerintah yang sekaligus belajar, juga masyarakat dan berbagai forum serta lembaganya seperti DPR, partai-partai, para politisi, berbagai kelompok, dan eksponen gerakan masyarakat. Par-tisipasi secara pro-aktif dan secara kritis, secara terbuka, dan secara be-bas, tetapi juga seraya belajar.

Sementara itu, setiap kali mempersoalkan kondisi, permasalahan dan tantangan bangsa dan negara kita, tidak mungkin kita bisa membe-baskan diri dari sosok kondisi semacam apa yang ditinggalkan kepada kita.

KALI ini bukan krisis ekonomi, bukan korupsi, bukan utang peng-usaha yang diperoleh secara tidak wajar dan dipergunakan juga secara tidak wajar. Tidak pula ancaman disintegrasi serta berlangsungnya kon-flik-konflik horizontal dan vertikal yang kita soroti.

Kali ini kita menggugat diri dalam persoalan, suasana, dan ling-kungan kehidupan politik kita. Warisan, praktik, serta kebiasaan sosial politik itu tampak berlanjut dan karena itu menghambat kejernihan sua-sana demokratisasi, penegakan hukum, serta usaha kita membangun etos demokrasi.

Suasana dan iklim intrik, apakah telah berhasil ditinggalkan dan di-tinggalkan. Kebiasaan tujuan menghalalkan cara apakah sudah berakhir. Kebiasaan perpolitikan dengan menggunakan cara apa pun yang efek-tif masih tampak di sana-sini.

Banyak argumen dan rasionalisasinya, manakala kita, termasuk atau lebih-lebih yang mempunyai kesempatan, lemah terhadap materi dan uang. Tetapi, betapa pun rasionalisasi itu ada, jika akan menyeleng-garkan proses kekuasaan yang bersih pada pemerintahan maupun pa-da perangkat masyarakat, termasuk lembaga perwakilan dan partai, kelemahan itu haruslah kita campakkan bersama. Ya, bersama-sama, agar tidak terasa amat berat dan kesunyian.

Pada pergaulan biasa sampai ke pergaulan bisnis, profesi dan poli-tik, apa yang setiap kali sangat diperlukan dan bisa membuat perbedaan, *make a difference*? Watak, karakter. Karakter orang per orang. Karakter pejabat. Karakter pemimpin partai dan lembaga negara.

Tajuk Rencana

Hari Ini Hari Terakhir Tahun 1999, Hari Terakhir Abad XX, Milenium Baru?

PERGANTIAN tahun dari tanggal 31 Desember 1999 ke 1 Januari adalah juga pergantian abad, abad ke-20 ke abad ke-21, bahkan pergantian milenium, dari milenium ke-2 ke milenium ke-3.

Perjalanan hidup kita bersama sebagai bangsa dalam tahun 1999, tahun 1998, dalam tahun 1997, dan tahun-tahun sebelumnya mendahului tahun krisis menghentakkan kesadaran, refleksi, dan gugatan diri.

Tidak habis-habisnya kita bertanya, kenapa nasib kita jadi begini? Kenapa konflik agama di Ambon tidak surut, tetapi setiap kali berkobar dalam eskalasi yang lebih besar? Kenapa korban-korban terus bertan dan perusakan susul-menyusul?

Warisan masalah lama belum juga surut. Bahkan entah kenapa, malah seperti timbul keruwetan-keruwetan baru. Dari perspektif itu, kita memasuki tahun baru, tidak dengan langkah pasti, melainkan lebih semenarik kaki terseok-seok!

DA baiknya kita menggunakan perspektif lain yang lebih luas, bukannya setahun atau beberapa tahun, bukan usia Indonesia Merdeka 54 tahun, tetapi seabad. Perspektif 100 tahun! Tentu juga pasang surut pergulatan dan perjuangan yang mencapai klimaks gemilang Indonesia Merdeka.

Kita catat peranan gerakan dan perlawanan rakyat. Gerakan dan perlawanan rakyat yang disertai pengorbanan, membawa hasil. Beberapa aktor membuat pergerakan dan perlawanan rakyat itu berhasil.

Di antaranya, ketika naluri dan suara hati pergerakan rakyat diceritakan dan dilengkapi dengan visi, ide serta perangkat modern. Modern berarti visi dibangun lewat pergulatan dan perumusan ideologi. Gediberi wadah organisasi.

Pembangkitan rakyat dicerdaskan oleh pendidikan dan pergaulan aktual, kultural dan teknologi. Gerakan rakyat mengambil organisasi, dan manajemen yang juga digunakan oleh sistem dan petahanan kolonial.

KESADARAN dan gerakan rakyat dibangun menjadi kesadaran bangsa, berbahasa, bernegara. Warisan kemacamragaman sejarah oleh sistem kolonial dieksploitir untuk politik *divide et impera*, pembelahan dan perintah, oleh gerakan rakyat diubah menjadi dasar kerohanian dan kebangkitan kebangsaan.

Bertahap-tahap dan berproses lama, bangkitnya kesadaran dan kerohanian untuk membangun satu bangsa, bangsa Indonesia; satu bahasa, bahasa Indonesia; satu Tanah Air, Tanah Air Indonesia; dan satu negara, negara Republik Indonesia.

DUNIA kagum, mereka, bangsa Indonesia berhasil mendirikan satu negara, tempat penduduk nomor empat terbesar di dunia bisa hidup berkeadilan dalam persaudaraan, kekeluargaan, dan rasa persatuan.

Orang hormat, para Bapak Pendiri Republik berhasil menggali dan menyalurkan aspirasi rakyat meletakkan lima sendi dasar tempat tegaknya Republik menaungi dan melindungi seluruh rakyat dengan latar belakang perjuangan yang begitu aneka-ragam.

Ketika bangsa-bangsa masih bergulat, bersaing bahkan perang untuk menemukan jalan ketiga, sistem sosial ekonomi yang tidak menin-

das dan tidak mengangakan kesenjangan sosial tetapi sebaliknya juga tetap produktif dan menghargai individu, bukankah sebenarnya kita bangsa Indonesia telah menemukan kerangka, semangat, dan arah jalan ketiga itu?

Di antaranya disebut sebagai sublimasi dari paham kapitalisme dan paham komunisme. Disebut juga sebagai demokrasi yang menampung persamaan aspirasi politik dan ekonomi.

KITA mengalami jatuh-bangun. Komitmen yang disertai usaha uji coba untuk mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan, setiap kali terdesak oleh kuatnya warisan feodal. Warisan feodal memberikan *privilege* yang diangggp sudah pada tempatnya dan dengan sendirinya kepada mereka yang memegang jabatan dan kekuasaan.

Pertemuan antara warisan feodal, otokrasi, hirarki birokrasi, dan unsur fasisme merusak penyelenggaraan kekuasaan, pemerintahan, dan pembangunan. Komitmen membangun demokrasi kerakyatan dan ekonomi kerakyatan tinggal merupakan jargon kosong.

Keroposnya penyelenggaraan kekuasaan, pemerintahan, dan pembangunan ke dalam membuat Indonesia mengalami krisis multidimensi ketika badai global ikut bertiup. Indonesia menjadi orang sakit di Asia. Wajah Indonesia menimbulkan asosiasi dengan sementara wajah negara-negara Afrika.

PERGERAKAN rakyat lewat gerakan mahasiswa, LSM, kaum cendekiawan, dan eksponen-eksponen bangsa berhasil bangkit. Kita bangkit lewat jalan demokrasi dan ekonomi pasar sosial. Pemilihan Umum 7 Juni 1999 lagi-lagi dihormati orang.

Akan tetapi warisan krisis belum usai. Baik oleh faktor obyektif maupun oleh hadimnya desas-desus rekayasa seperti provokator, konflik antarsesama warga berkecamuk seperti di Ambon. Tuntutan daerah untuk mengatur dirinya secara adil tumpang-tindih dengan beberapa gerakan separatisme. Disintegrasi bangsa mengancam.

Belum seumur jagung usia pemerintah baru, tanda-tanda penyakit menahun bisa kambuh lagi. Esensi dan substansinya ialah kolusi kekuasaan dan kesempatan. Substansinya ialah pemimpin yang tergoda untuk menjadi tidak peka dengan penghayatan senasib-sepenanggungan dengan rakyat. Esensinya, lagi-lagi mulai maraknya intrik, bersaing kepentingan, rebutan rezeki!

JANGAN kita biarkan larut dan hanyut oleh arus gelombang yang merupakan warisan dan sisa demoralisasi *kemarin*. Pada hari terakhir tahun 1999, yang berarti akhir abad ke-20 dan masuknya kita ke abad ke-21, kita tengok pasang-surut pergulatan bangsa sepanjang abad ke-20 itu!

Puncak pergulatan dan pengorbanan panjang, yakni Indonesia Merdeka, jangan kita biarkan terurai dan berantakan lagi. Kita harus bijak mengambil pelajaran sejarah dan pengalaman. Kita perbaiki secara menyeluruh dan mendasar apa yang harus kita perbaiki.

Akan tetapi janganlah sendi dan kerangka bangunan Negara Republik Indonesia Merdeka, diporakporandakan kembali. Langkah itu bukan kemajuan, justru *retrogesi*, langkah mundur. Sejarah tidak surut. Sejarah maju, bahkan sedang melangkah ke tahun baru, abad baru, milenium baru. Jadilah bangsa yang cerdas dan bijak!

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

C. (Christina) Sri Astuti lahir di Salam, Magelang pada tanggal 4 Maret 1976. Ia adalah puteri kelima dari tujuh bersaudara pasangan Johanes Damacinus Ngatidjo dan Maria Goretti Mudjiati. Ia menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1988 di SD Negeri Krakitan, Salam. Pada tahun 1991, ia menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Marganingsih, Muntilan. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikannya pada tahun 1994 di SMA Bentara Wacana, Muntilan. Pada tahun 1995, ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah (PBSID), dan lulus pada tahun 2001. Ia menulis skripsi yang berjudul *Analisis Wacana Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Kompas: Suatu Tinjauan Struktural dan Ragam Bahasanya*.